

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2020

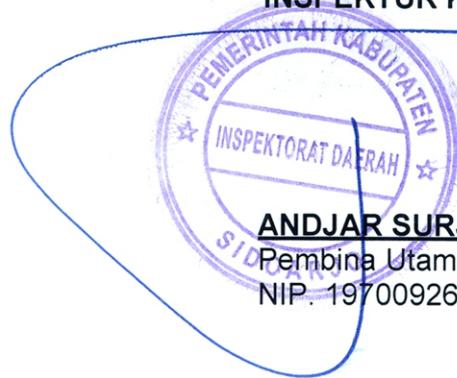
Kami telah mereviu Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa informasi Capaian Akuntabilitas kinerja telah disajikan secara andal, akurat, dan berkualitas

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Sidoarjo, Maret 2021

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700926 199003 1 005

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Sidoarjo, Maret 2021

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



ANDJAR SURJADIANTO. S.Sos.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700926 199003 1 005

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020**



**DISUSUN OLEH :
BAGIAN PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021**

LPPD
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Penjelasan Umum	1
A. Dasar Hukum	1
B. Data Geografis Wilayah	2
C. Jumlah Penduduk	7
D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	14
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan	16
F. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020	21
I.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	21
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	21
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	25
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	26
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	35
I.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	53
1 Dasar Pertimbangan Penerapan SPM (Latar Belakang)	53
2 Dasar Penerapan SPM	55
3 Kebijakan Umum	56
4 Kebijakan Penerapan SPM.	58
A. Bidang Urusan Pendidikan	58
B. Bidang Urusan Kesehatan	63
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	66
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	68
E. Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	70
F. Bidang Urusan Sosial	73
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	76
II.1 Kinerja Makro	76
II.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	77
1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	77
1 Urusan Pendidikan	77
2 Urusan Kesehatan	86
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92
4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	106



5	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	110
6	Urusan Sosial	115
7	Urusan Tenaga kerja	120
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126
9	Urusan Pangan	128
10	Urusan Pertanahan	130
11	Urusan Lingkungan Hidup	131
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	133
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	133
14	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	135
15	Urusan Perhubungan	136
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	138
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	145
18	Urusan Penanaman Modal	149
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	151
20	Urusan Statistik	152
21	Urusan Persandian	153
22	Urusan Kebudayaan	154
23	Urusan Perpustakaan	157
24	Urusan Kearsipan	158
25	Urusan Kelautan & Perikanan	160
26	Urusan Pariwisata	161
27	Urusan Pertanian	162
28	Urusan Kehutanan	163
29	Urusan Energi dan Sumber daya mineral	164
30	Urusan Perdagangan	164
31	Urusan Perindustrian	166
32	Urusan Transmigrasi	168
2	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	168
1	Urusan Pendidikan	168
2	Urusan Kesehatan	169
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	172
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	173
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	175
6	Urusan Sosial	176
7	Urusan Tenaga kerja	177
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	178
9	Urusan Pangan	178
10	Urusan Pertanahan	179



11	Urusan Lingkungan Hidup	180
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	180
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	182
14	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	183
15	Urusan Perhubungan	183
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	184
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	185
18	Urusan Penanaman Modal	185
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	186
20	Urusan Statistik	187
21	Urusan Persandian	187
22	Urusan Kebudayaan	188
23	Urusan Perpustakaan	188
24	Urusan Kearsipan	189
25	Urusan Kelautan dan Perikanan	189
26	Urusan Pariwisata	190
27	Urusan Pertanian	191
28	Urusan Kehutanan	191
29	Urusan Energi dan Sumber daya mineral	192
30	Urusan Perdagangan	192
31	Urusan Perindustrian	193
32	Urusan Transmigrasi	194
3	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	194
1	Urusan Pemerintahan(Perencanaan & Keuangan)	194
2	Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	195
3	Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	196
4	Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	196
5	Urusan Pemerintahan (Transparansi & Partisipasi Publik)	197
II.3	Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	199
A	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	200
B	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	201
C	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya	204
D	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah	206



E	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Nasional	208
F	Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah dicapai	210
G	Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Kinerja	211
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		230
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		236
IV.1	Bidang Urusan Pendidikan	236
IV.2	Bidang Urusan Kesehatan	245
IV.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	261
IV.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	267
IV.5	Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	274
IV.6	Bidang Urusan Sosial	284
BAB V PENUTUP		298



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melaksanakan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu pemerintahan daerah. Di samping itu, laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai sarana laporan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka laporan ini minimal menyajikan 2 (tiga) substansi pokok capaian kinerja yang disajikan, antara lain :

1. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari :
 - a. capaian kinerja makro;
 - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome (hasil) dan Output (Keluaran);
 - c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal

18 Desember 2020 Nomor : 120.04/6931/OTDA tahun 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Sidoarjo di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berlanjutan. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR, S.IP



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

I.1. Penjelasan Umum

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 disusun berdasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Desember 2020 Nomor : 120.04/6931/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112°5' – 112°9' Bujur Timur dan 7°3' – 7°5' Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.



Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,30 Hektar dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin / payau berada di belahan timur meliputi 29,99% dari luas wilayah;
- 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar meliputi 40,81% dari luas wilayah; dan
- 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat meliputi 29,20% dari luas wilayah.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.

Tabel 1
Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Tinggi Rata - Rata (m dpl)	luas Wilayah (Km2)
1	Sidoarjo	4	62.560
2	Buduran	4	41.030



3	Candi	4	40.670
4	Porong	4	29.820
5	Krembung	5	29.550
6	Tulangan	7	31.210
7	Tanggulangin	4	32.290
8	Jabon	2	81.000
9	Krian	12	32.500
10	Balongsendo	20	31.400
11	Wonoayu	4	33.920
12	Tarik	16	36.060
13	Prambon	10	34.230
14	Taman	9	31.540
15	Waru	5	30.320
16	Gedangan	4	24.060
17	Sedati	4	79.430
18	Sukodono	7	32.680
Jumlah			714.240

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Wilayah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kandungan gas bumi yang dibentuk oleh batuan *alluvium* seluas 686,89 Ha tersebar disemua kecamatan, batuan *plistosen fasien sedimen* terdapat di 6 kecamatan, tanah *alluvial* kelabu merata di 18 kecamatan, *assosiasi alluvial* kelabu dan cokelat kekuningan terdapat di 4 kecamatan, yaitu : Krembung, Balongsendo, Tarik, dan Prambon.

Tabel 2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Plistosen Fasien Sedimen (Ha)	Alluvium (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	42,00	6.214,00	6.256,00
2	Buduran	1.469,00	2.633,50	4.102,50
3	Candi	-	40,67	4.066,75
4	Porong	-	29,82	2.982,25
5	Krembung	-	29,55	2.955,00
6	Tulangan	-	31,21	3.120,50
7	Tanggulangin	-	32,29	3.229,00
8	Jabon	-	81,00	8.099,75
9	Krian	-	32,50	3.250,00
10	Balongsendo	-	31,40	3.140,00
11	Wonoayu	-	33,92	3.392,00
12	Tarik	-	36,06	3.606,00



No.	Kecamatan	Plistosen Fasien Sedimen (Ha)	Alluvium (Ha)	Jumlah (Ha)
13	Prambon	-	34,23	3.422,50
14	Taman	448,00	2.705,50	3.153,50
15	Waru	384,00	2.648,00	3.032,00
16	Gedangan	38,00	2.367,75	2.405,75
17	Sedati	355,00	7.588,00	7.943,00
18	Sukodono	-	32,68	3.267,75
Jumlah		2.736,00	24.602,07	71.424,25

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Tabel 3
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	2.966,11	-	3.289,89	-	6.256,00
2	Buduran	1.480,02	-	1.853,22	769,26	4.102,50
3	Candi	1.552,88	-	2.513,87	-	4.066,75
4	Porong	2.083,07	-	899,18	-	2982,25
5	Krembung	2.500,95	454,05	-	-	2.955,00
6	Tulangan	3.120,50	-	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	1.564,77	-	1.664,23	-	3.229,00
8	Jabon	2.580,20	-	5.519,55	-	8.099,75
9	Krian	3.250,20	-	-	-	3.250,00
10	Balombang	3.250,00	2.795,55	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	3.392,00	-	-	-	3.392,00
12	Tarik	2.618,93	987,07	-	-	3.606,00
13	Prambon	2.688,94	733,56	-	-	3.422,50
14	Taman	3.153,50	-	-	-	3.153,50
15	Waru	2.020,67	-	1.011,33	-	3.032,00
16	Gedangan	2.304,31	-	-	101,44	2.405,75
17	Sedati	3.333,04	-	4.609,96	-	7.943,00
18	Sukodono	3.267,75	-	-	-	3.267,75
Jumlah		47.017,64	4.970,23	21.361,23	870,70	71.424,25

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Kondisi air tanah di Kabupaten Sidoarjo antara 0 – 5 meter di bawah permukaan tanah. Daerah banjir terbagi menjadi tiga, banjir karena hujan tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, banjir periodik



di sebagian 5 (lima) kecamatan, dan banjir karena air pasang berada di sebagian 4 (empat) kecamatan.

Tabel 4
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2019

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4.063,62	308,14	-	-	6.256,00
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Krembung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangi	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balombangendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50
14	Taman	-	-	108,00	-	3.153,50
15	Waru	740,50	-	-	740,50	3.032,00
16	Gedangan	195,75	-	-	-	2.405,75
17	Sedati	4.101,57	-	387,90	120,30	7.943,00
18	Sukodono	-	-	-	-	3.267,75
Total		16.312,67	1.573,75	610,40	2.018,55	71.424,25

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan terendah di bulan Agustus.

Tabel 5
Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

No	Lokasi Penakar Hujan	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok t	Nop	Des
1	Kemlaten	226.0	442.0	152.0	229.0	-	16.0	-	-	-	-	91.8	374.0
2	Ponokawan	196.0	909.0	313.0	189.0	-	23.0	-	-	-	-	231.0	222.0
3	Bakalan	261.0	470.0	268.0	109.0	-	18.0	-	-	-	-	182.0	197.0

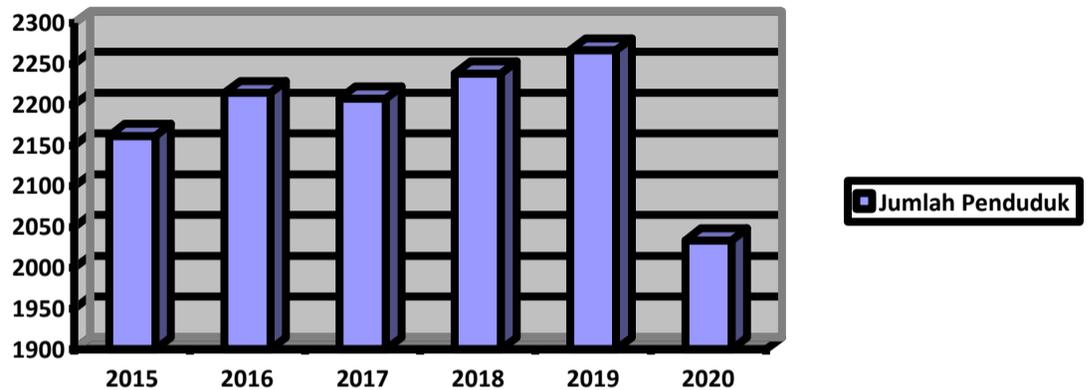


No	Lokasi Penakar Hujan	B U L A N											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Ju l	Ags	Se p	Ok t	Nop	Des
4	Krian	173.0	377.0	325.0	175.0	-	20.0	-	-	-	-	216.0	198.0
5	Ketawang	280.0	450.0	318.0	135.0	-	27.0	-	-	-	-	242.5	223.5
6	Ketintang	250.0	483.0	252.0	234.0	-	24.0	-	-	-	-	130.2	234.0
7	Watutulis	238.0	398.0	228.0	178.0	-	20.0	-	-	-	-	290.0	243.0
8	Pertapan Maduretno	242.0	436.0	361.0	111.8	-	27.0	-	-	-	-	236.0	279.0
9	Cepiples	159.0	361.0	191.0	136.0	-	18.0	-	-	-	-	25.0	220.0
10	Luwung	176.0	438.0	228.0	183.0	-	20.0	-	-	-	-	42.0	241.0
11	Gedangrowo	111.1	322.0	144.0	166.0	-	15.0	-	-	-	-	98.0	121.0
12	Prambon	136.0	438.0	169.0	138.0	-	19.0	-	-	-	-	143.0	181.0
13	Botokan	292.0	529.0	410.0	174.0	-	32.0	-	-	-	-	191.0	214.0
14	Durungbedug	253.0	583.0	196.0	217.0	-	31.0	-	-	-	-	174.0	157.0
15	Bono	301.0	432.0	497.0	124.0	-	53.0	-	-	-	-	126.0	187.0
16	Sruni	359.0	578.0	523.0	147.0	-	35.0	-	-	-	-	240.0	278.0
17	Sedati	346.0	336.0	457.0	257.0	-	49.0	-	-	-	-	76.0	207.0
18	Bankar Kemantren	227.0	548.0	453.0	191.0	-	27.0	-	-	-	-	203.0	337.0
19	Ketegan	406.0	473.0	539.0	292.0	-	60.0	-	-	-	-	74.0	379.0
20	Sumput	66.0	295.0	91.0	47.0	-	4.0	-	-	-	-	62.0	135.0
21	Klagen	256.0	269.0	76.0	88.0	-	5.0	-	-	-	-	287.0	229.0
22	Karangnongko	267.0	543.0	248.0	111.0	-	22.0	-	-	-	-	145.0	163.0
23	Sidoarjo	-	490.0	247.0	235.0	-	36.0	-	-	-	-	119.0	209.0
24	Kludan	201.0	441.0	344.0	167.0	-	15.0	-	-	-	-	67.0	254.0
25	Putat	284.0	518.0	334.0	138.0	-	-	-	-	-	-	44.0	211.0
26	Kedung Cangkring	152.0	371.0	248.0	37.0	-	-	-	-	-	-	48.0	80.0
27	Porong	189.0	423.0	259.0	65.0	-	14.0	-	-	-	-	68.0	125.0
28	Krembung / Biting	129.0	391.0	80.0	122.0	-	4.0	-	-	-	-	49.0	98.0
29	Bedugbulus	140.0	399.0	113.0	168.0	-	5.0	-	-	-	-	136.0	154.0
30	Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata		217.8	453.2	278.1	155.6	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.4	210.6

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

C. JUMLAH PENDUDUK

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan yang cukup tinggi dibanding tahun 2019 sebanyak 232.769 Berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2020, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.033.764 jiwa. Dan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 2.266.533 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Gambar 1**Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo**

Sumber data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 207.817 jiwa, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 56.266 jiwa. Jumlah penduduk per Kecamatan dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6
Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)
Per Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	TARIK	69.189	22.614
2	PRAMBON	79.952	26.231
3	KREMBUNG	69.887	22.530
4	PORONG	73.446	23.892
5	JABON	56.266	18.167
6	TANGGULANGIN	89.804	27.919
7	CANDI	153.423	47.630
8	SIDOARJO	201.115	63.231
9	TULANGAN	102.339	33.586
10	WONOAYU	85.526	27.367
11	KRIAN	130.730	41.659
12	BALONGBENDO	76.050	24.744



13	TAMAN	207.817	66.235
14	SUKODONO	121.897	37.716
15	BUDURAN	98.910	30.780
16	GEDANGAN	120.003	37.218
17	SEDATI	96.636	30.587
18	WARU	200.774	64.919
	T O T A L	2,033,764	647.025

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 7

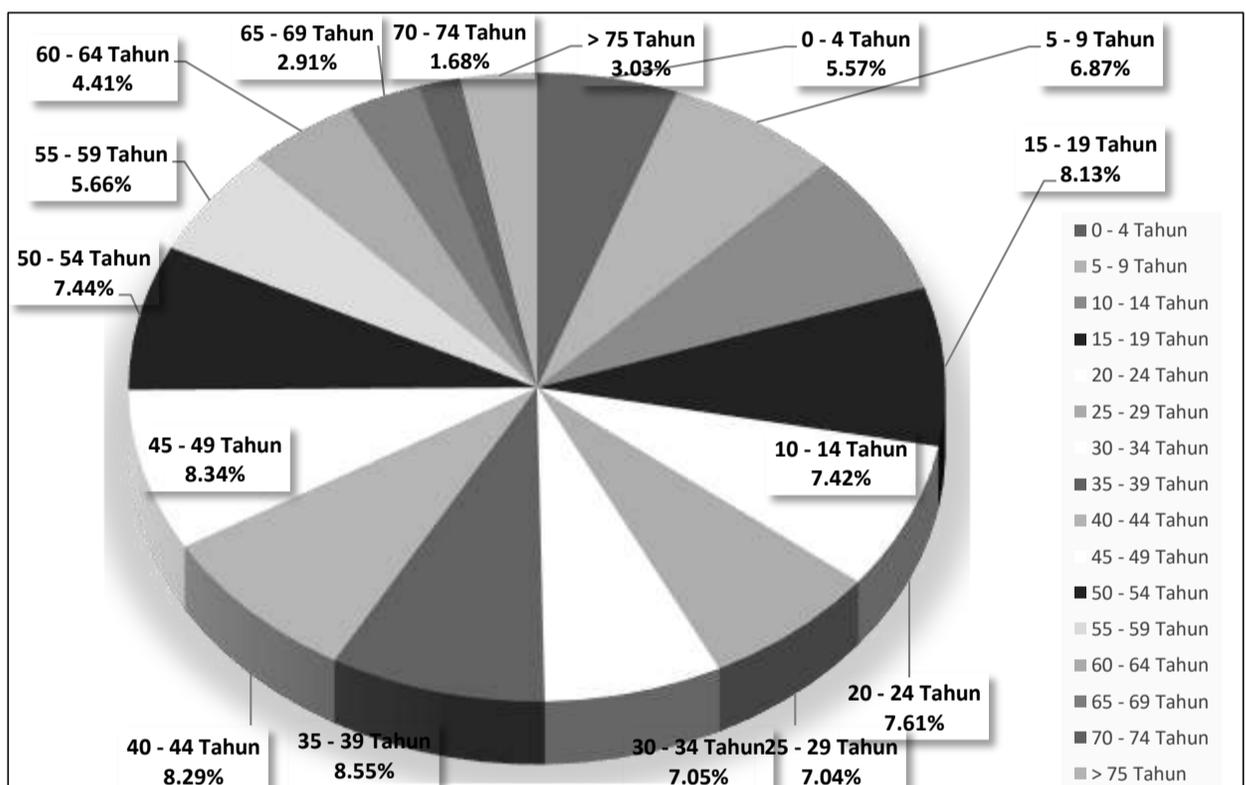
Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	34.830	34.359	69.189
2	PRAMBON	40.397	39.555	79.952
3	KREMBUNG	35.024	34.863	69.887
4	PORONG	37.102	36.344	73.446
5	JABON	28.274	27.992	56.266
6	TANGGULANGIN	45.097	44.707	89.804
7	CANDI	76.872	76.551	153.423
8	SIDOARJO	100.000	101.115	201.115
9	TULANGAN	51.423	50.916	102.339
10	WONOAYU	43.109	42.417	85.526
11	KRIAN	66.413	64.317	130.730
12	BALONGBENDO	38.449	37.601	76.050
13	TAMAN	104.755	103.062	207.817
14	SUKODONO	61.833	60.064	121.897
15	BUDURAN	49.910	49.000	98.910
16	GEDANGAN	60.286	59.717	120.003
17	SEDATI	48.821	47.815	96.636
18	WARU	99.953	100.821	200.774
	T O T A L	1.022.548	1.011.216	2.033.764

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo membentuk Piramida jenis piramida muda (expansive), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi daerah karena tingkat produktifitas suatu wilayah akan jauh lebih tinggi karena banyaknya usia muda dan sedikitnya usia tua. Penduduk di Kabupaten Sidoarjo terbanyak berada di golongan usia produktif, yaitu antara 15 tahun sampai dengan 19 tahun.

Gambar 2
Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2019



Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 8
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	0-4	63.703	58.934	122.637
2.	5-9	78.832	73.831	152.663
3.	10-14	83.399	77.919	161.318
4.	15-19	84.004	78.791	162.795
5.	20-24	78.213	75.501	153.714
6.	25-29	76.534	74.137	150.671
7.	30-34	71.090	68.943	140.033
8.	35-39	81.037	81.627	162.664
9.	40-44	77.345	81.097	158.442
10.	45-49	77.427	82.760	160.187
11.	50-54	73.300	75.310	148.610
12.	55-59	58.374	62.394	120.768
13.	60-64	48.478	46.929	95.407
14.	65-69	32.586	29.239	61.825
15.	70-74	15.475	17.303	32.778
16.	> 75	22.611	26.641	49.252
TOTAL		1.022.408	1.011.356	2.033.764

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.022.408 jiwa atau 50,27%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.011.356 jiwa atau 49,73%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut :

Gambar 3



Sumber : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo memiliki kualifikasi pendidikan Lulusan SMA Sederajat, yaitu **39,21%** dari jumlah penduduk. Meski demikian, masih ada **60,79%** penduduk Kabupaten Sidoarjo yang masih berpendidikan rendah atau Lulusan SD Sederajat.

Komposisi penduduk menurut pendidikan tersajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9
Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2020

N O	KECAMATAN	LULUSAN SD	LULUSAN SMP	LULUSAN SMA	LULUSAN S1	LULUSAN S2	TOTAL
1	TARIK	16.359	13.390	17.673	2.067	72	49.561
2	PRAMBON	18.477	14.201	22.597	2.930	88	58.293
3	KREMBUNG	13.825	12.630	20.042	2.473	87	49.057
4	PORONG	15.643	12.682	19.207	2.775	120	50.427
5	JABON	13.945	10.911	13.584	1.630	49	40.119
6	TANGGULANGIN	17.070	15.417	25.717	4.737	201	63.142
7	CANDI	25.530	21.222	44.841	12.031	627	104.251
8	SIDOARJO	27.411	24.501	58.968	24.910	1.523	137.313
9	TULANGAN	18.719	17.054	31.518	4.747	161	72.199
10	WONOAYU	20.446	13.367	21.721	3.474	131	59.139
11	KRIAN	25.297	20.737	37.012	6.879	248	90.173
12	BALONGBENDO	16.246	13.794	19.762	2.643	84	52.529
13	TAMAN	30.543	28.769	68.332	17.018	1.076	145.738
14	SUKODONO	19.120	17.342	38.261	9.519	437	84.679
15	BUDURAN	12.972	14.106	31.061	9.401	578	68.118
16	GEDANGAN	16.815	16.547	36.505	10.373	563	80.803
17	SEDATI	15.429	13.056	30.326	7.734	652	67.197
18	WARU	23.441	25.481	62.121	24.993	1.856	137.892
	TOTAL	347.288	305.207	599.248	150.334	8.553	1.410.630

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan untuk komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 10

Penduduk Menurut Mata Pencapaian Tahun 2019

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	615.678	45.	USTADZ/MUBALIGH	113
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	118.096	46.	JURU MASAK	30
3	PELAJAR/MAHASISWA	325.217	47.	PROMOTOR ACARA	0
4	PENSIUNAN	15.685	48.	ANGGOTA DPR RI	3
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	27.382	49.	ANGGOTA DPD RI	1
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	13.915	50.	ANGGOTA BPK	1
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	4.655	51.	PRESIDEN	0
8	PERDAGANGAN	17.764	52.	WAKIL PRESIDEN	0
9	PETANI/PEKEBUN	41.640	53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0
10	PETERNAK	48	54.	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	787	55.	DUTA BESAR	1
12	INDUSTRI	166	56.	GUBERNUR	0
13	KONSTRUKSI	192	57.	WAKIL GUBERNUR	0
14	TRANSPORTASI	189	58.	BUPATI	1
15	KARYAWAN SWASTA	718.225	59.	WAKIL BUPATI	0
16	KARYAWAN BUMN	5.685	60.	WALIKOTA	0
17	KARYAWAN BUMD	562	61.	WAKIL WALIKOTA	0
18	KARYAWAN HONORER	689	62.	ANGGOTA DPRD PROP.	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	2.759	63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	14
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.966	64.	DOSEN	2.627
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	64	65.	GURU	20.728
22	BURUH PETERNAKAN	17	66.	PILOT	42
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	326	67.	PENGACARA	126
24	TUKANG CUKUR	20	68.	NOTARIS	85
25	TUKANG LISTRIK	65	69.	ARSITEK	41
26	TUKANG BATU	1.046	70.	AKUNTAN	16
27	TUKANG KAYU	212	71.	KONSULTAN	69
28	TUKANG SOL SEPATU	26	72.	DOKTER	1.361
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	102	73.	BIDAN	1.274
30	TUKANG JAHIT	429	74.	PERAWAT	2.334
31	TUKANG GIGI	4	75.	APOTEKER	183
32	PENATA RIAS	48	76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	20
33	PENATA BUSANA	6	77.	PENYIAR TELEVISI	1
34	PENATA RAMBUT	36	78.	PENYIAR RADIO	4
35	MEKANIK	240	79.	PELAUT	245
36	SENIMAN	72	80.	PENELITI	7
37	TABIB	18	81.	SOPIR	3.445



38	PARAJI	3	82.	PIALANG	6
39	PERANCANG BUSANA	9	83.	PARANORMAL	10
40	PENTERJEMAH	6	84.	PEDAGANG	13.434
41	IMAM MASJID	5	85.	PERANGKAT DESA	2.442
42	PENDETA	131	86.	KEPALA DESA	219
43	PASTOR	4	87.	BIARAWAN/BIARAWATI	8
44	WARTAWAN	155	88.	WIRASWASTA	70.280
			89.	PEKERJAAN LAINNYA	248
				JUMLAH	2.033.764

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian terbesar adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta, sebesar 35,31 %. Posisi kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebesar 3,45%, sedangkan posisi ketiga petani/pekebun sebesar 2,03%, yang berkulat pada bisnis perdagangan sebesar 0,87%, dan pedagang sebesar 0,66%. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian ini tidak lepas dari struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*).

Tabel 11

Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-



7.	Tanggulangun	19	-
8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	322	31

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Gambar 4

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo



E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berikut ini kami sajikan data mengenai Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah dilingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo.

Tabel 12
Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

NO.	Nama	JML
1.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	2
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	4
3.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	12
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	8
5.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	16
6.	Bagian Perekonomian Dan Sda Sekretariat Daerah	10
7.	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	10
8.	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah	37
9.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	12
10.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	26
11.	Bagian Protokol Dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	29
12.	Sekretariat Dprd	57
13.	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	2
14.	Inspektorat Daerah	70
15.	Badan Kepegawaian Daerah	76
16.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75
19.	Badan Pelayanan Pajak Daerah	70
20.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	61
21.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	292
22.	Dinas Perikanan	43
23.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	52
24.	Dinas Kesehatan	84
25.	Uptd Puskesmas Balongbendo	55
26.	Uptd Puskesmas Barengkrajan	38
27.	Uptd Puskesmas Buduran	51
28.	Uptd Puskesmas Candi	56



29.	Uptd Puskesmas Gedangan	44
30.	Uptd Puskesmas Jabon	65
31.	Uptd Puskesmas Kedungsolo	35
32.	Uptd Puskesmas Kepadangan	40
33.	Uptd Puskesmas Krembung	57
34.	Uptd Puskesmas Krian	73
35.	Uptd Puskesmas Medaeng	42
36.	Uptd Puskesmas Porong	81
37.	Uptd Puskesmas Prambon	67
38.	Uptd Puskesmas Sedati	65
39.	Uptd Puskesmas Sekardangan	36
40.	Uptd Puskesmas Sidoarjo	44
41.	Uptd Puskesmas Sukodono	75
42.	Uptd Puskesmas Taman	89
43.	Uptd Puskesmas Tanggulangin	55
44.	Uptd Puskesmas Tarik	64
45.	Uptd Puskesmas Trosobo	37
46.	Uptd Puskesmas Tulangan	37
47.	Uptd Puskesmas Urang Agung	38
48.	Uptd Puskesmas Waru	55
49.	Uptd Puskesmas Wonoayu	67
50.	Uptd Puskesmas Ganting	33
51.	Uptd Instalasi Farmasi	9
52.	Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah	3
53.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	41
54.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	139
55.	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	58
56.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	63
57.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	60
58.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	158
59.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Balongbendo	188
60.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Buduran	185
61.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Candi	248
62.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Gedangan	225
63.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Jabon	156
64.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Krembung	180
65.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Krian	263
66.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Porong	168
67.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Prambon	189
68.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Sedati	175
69.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Sidoarjo	392



70.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Sukodono	261
71.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Taman	411
72.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Balongbendo	36
73.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Balongbendo	32
74.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Buduran	41
75.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Buduran	39
76.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Candi	34
77.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Candi	43
78.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Candi	34
79.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Gedangan	47
80.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Gedangan	45
81.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Tanggulangin	161
82.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Jabon	40
83.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Jabon	33
84.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Krembung	38
85.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Krembung	35
86.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Krian	46
87.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Krian	40
88.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Krian	36
89.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Porong	43
90.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Porong	39
91.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Tarik	211
92.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Porong	31
93.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Sedati	44
94.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Sedati	43
95.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Sidoarjo	43
96.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Sidoarjo	41
97.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Sidoarjo	33
98.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 4 Sidoarjo	36
99.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 5 Sidoarjo	35
100.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 6 Sidoarjo	40
101.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Tulangan	234
102.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Sukodono	46
103.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Sukodono	43
104.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Taman	51
105.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Taman	46
106.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Taman	46
107.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Tanggulangin	39
108.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Tanggulangin	35
109.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Tarik	35
110.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Tarik	38



111.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Waru	351
112.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Waru	39
113.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Waru	37
114.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 3 Waru	39
115.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 4 Waru	31
116.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Wonoayu	49
117.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 2 Wonoayu	46
118.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri Prambon	41
119.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri 1 Tulangan	48
120.	Uptd Satuan Pendidikan Smp Negeri Satu Atap	0
121.	Upt Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Wonoayu	232
122.	Uptd Anak Berkebutuhan Khusus	5
123.	Dinas Perhubungan	89
124.	Dinas Pangan Dan Pertanian	139
125.	Dinas Tenaga Kerja	36
126.	Rumah Sakit Umum Daerah	690
127.	Satuan Polisi Pamong Praja	104
128.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	37
129.	Dinas Pppa Dan Kb	32
130.	Kecamatan Balongbendo	28
131.	Kecamatan Buduran	25
132.	Kecamatan Candi	28
133.	Kecamatan Gedangan	25
134.	Kecamatan Jabon	20
135.	Kecamatan Krembung	28
136.	Kecamatan Krian	25
137.	Kelurahan Kemasn Kec. Krian	4
138.	Kelurahan Krian Kec. Krian	3
139.	Kelurahan Tambakkemerakan Kec. Krian	3
140.	Kecamatan Porong	27
141.	Kelurahan Gedang Kec. Porong	6
142.	Kelurahan Jatirejo Kec. Porong	0
143.	Kelurahan Juwetkenongo Kec. Porong	4
144.	Kelurahan Mindi Kec. Porong	1
145.	Kelurahan Porong Kec. Porong	5
146.	Kelurahan Siring Kec. Porong	0
147.	Kecamatan Prambon	30
148.	Kecamatan Sedati	30
149.	Kecamatan Sidoarjo	30
150.	Kelurahan Bulusidokare Kec. Sidoarjo	4
151.	Kelurahan Celep Kec. Sidoarjo	6



152.	Kelurahan Cemengkalang Kec. Sidoarjo	7
153.	Kelurahan Gebang Kec. Sidoarjo	5
154.	Kelurahan Lemahputro Kec. Sidoarjo	5
155.	Kelurahan Magersari Kec. Sidoarjo	7
156.	Kelurahan Pekauman Kec. Sidoarjo	7
157.	Kelurahan Pucang Kec. Sidoarjo	6
158.	Kelurahan Pucanganom Kec. Sidoarjo	3
159.	Kelurahan Sekardangan Kec. Sidoarjo	5
160.	Kelurahan Sidokare Kec. Sidoarjo	5
161.	Kelurahan Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo	8
162.	Kelurahan Sidokumpul Kec. Sidoarjo	6
163.	Kelurahan Urangagung Kec. Sidoarjo	4
164.	Kecamatan Sukodono	24
165.	Kecamatan Taman	28
166.	Kelurahan Bebekan Kec. Taman	2
167.	Kelurahan Geluran Kec. Taman	5
168.	Kelurahan Kalijaten Kec. Taman	3
169.	Kelurahan Ketegan Kec. Taman	3
170.	Kelurahan Ngelom Kec. Taman	3
171.	Kelurahan Sepanjang Kec. Taman	5
172.	Kelurahan Taman Kec. Taman	4
173.	Kelurahan Wonocolo Kec. Taman	5
174.	Kecamatan Tanggulangin	29
175.	Kecamatan Tarik	28
176.	Kecamatan Tulangan	34
177.	Kecamatan Waru	29
178.	Kecamatan Wonoayu	28
179.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46
180.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	178
181.	<u>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</u>	37
182.	Dinas Sosial	33



F. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

Berikut ini kami sajikan data mengenai Perencanaan Pendapatan atau target dan realisasi pendapatan APBD kabupaten Sidoarjo tahun 2020.

Tabel 13

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TA 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	4,058,099,090,414.00	4,422,599,226,798.15	(364,500,136,384.15)	108.98%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,531,360,832,030.00	1,809,832,261,491.15	(278,471,429,461.15)	118.18%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1,694,744,640,648.00	1,711,271,242,511.00	(16,526,601,863.00)	100.98%
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	831,993,617,736.00	901,495,722,796.00	(69,502,105,060.00)	108.35%

I.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. permasalahan strategis pemerintah daerah;

- Kualitas dan pemerataan pendidikan masih belum optimal yakni sebesar 96% untuk jenjang SD dan 79% untuk jenjang SMP. Dalam menunjang kenaikan partisipasi pendidikan untuk menciptakan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, masih dinilai kurang. Permasalahan pada urusan pendidikan antara lain kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata, serta hubungan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan yang tidak seimbang.
- Permasalahan dalam bidang kesehatan antara lain adalah menurunnya angka morbiditas, selain itu pelayanan kesehatan dasar belum mampu dijangkau dan diakses oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat di beberapa di kecamatan anak yang masih stunting.
- Permasalahan utama dalam urusan pekerjaan umum yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah pembangunan jalan yang rusak. Bertambahnya jumlah jalan yang baik seharusnya dapat diimbangi dengan berkurangnya jumlah jalan yang rusak. Dengan demikian perlu adanya perencanaan dalam pemetaan kondisi jalan dan segera melakukan tindak lanjut



untuk dapat mendorong pembangunan daerah melalui infrastruktur. Untuk menjawab itu semua maka pemkab Sidoarjo telah melakukan betonasi jalan.

- Permasalahan yang sering dihadapi perkotaan adalah terkait kawasan kumuh. Hal tersebut juga menjadi permasalahan bagi pemkab Sidoarjo dalam menangani masalah permukiman kumuh yang ada pada wilayah padat area terutama pada wilayah industri dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih perlu meningkatkan kinerja urusan perumahan dengan menambah pembangunan akan bahaya kebakaran bagi masyarakat. Masyarakat perlu dilatih untuk secara mandiri menanggulangi kebencanaan seperti puting beliung, banjir, dll.
- Permasalahan sosial di Kabupaten Sidoarjo diantaranya meningkatnya jumlah PMKS di kabupaten Sidoarjo, belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan PMKS, belum tersedianya data yang valid terkait penyandang PMKS *by name by address* lintas perangkat daerah. Dan adanya urbanisasi penduduk yang tinggi dengan tidak dimbangi SDM yang memadai menambah jumlah penyandang PMKS di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini merupakan masalah fundamental di setiap daerah, sehingga perlu mendapat perhatian yang besar.
- Peningkatan tingkat pengangguran memberikan tugas tersendiri bagi pemerintah dalam menyelesaikan urusan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo harus dapat digiring untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Terbatasnya balai sarana pelatihan membuat banyaknya penganggur yang unskill.
- Masih adanya tindak kekerasan pada anak dan perempuan memerlukan tindakan yang tegas dan perlindungan dari pemerintah daerah. Penegakan peraturan dan kebijakan perlindungan anak dan perempuan yang aktif diupayakan untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- Ketersediaan pangan daerah masih lebih banyak dipenuhi dari luar daerah dibanding dengan hasil produksi sendiri.
- Permasalahan terkait lingkungan hidup di antaranya adalah terus



meningkatkan jumlah sampah, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan masih rendahnya kawasan hijau atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo juga merupakan wilayah dengan sektor basis industri dan perdagangan, sehingga berpotensi besar untuk mengalami peningkatan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi sangat strategis untuk diupayakan Pemkab.

- Bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada tuntutan masyarakat akan kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan menuntut pemerintah daerah untuk dapat bersosialisasi serta meningkatkan pelayanan dan inovasi administrasi kependudukan. Respon yang cepat terhadap penduduk pendatang juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- Fasilitas perhubungan merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan perekonomian daerah. Akses jalan dan fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai pada daerah pedesaan akan menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus dari pemerintah kabupaten untuk menambah dan meningkatkan kualitas angkutan pedesaan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga perlu menyediakan infrastruktur yang memadai bagi penyandang cacat (kota inklusif). Hal terpenting dari urusan perhubungan adalah mengurangi titik kemacetan di kota Sidoarjo.
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengintegrasian TIK (Teknologi informasi dan Komunikasi) dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Serta masih adanya kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi antara desa dengan kota.
- Mengembangkan perekonomian melalui UKM, pemerintah daerah harus dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan jiwa wirausaha agar dapat meningkatkan jumlah UMKM. Pengembangan ekonomi kreatif dapat mendorong masyarakat



untuk berinovasi dan meningkatkan gairah UMKM Kabupaten Sidoarjo. Kualitas manajerial koperasi perlu ditingkatkan untuk mendorong kondisi kesehatan koperasi.

- Untuk urusan investasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan reformasi birokrasi dan mendorong iklim investasi, terutama investasi domestik. Dengan mempermudah akses perijinan investasi, akan menarik banyak investor domestik. Selain itu pemetaan atau road map investasi juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi bidang-bidang unggulan yang memerlukan dorongan investasi.
- Urusan kepemudaan dan olahraga pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga harus mendorong prestasi para atlet untuk terus meningkatkan bakat dalam bidang olahraga. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya sarana dan prasarana olahraga berbagai cabor, sehingga bakat dan minat atlet belum bisa tersalurkan secara optimal.
- Urusan kebudayaan terkendala oleh terbatasnya sarana dan prasarana pemerintah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja bidang kebudayaan. Selain itu belum tertatanya kelembagaan yang menangani kebudayaan lokal daerah. Selain itu terbatasnya partisipasi masyarakat pada kegiatan budaya juga menjadi permasalahan tersendiri bagi pembangunan budaya Kabupaten Sidoarjo.
- Produksi perikanan Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Untuk produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2018 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan supaya hasil produksi perikanan meningkat. Namun demikian produktifitas perikanan harus lebih ditingkatkan kualitasnya dari segi bibit maupun pemasarannya.
- Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tetapi jumlah ini masih sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. Perlu adanya peningkatan dan pengembangan industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo.



- Terdapat beberapa komoditi pertanian yang mengalami penurunan seperti tebu, hal ini dikarenakan berkurangnya area tanaman tebu karena fungsi lahan telah berubah menjadi perumahan, lokasi industri, dan perdagangan dan komoditas tanaman, turunnya minat petani untuk menanam tebu karena harga gula tidak menjamin dan dinilai kurang memberikan keuntungan dan bibit yang sudah waktunya harus diganti, namun tidak segera diganti.
- Mendorong kinerja urusan perdagangan promosi produk-produk unggulan perlu dilakukan dalam mendorong ekspor Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, peningkatan kualitas produk-produk khas dan unggulan Kabupaten Sidoarjo juga perlu ditingkatkan untuk mendorong sektor perdagangan.
- Masih banyak ditemukan industri yang belum terstandarisasi. Jumlah industri yang telah terstandarisasi masih jauh sedikit dibandingkan jumlah industri di Kabupaten Sidoarjo.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah;

Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 yaitu ***“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan”***

- Misi I** Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
- Misi II** Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
- Misi III** Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan, dan
- Misi IV** Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul Karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.



Misi V Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

C. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan

Berikut ini kami sajikan data Program pembangunan berdasarkan RPJMD.

Tabel 14

Program pembangunan berdasarkan RPJMD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM
1	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pertanian dan BUMD
	Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.
2	SEKRETARIAT DPRD
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Penganggaran dan Pengawasan
	Program Fasilitasi Persidangan dan Perundang - Undangan
	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH



	Program Pelayanan Kesekretariatan
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
	Program perluasan dan aksesibilitas pendidikan
	Program Pendidikan Sekolah Dasar
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)
5	DINAS KESEHATAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
6	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengelolaan Data ke-PU-an
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pematusan dan Pengendalian Banjir
7	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Penataan Bangunan
	Program Pengawasan Bangunan
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman
	Program Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, dan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Pembinaan Ketertiban Umum



	dan Ketentraman Masyarakat
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
	Program Perlindungan Masyarakat
9	DINAS SOSIAL
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
10	DINAS TENAGA KERJA
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan dan Perlindungan
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Penyelenggaraan Transmigrasi
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan
	Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	Program Pengendalian Kependudukan
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
	Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan
	Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Program Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian



	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi
	Program pelayanan pencatatan sipil
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa
	Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa
16	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
	Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma,Standart Prosedur dan Sistem Informasi di bidang Perhubungan
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
	Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika
	Program pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro



19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan
	Program Pengembangan Perpustakaan dan
22	DINAS PERIKANAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam
	Program Peningkatan produksi perikanan Budidaya
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal
	Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta pendapatan pasar rakyat
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi



	Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah
	Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan
	Program perencanaan pembangunan daerah
	Program Pelayanan Kesekretariatan
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
26	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.
	Program Penetapan Pajak Daerah.
	Program Pengendalian Pajak Daerah
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
	Program Pengembangan ASN
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Program Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan
	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah



31	KECAMATAN SIDOARJO
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
32	KECAMATAN CANDI
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan umum
33	KECAMATAN BUDURAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan umum
34	KECAMATAN GEDANGAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan umum
35	KECAMATAN SEDATI
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
36	KECAMATAN WARU
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
37	KECAMATAN TAMAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan,



	ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
38	KECAMATAN SUKODONO
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
39	KECAMATAN WONOAYU
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
40	KECAMATAN KRIAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
41	KECAMATAN BALONGBENDO
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
42	KECAMATAN TARIK
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
43	KECAMATAN TULANGAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum



44	KECAMATAN PRAMBON
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
45	KECAMATAN KREMBUNG
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
46	KECAMATAN TANGGULANGIN
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
47	KECAMATAN JABON
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
48	KECAMATAN PORONG
	Program Pelayanan Kesekretariatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
	J U M L A H



D. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

Berikut ini kami sajikan data Kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Sidoarjo.

Tabel 15

Kegiatan Pembangunan berdasarkan RPJMD

1. Urusan Perindustrian Dan Perdagangan

Program dan kegiatan
<i>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal</i>
Operasi pasar murah
Pembinaan pedagang informal
Penyusunan Database UKM
Perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
Promosi produk-produk daerah
Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT)
<i>Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat</i>
Pembangunan / Pemeliharaan Konstruksi bangunan pasar
Pendataan dan Peningkatan Pendapatan Pasar
Pengelolaan Pasar Tradisional menuju pasar Modern
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana serta Pengelolaan Persampahan Pasar
Penyediaan Sarana Instalasi Listrik
<i>Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM</i>
Identifikasi permasalahan di Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika
Pembinaan dan Pelatihan Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika
Pendampingan Standarisasi, Desain dan Promosi Produk IKM
Pembinaan dan pelatihan industri agro dan kimia
Belanja Modal
Pengembangan IHT dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi IKM serta pelatihan good manufacturing practices bagi industri hasil tembakau (DBHCHT)
Pemetaan industri hasil tembakau (DBHCHT)

2. a. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kebencanaan)

Program dan Kegiatan
<i>Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik</i>
Penyusunan database dan informasi potensi bencana
Koordinasi Penyusunan kebijakan, pembinaan dan monev pencegahan dini dan kesiapsiagaan



Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bencana
Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan
Kegiatan operasional tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan
Pengadaan logistik penanggulangan bencana
<i>Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</i>
Penyiapan sumberdaya untuk rehabilitasi pasca bencana
Pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana
Penyusunan laporan pasca bencana
Koordinasi pemulihan pasca bencana
Pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana
<i>Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</i>
Pengadaan dan Pembinaan SDM Pemadam Kebakaran
Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pengendalian
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
Sosialisasi dan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

2. b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)

Program dan Kegiatan
<i>Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</i>
Operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Penyelenggaraan dan partisipasi personil pengendalian ketertiban umum dan ketentraman
Pengamanan kegiatan dan aset daerah
<i>Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah</i>
Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
Fasilitasi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-
<i>Program Perlindungan Masyarakat</i>
Pengerahan dan pengendalian satuan linmas
Pembinaan operasional dan satuan linmas
Pembinaan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan

3. Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan
<i>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Pembinaan dan sertifikasi tenaga pendidik
Penyelenggaraan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD
Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD
Penyelenggaraan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP
Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP
<i>Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan</i>
Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan
Penyelenggaraan Pencitraan dan Publikasi
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Operasional dana hibah partisipatif (block grant)
<i>Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan</i>
Penyediaan Dana BOSDA SD dan SMP Negeri



Pengelolaan operasional UPTD pelayanan anak tunarungu, tuna wicara dan autisme Kabupaten Sidoarjo
Pelatihan manajemen dan peningkatan kompetensi bagi siswa dan guru
Sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan BOS, BKSM dan BPP
<i>Program Pendidikan Sekolah Dasar</i>
Penyelenggaraan Evaluasi Sekolah Pendidikan Tingkat SD/MI
Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (DAK)
Pembinaan dan penyelenggaraan teknis SD
Pendampingan penyelenggaraan sarana prasarana sekolah
Pengembangan sarana dan prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Non DAK)
Penyelenggaraan akreditasi pendidikan Sekolah Dasar
Penyelenggaraan pelayanan perijinan bidang pendidikan Sekolah Dasar
Fasilitasi Implementasi Kurikulum SD
<i>Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i>
Pembinaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Pembinaan penyelenggaraan PAUD
Penyelenggaraan perizinan lembaga PAUD
Penyelenggaraan dan Operasional UPT SKB
Penyelenggaraan perijinan lembaga pendidikan masyarakat
Pembinaan penyelenggaraan TK
Pengembangan sarana prasarana Pendidikan TK
Penyelenggaraan perizinan lembaga TK
<i>Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>
Fasilitasi implementasi kurikulum SMP
Penyelenggaraan evaluasi sekolah pendidikan tingkat SMP/MTs
Pembinaan dan penyelenggaraan teknis SMP
Pendampingan penyelenggaraan sarana prasarana sekolah
Pengembangan sarana dan prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Non DAK)
Penyelenggaraan akreditasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Penyelenggaraan pelayanan perijinan bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (DAK)
<i>Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)</i>
Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)
<i>Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan</i>
Fasilitasi penyelenggaraan kesenian sekolah
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

4. Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan
<i>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</i>
Perbaikan gizi masyarakat
Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tarik
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Prambon
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Krembung



Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Porong
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kedungsolo
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Jabon
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tanggulangin
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Candi
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tulangan
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kepadangan
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Wonoayu
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sukodono
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sidoarjo
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Urangagung
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sekardangan
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Buduran
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sedati
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Waru
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Medaeng
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gedangan
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Ganting
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Taman
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Trosobo
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Krian
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Barengkrajan
Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Balongbendo
Pembinaan Kesehatan kerja dan olah raga
Pengembangan media promosi sadar hidup sehat
Peningkatan kesehatan keluarga
Peningkatan Perilaku hidup sehat
Penyelenggaraan penyehatan masyarakat pekerja dan olahraga
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan masyarakat
Pemberian tambahan nutrisi
Fasilitasi dan monev persalinan (DAK)
Upaya kesehatan masyarakat BOK Kabupaten (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Tarik (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Prambon (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Krembung (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Porong (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Kedungsolo (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Jabon (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Tanggulangin (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Candi (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Tulangan (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Kepadangan (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Wonoayu (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Sukodono (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Sidoarjo (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Urangagung (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Sekardangan (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Buduran (DAK)



Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Sedati(DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Waru(DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Medaeng (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Gedangan (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Ganting(DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Taman(DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Trosobo(DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Krian(DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Barengkrajan (DAK)
Pelayanan upaya kesehatan BOK Puskesmas Balongbendo (DAK)
Dukungan manajemen BOK Kabupaten dan JAMPERSAL (DAK)
Pelayanan kesehatan stunting (DAK)
Pelayanan kesehatan baik promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT)
<i>Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat</i>
Pembinaan pelayanan kesehatan primer
Fasilitasi pelayanan kesehatan Puskesmas
Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan
Fasilitasi & monev penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat
Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional
Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dan atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (DBHCHT)
Akreditasi FKTP (DAK)
<i>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</i>
Pembinaan dan pelayanan pencegahan, pengendalian penyakit menular
Pembinaan surveillance dan imunisasi
Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza
Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan indra
Operasional KPAD
Belanja Modal
Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit (Penugasan DAK)
Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit BOK Kabupaten (DAK)
<i>Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan</i>
Monitoring Legalitas sarana kefarmasian & makmin
Monitoring Legalitas tenaga kesehatan
Pembinaan dan pengembangan SDM tenaga kesehatan
Pembinaan, Pengawasan & Legalitas alat kesehatan & PKRT di sarana produksi distribusi & fasilitas kesehatan
Penyediaan & pengelolaan alkes di Puskesmas
Penyediaan biaya operasional UPT Instalasi Farmasi
Penyediaan obat & BMHP (Baham Medis Habis Pakai)
Kegiatan penyediaan obat dan BMHP (DAK)
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (DBHCHT)
Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar
Kalibrasi alkes Puskesmas (DAK)
Pengawasan obat dan makanan (DAK)
Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar (DAK)
Distribusi obat dan E-logistik (DAK)
Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif



Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan PPK BLUD
<i>Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah</i>
Pelayanan didukung pemenuhan sarana prasarana, SDM, SIM dan Tata Kelola

5. Urusan Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Program dan Kegiatan
<i>Program Penyusunan Perencanaan teknis dan Pengolaan Data ke-PU-an</i>
Penyusunan perencanaan teknis kebinamargaan
Penyusunan perencanaan teknis irigasi
Penyusunan perencanaan teknis pematasan dan pengendalian banjir
<i>Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan</i>
Pembangunan jalan
Pembangunan bagian-bagian jalan
Pembebasan jalan
Peningkatan jalan
Pembangunan jembatan
Peningkatan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan bagian-bagian jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Pengendalian dan pemanfaatan jalan dan jembatan
<i>Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematasan dan</i>
<i>Pembangunan dan pemeliharaan irigasi</i>
<i>Pembangunan dan pemeliharaan pematasan</i>
<i>Pengadaan, operasional dan pemeliharaan sarpras pengendalian banjir</i>
<i>Operasional jaringan irigasi</i>
<i>Pemberdayaan petani pemakai air</i>
<i>Penyelenggaraan penyuluh bidang pengairan</i>
<i>Pengelolaan dan penataan aset pengairan</i>
<i>Pengelolaan database aset pengairan</i>

6. Urusan Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Program dan Kegiatan
<i>Program pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman</i>
Monev penyediaan prasarana permukiman
Monev Penyediaan Prasarana Sanitasi dan Air Bersih
Pembangunan sarana dan prasarana Permukiman (termasuk DAK, RSH, Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh dan Permukiman Nelayan)
Pemeliharaan prasarana permukiman
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi
Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Operasional dan pemeliharaan pengelolaan air limbah domestik
Monev penyediaan prasarana perumahan



Operasional Pelayanan permakaman
Operasional pengelolaan rusunawa
Pembangunan/Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan
Pembinaan tata lingkungan perumahan
Perencanaan Teknis Prasarana perumahan
Penyuluh dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata (DBHCHT)
<i>Program penataan ruang, pengadaan tanah, dan fasilitasi permasalahan pertanahan</i>
Fasilitasi Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Perangkat Daerah
Pencegahan permasalahan Pertanahan
Penyusunan dokumen database penanganan pertanahan
fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan
Penyusunan rencana tata ruang teknis kota
Pemanfaatan ruang teknis kota
Pengendalian pemanfaatan ruang
<i>Program penataan bangunan</i>
Penyusunan Petunjuk teknis dan perencanaan teknidata bangunan
Pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor lintas SKPD
Pengawasan/pengendalian teknis
Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT)
<i>Program Pengawasan Bangunan</i>
Pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi
Pendataan dan evaluasi bangunan
Operasional pengawasan bangunan

7. Urusan Sosial

Program dan Kegiatan
<i>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</i>
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Fasilitasi dan Monev Bantuan Pangan APBN
Pembinaan Yayasan Panti Asuhan
Pengadaan Rastra APBD
Peningkatan kualitas kelembagaan sosial dan PSKS lainnya
<i>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</i>
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi tuna sosial
Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak dan Lansia
Peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
<i>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>
Fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial
Perlindungan sosial korban bencana alam
Perlindungan sosial korban bencana sosial

8. Urusan Tenaga Kerja

Program dan Kegiatan
<i>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>



Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan
Monev TKI pendamping TKWNP
Pembinaan, monitoring dan evaluasi lembaga pelatihan tenaga kerja
<i>Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi</i>
Penyelenggaraan Bursa Kerja
Penyiapan tenaga kerja mandiri terdidik
Sosialisasi regulasi perlindungan TKI
Penyelenggaraan Transmigrasi
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
<i>Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan</i>
Pembinaan dan monitoring fasilitas kesejahteraan pekerja
Pembinaan Kelembagaan, dan sarana hubungan industrial
Pembinaan persyaratan kerja
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Program dan Kegiatan
<i>Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</i>
Pembinaan dan pelayanan KB (DAK)
Pembinaan kesehatan reproduksi remaja
Advokasi dan KIE
Peningkatan kualitas Ketahanan Keluarga
Pembinaan keluarga berencana
<i>Program pengendalian kependudukan</i>
Pengelolaan data kependudukan
Penyusunan analisa kebijakan pengendalian kependudukan
<i>Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi pemenuhan hak anak
Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi perlindungan perempuan dan perlindungan
Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi PUG
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (dana cukai)
fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak

10. Urusan Pangan Dan Pertanian

Program dan Kegiatan
<i>Peningkatan Ketahanan pangan daerah</i>
Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan daerah
Peningkatan distribusi pangan daerah
Kewaspadaan dan penanganan rawan pangan
Peningkatan keamanan pangan
Pemberdayaan pekarangan pangan
Pengembangan konsumsi pangan
<i>Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</i>
Pengembangan teknologi budidaya/bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura
Penyusunan areal tanam dan penanganan pasca panen



Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
Peningkatan produksi perkebunan
<i>Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan</i>
Pengembangan sarana dan prasarana pertanian
Pemberdayaan petani pemakai air (HIPPA)
Sarana dan prasarana produksi dan usaha tani
Pelatihan usaha agribisnis pertanian dan perkebunan
Peningkatan kapasitas penyuluh dan petani
Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
<i>Program Peningkatan Produksi Peternakan dan HasilHewan</i>
Pengembangan budidaya dan produksi peternakan
Pengembangan agribisnis peternakan
Kontes ternak
Fasilitasi perijinan usaha pengembangan peternakan
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenagakerja dan masyarakat (DBHCHT)
Bantuan sarana produksi, bibit/benih ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat
Bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat
<i>Program Peningkatan Kualitas Produksi peternakan</i>
Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan/ternak
Pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran obat hewan
Pengawasan dan pengendalian bahan asal hewan
Pengawasan penerapan sanitasi lingkungan dan kesejahteraan hewan
Operasional dan pelayanan laboratorium KesehatanHewan dan Kesehatan Masyarakat
Revitalisasi Pelayanan dan operasional RPH Krian dan RPH Prambon
Pelayanan dan operasional RPU dan pasar hewan

11. Urusan Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

Program dan Kegiatan
<i>Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan</i>
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan sampah
Penyelenggaraan kebersihan permukiman, jalan, saluran dan selokan
Pengelolaan operasional UPTD
Operasional dan Pemeliharaan TPA
Penyediaan sarpras pengolahan/angkutan sampah
<i>Program Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</i>
Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura
Penanganan kasus dan penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup
Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara pengaduan terkait pengelolaan
<u>Penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup</u>
Pengawasan dan implementasi dokumen dan pnaatan lingkungan
Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Berseri dan Sekolah Adiwiyata
Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan
Peningkatan pelayanan laboratorium dan uji lab
<i>Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran</i>
Koordinasi pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak
Pelaksanaan teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan
Pelaksanaan teknis pengelolaan B3 dan Limbah B3
Penyusunan Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak
<u>Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan</u>
<i>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan</i>



Pemeliharaan RTH
Pembangunan/revitalisasi RTH
Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pertamanan
Penyediaan dan pemeliharaan sarparsa keindahan kota
Pembangunan penerangan jalan umum
Pemeliharaan penerangan jalan umum
Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri

12. Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program dan Kegiatan
<i>Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</i>
Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta Operasi Yustisi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
<i>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>
Pelayanan Administrasi Pindah Datang dan Pindah Keluar Penduduk
Pelayanan Identitas Penduduk
Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan
<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Pengembangan sistem administrasi kependudukan
<i>Program pelayanan pencatatan sipil</i>
Pelayanan administrasi akte kelahiran
Pelayanan administrasi perkawinan dan perceraian
Pelayanan perubahan status anak, kewarganegaraan dan pencatatan kematian

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>
Penyediaan barang/jasa perkantoran
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
Penyusunan laporan keuangan
<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>
Peningkatan peran TP-PKK
Peningkatan Keberdayaan Kelembagaan Masyarakat
Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa
<i>Program peningkatan keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>
Peningkatan keberdayaan lembaga usaha ekonomi masyarakat
Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Usaha Ekonomi Masyarakat
Pemanfaatan sumber daya pedesaan
Peningkatan kapasitas pendamping masyarakat



<i>Program Pembinaan Pemerintahan Desa</i>
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan Kelembagaan Desa dan Fasilitasi Musdes
Pembinaan administrasi pemerintahan desa
<i>Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa</i>
Pembinaan Penyelenggaraan Keuangan Desa
Pembinaan Penyelenggaraan Kekayaan dan Aset Desa

14. Urusan Perhubungan

<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>
Penyediaan barang/jasa perkantoran
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
Penyusunan laporan keuangan
<i>Program peningkatan pelayanan angkutan</i>
Peningkatan pelayanan angkutan jalan
Peningkatan pelayanan dan pembinaan usaha angkutan sungai, kereta api dan udara
<i>Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan</i>
Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan
Pengoperasian/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
<i>Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem Informasi Dibidang Perhubungan</i>
Penyusunan dokumen teknis perencanaan dan sosialisasi manajemen lalu lintas
Pengoperasian area traffic control system
Penyusunan dokumen teknis perencanaan dan sosialisasi rekayasa lalu lintas
<i>Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</i>
Penyelenggaraan operasi lalu lintas
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Pengelolaan terminal tipe C
Pengelolaan parkir berlangganan
Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan

15. Kepemudaan dan Olah raga

<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>
Penyediaan barang/jasa perkantoran
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
Penyusunan laporan keuangan
<i>Program peningkatan peran serta kepemudaan</i>



Pembinaan organisasi kepemudaan
Fasilitasi kegiatan kepemudaan
Peningkatan kapasitas wawasan kepemudaan
<i>Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan</i>
Pengelolaan fasilitas keolahragaan
<i>Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan</i>
Pembinaan dan fasilitasi lembaga dan pelaku olahraga prestasi
Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga lainnya yang berkembang di masyarakat
Pembinaan dan penyelenggaraan/mengikuti kompetisi olahraga prestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olahraga

16. Urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil

<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>
Penyediaan barang/jasa perkantoran
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
Penyusunan laporan keuangan
<i>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</i>
Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi
Penyuluhan dan fasilitasi advokasi koperasi
Peningkatan kualitas koperasi, usaha kecil dan menengah (DAK)
<i>Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro</i>
Pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro
Pembinaan, Pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi
Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usahamikro
<i>Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro</i>
Penyusunan database koperasi dan usaha mikro
Pembinaan dan pengendalian usaha mikro
Pembinaan dan pengendalian koperasi

17. Urusan Pariwisata

<i>Program Pengembangan Objek, Promosi, dan Usaha Pariwisata</i>
Penyelenggaraan festival dan promosi wisata daerah
Pengembangan objek wisata daerah
Pembinaan usaha pariwisata
Pembinaan pelaku usaha pariwisata (DAK)



18. Penanaman Modal

<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>
Penyediaan barang/jasa perkantoran
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
<i>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</i>
Pengembangan Penanaman modal
Promosi penanaman modal
<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</i>
Pengelolaan data dan monev penanaman modal
Kegiatan koordinasi antar lembaga / OPD dalam penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal
<i>Program Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan</i>
Kegiatan koordinas dan pelaksanaan pelayanan perijinan tertentu 1
Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan perijinan usaha

19. Urusan Komunikasi dan Informatika

<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>
Penyediaan barang/jasa perkantoran
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
Penyusunan laporan keuangan
<i>Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</i>
Monitoring dan evaluasi
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK
Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
Peningkatan sarpras dan infrastruktur TIK dan Data Center
Perencanaan dan Implementasi Persandian dan Keamanan TIK
Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur TIK
<i>Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika</i>
Monitoring dan evaluasi kebijakan E-Gov
Pengelolaan Fasilitasi Aplikasi Teknologi Informatika
Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Pendaftaran Layanan Elektronik
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Perumusan kebijakan tata kelola e-gov
Pengembangan dan pengelolaan website
<i>Program pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat</i>
Layanan Informasi Publik



Pengelolaan Informasi dan Opini Publik
Penyediaan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik

20. Urusan Statistik

<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>
<i>Program pengembangan data informasi statistik daerah</i>
<i>Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah</i>
<i>Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah</i>
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
<i>Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</i>
Pembinaan dan pelayanan KB (DAK)
Pembinaan kesehatan reproduksi remaja
Advokasi dan KIE
Peningkatan kualitas Ketahanan Keluarga
Pembinaan keluarga berencana
<i>Program pengendalian kependudukan</i>
Pengelolaan data kependudukan
Penyusunan analisa kebijakan pengendalian kependudukan
<i>Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi pemenuhan hak anak
Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak
Advokasi, Koordinasi, Pembinaan dan evaluasi PUG
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (dana cukai)
fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2)

21. Urusan Kearsipan

<i>Program Pengelolaan, Pelayanan dan Dokumentasi Kearsipan</i>
Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah
Pengembangan sistem informasi kearsipan daerah
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan
Pelayanan dan penerbitan naskah arsip
Penyediaan sarana pelayanan arsip dan dokumentasi
Penyelenggaraan tata kearsipan

22. Urusan Kebudayaan

<i>Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan</i>
Fasilitasi penyelenggaraan kesenian sekolah
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
PERPUSTAKAAN



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>
Penyediaan barang/jasa perkantoran
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
Penyusunan laporan keuangan
<i>Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan</i>
Penyediaan dan pengolahan koleksi bahan pustaka
Pengembangan koleksi bahan pustaka berkonten lokal
Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan
Pelestarian Bahan Perpustakaan
<i>Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca</i>
Pembinaan, stimulasi, supervisi dan pendataan perpustakaan
Pengembangan dan Pemasarakatan/ Sosialisasi perpustakaan
Pengembangan Tenaga Pustaka
Pemasarakatan Pembudayaan Gemar Membaca

23. Urusan Perikanan dan Kelautan

<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>
Penyediaan barang/jasa perkantoran
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
Penyusunan laporan keuangan
<i>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</i>
Pembinaan dan percontohan budidaya ikan
Pengadaan sarana dan prasarana budidaya dan pemasaran perikanan
Peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
Fasilitasi balai benih ikan (BBI) dan tambak dinas
<i>Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam</i>
Pemberdayaan kelompok nelayan, petambak garam dan masyarakat pengawas
Pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perairan
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
<i>Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan</i>
Kegiatan pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan
Kegiatan pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan
Pengelolaan Depo Ikan



24.a. Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Keuangan (APIP)

Program dan Kegiatan
<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</i>
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

24. b. Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Keuangan serta manajemen Keuangan (BPKAD)

Program dan Kegiatan
<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>
Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Monitoring evaluasi dan pembinaan akuntansi dan penatausahaan
<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</i>
Perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pengamanan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah
<i>Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>
Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup APBD
Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup Perubahan APBD
Evaluasi dan pembinaan pelaksanaan APBD

25. Urusan Fungsi Penunjang Pelayanan Pajak

<i>Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.</i>
pendataan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Pengembangan dan Intensifikasi Pajak Daerah
Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah
<i>Program Penetapan Pajak Daerah.</i>
Pemeriksaan pajak daerah.
Penyelesaian piutang pajak daerah
Verifikasi penetapan Pajak Daerah
<i>Program Pengendalian Pajak Daerah</i>
Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah
Pelaksanaan penagihan pajak daerah
Penindakan Obyek Pajak dan Wajib Pajak.

26. Urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian

<i>Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>
Penyelenggaraan administrasi mutasi Jabatan ASN
Penyelenggaraan administrasi mutasi kepangkatan dan pensiun ASN
<i>Program Pengembangan ASN</i>
Pengembangan karir dan kinerja ASN
Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan informasi ASN
Fasilitasi penilaian kompetensi ASN



<i>Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN</i>
Penyelenggaraan Kesejahteraan ASN.
Penyelenggaraan Pembinaan ASN.
<i>Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur</i>
Penyelenggaraan Analisa dan Evaluasi Diklat ASN
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ASN

27. Urusan Fungsi Penunjang Pengadaan

<i>Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>
Fasilitasi dan pengelolaan LPSE
Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ
Pelaksanaan advokasi bidang pengadaan barang dan jasa
Pembinaan pengadaan barang dan jasa

28. Kecamatan

Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Masyarakat
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pembangunan dan Lingkungan
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan IMB Usaha Mikro dan IMB Rumah Tinggal
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perbup, Pengawasan dan Penertiban Usaha, Penanganan Konflik Sosial
Pembinaan Lembaga, Kegiatan Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah Domestik
Pembinaan Perangkat Desa
Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima
Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Masyarakat
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum
Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan SIUP, TDP Usaha Mikro

I.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

I.3.1. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM (Latar Belakang)

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah



diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

I.3.2. Dasar Penerapan SPM

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota .
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota

I.3.3. Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja

sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 merupakan benang merah dari Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/ terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arahannya ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah kabupaten dengan seluruh PD, dan pemerintahan desa.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik

melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masayarakat).

- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

1.3.4. Kebijakan Penerapan SPM

Kebijakan umum penerapan standar pelayanan Minimal meliputi penerapan anggaran, program dan kegiatan. Berikut ini kami sajikan data penerapannya.

A. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

A.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 16

Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

A.2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 17

Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Pagu Anggaran
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PAGU
1	Pengadaan perlengkapan PAUD	62.692.500
2	Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	39.767.400.000
3	Penyediaan biaya personil peserta didik PAUD	39.767.400.000
4	Pengadaan alat peraga praktik dan peraga siswa PAUD	39.767.400.000
5	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	39.767.400.000
6	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	27.557.592.462
7	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	27.557.592.462
8	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	221.616.644
9	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	3.550
10	Pembangunan Gedung/tuangkelas/ ruang guru PAUD	385.000.000
Pengelolaan Pendidikan Dasar		PAGU



1	Pengadaan perlengkapan sekolah	130.000.000
2	Pengadaan perlengkapan siswa	130.000.000
3	Pengadaan alat peraga praktik dan	130.000.000
4	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	1.300.000.000
5	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	90.958.983
6	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	125.350.274.290
7	Penghitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan dasar	5.715.967.860
8	Pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan dasar	1.050.778.561
9	Pembangunan unit sekolah baru (USB)	28.092.350.608
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru	28.092.350.608
11	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	44.842.125.680
12	Pengelolaan manajemen data	5.715.967.860
13	Penyediaan beasiswa untuk anak miskin	700.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PAGU
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	130.000.000
2	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	130.000.000
3	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	130.000.000
4	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.300.000.000
5	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	90.958.983
6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	125.350.274.290
7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.715.967.860
8	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.050.778.561
9	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	28.092.350.608
10	Penghitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan menengah	28.092.350.608
11	Pembangunan unit sekolah baru (USB)	44.842.125.680
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.715.967.860
13	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	44.842.125.680
14	Pengelolaan manajemen data	1.045.379.527
15	Penyediaan beasiswa untuk anak	700.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah pertama		PAGU



1	Penyediaan Biaya Personil peserta didik non formal/ kesetaraan	130.000.000
2	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga siswa peserta didik non formal/ kesetaraan	130.000.000
3	Penyelenggaraan Proses Belajar siswa peserta didik non formal/ kesetaraan	130.000.000
4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	1.300.000.000
5	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	90.958.983
6	Pembinaan kelembagaan dan manajemen pada satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	125.350.274.290
7	Penghitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	5.715.967.860
8	Pembangunan Gedung/ruang kelas/ruang guru non formal/kesetaraan	1.050.778.561
9	Rehabilitasi sedang/berat Gedung/ruang kelas/ruang guru non formal/kesetaraan	28.092.350.608
10	Pemeliharaan rutin Gedung/ruang kelas/ruang guru non formal/kesetaraan	28.092.350.608
11	Pengadaan perlengkapan Pendidikan non formal/kesetaraan	44.842.125.680
12	Pengelolaan manajemen data	5.715.967.860
13	Penyediaan beasiswa untuk anak	700.000.000

A.3. Program Kegiatan SPM Bidang Pendidikan

Adapun program kegiatan tahun 2020 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 18

Program Kegiatan Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan

No.	Pelayanan Dasar	Program Kegiatan
1	Pendidikan Dasar	1. Peningkatan Evaluasi Sekolah SD/MI/SMP/MTs



		<ol style="list-style-type: none">2. Pengembangan sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (DAK).SD/SMP3. Pembinaan dan Penyelenggaraan teknis SD/SMP4. Pendampingan dan Penyelenggaraan sarana prasarana sekolah.SD/SMP/MI/MTs5. Pengembangan sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Non DAK)6. Penyelenggaraan akreditasi pendidikan sekolah dasar.7. Fasilitas Implementasi kurikulum SD/SMP8. Penyelenggaraan Pelayanan perijinan bidang pendidikan SD/SMP9. Pemberian Dana BPP (Biaya Personal Pendidikan) SD/MI/SMP/MTs
2	Pendidikan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan Masyarakat.2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.3. Penyelenggaraan dan Operasional UPT SKB.4. Penyelenggaraan perijinan lembaga pendidikan masyarakat.5. Pemberian Biaya Operasional Pendamping (BOP) Kesetaraan
3	Pendidikan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan Penyelenggaraan



	Usia Dini	PAUD/TK 2. Penyelenggaraan perizinan lembaga PAUD/TK. 3. Pengembangan sarana dan Prasarana 4. Pemberian Biaya Operasional Pendamping (BOP) PAUD
--	-----------	--

B. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan.

B.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Kesehatan dapat dilihat ditabel dibawah ini.

Tabel 19

Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi



B.2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 20

Alokasi Anggaran Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Alokasi Dana
1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.943.568.748
2	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.943.568.748
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.943.568.748
4	Pelayanan Kesehatan Balita	4.943.568.748
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.943.568.748
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	89.148.788
7	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.943.568.748
8	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	89.148.788
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	89.148.788
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	15.200.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	2.689.961.063
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	2.689.961.063

B.3. Program dan Kegiatan

Berikut ini kami sajikan program dan kegiatan pelayanan dasar bidang urusan Kesehatan dalam tabel dibawah ini.



Tabel 21
Program Dan Kegiatan Pelayanan Dasar
Bidang Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Program
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Pencegahan & Pengendalian Penyakit

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.

C.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 22

Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

C.2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.



Tabel 23

Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Alokasi Dana
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Rp. 2.381.220.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Rp.990.783.700

C.3. Program dan Kegiatan

Berikut ini kami sajikan data mengenai Program dan Kegiatan dalam Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dalam sebuah tabel dibawah ini.

Tabel 24

Program dan Kegiatan dalam Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Program Kegiatan	Ket
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Program Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Sanitasi Air Bersih	P2CKTR
		Pemasangan Tambahan Sambungan Baru sebanyak 4.289 SR	Program PDAM
		Pembangunan distributor center air Umbulan II di DC Jabon, DC Candi dan DC Sidoarjo	
		Pemasangan Jaringan distribusi Umbulan II	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Program Pengembangan	



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Program Kegiatan	Ket
	limbah Domestik	Infrastruktur dan Lingkungan Perumahan	

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

D.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 25

Pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

D.2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.



Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat Antara lain :

Tabel 26

Alokasi Anggaran Pelayanan dasar
Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Alokasi Dana	Keterangan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Rp.0	Tidak ada rumah bencana yang sampai merusak rumah
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Rp.0	Tidak ada rumah bencana yang sampai merusak rumah

D.3. Program dan Kegiatan

Berikut ini kami sajikan data berupa program dan kegiatan dalam pelayanan dasar Bidang urusan Perumahan Rakyat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 27

Program dan kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Program
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
		Penyiapan sumberdaya untuk rehabilitasi pasca bencana
		Pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana
		Penyusunan laporan pasca bencana



		Koordinasi pemulihan pasca bencana
		Pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Monev penyediaan prasarana permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana permukiman (termasuk DAK, RSH, pencegahan dan penanganan kawasan kumuh dan kampung nelayan)
		Pemeliharaan prasarana permukiman
		Rehab rumah tidak layak huni
		Monev penyediaan prasarana perumahan
		Operasional pelayanan pemakaman
		Operasional pengelolaan rusunawa
		Pembangunan/peningkatan sarana, prasarana dan utilitas perumahan
		Pembinaan tata lingkungan perumahan
		Perencanaan teknis prasarana perumahan
		Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota .



E.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

Tabel 28

Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

E.2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara lain :



Tabel 29

Alokasi Anggaran Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Pelayanan Dasar	Alokasi Dana
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	15.055.689.730
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	2.319.740.100,00
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

E.3. Program dan Kegiatan

Berikut ini kami sajikan data mengenai program dan kegiatan pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam sebuah tabel dibawah ini.

Tabel 30

Program dan Kegiatan Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Pelayanan Dasar	Program
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Program pembinaan operasional, pengembangan dan pengendalian perlindungan masyarakat
		Program pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
2	Pelayanan Penyelamatan dan	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat



No	Pelayanan Dasar	Program
	evakuasi korban kebakaran	dan Manajemen Logistik Kebencanaan
		Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
		Program Peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

F. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota

F.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Sosial Antara Lain :

Tabel 31

Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana



F.2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Sosial Antara lain :

Tabel 32

Alokasi Anggaran Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Alokasi Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	68.026.800
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	74.528.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	1.923.293.200
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	153.226.240
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	4.713.482.500

F.3. Program dan Kegiatan

Berikut ini kami sajikan data mengenai program dan kegiatan pelayanan dasar bidang urusan sosial dalam sebuah tabel dibawah ini.

Tabel 33

Program dan Kegiatan Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Program
1	Rehabilitasi social dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Program
2	Rehabilitasi social dasar anak telantar diluar Panti	
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	Penyediaan sarana dan prasarana social	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyangang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

II.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut

NO	IKK	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,05	80,29	0,3
2	Angka Kemiskinan	5,32	5,59	5,08
3	Angka Pengangguran	4,72	10,97	132,42
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,99	-3,69	-161,60
5	Pendapatan Per kapita	90,70	86,42	-4,71
6	Ketimpangan Pendapatan	0,31	0,36	16,13%



II.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

II.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

1. Urusan Pendidikan

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri & Swasta)	1.606	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
2		Jumlah peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri & Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemda	59.005	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
3		Jumlah peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri & Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	15	Data Dari Lembaga	
4		Jumlah kebutuhan minimal Pendidik PAUD (Negeri & Swasta)	5.037	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan	



				Data Dapodik	
5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri & Swasta)	5.012	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
6		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru PAUD	1.814	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana (S1) sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD non formal dari lembaga pemerintah	1. Kepala PAUD = 1.606 2. Bersertifikasi = 438	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD 465, SMP 46 Total 511	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	



	pendidikan dasar	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	152.526	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
9		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	76.467	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
10		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	118.245	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
11		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	40.253	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
12		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	7.526	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
13		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.048	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	Jumlah SMPN= 236
14		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	7.608	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	



15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.048	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
16	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	SDN : 466, SDS : 351	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data dari Bidang PTK	
17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	TU SMPN=2 30, Penjaga SDN=92 , Tenaga Kebersihan = 92, TU SMPS=4 05, Penjaga SMPS=1 35 Total 954	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data dari Bidang PTK	
18	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	823	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	907	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.793	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data dari Bidang PTK	



20	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.233	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data dari Bidang PTK	
21	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	SDN=46 6, SDS=11 7 Total 583	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
22	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	SMPN= 46, SMPS=1 35	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
23	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	700	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
24	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	SMPN (132+88 +44) dan SMPS=4 35 Total 699	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	



25	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SDN= 464 SMPN= 44 Total 508	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
26		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	152.526	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
27		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	76.487	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
28		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	SDN= 118.245	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
29		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	SMPN= 40.253	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
30		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.526	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
31		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4.025	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
32		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.608	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan	



				Data Dapodik	
33		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4.048	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
34		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	SDN=466, SDS=351 Total 817	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
35		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	TU SMPN=230, Penjaga SDN=92, Tenaga Kebersihan = 92, TU SMPS=405, Penjaga SMPS=135 Total 945	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
36		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	823	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
37		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	907	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
38		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan	DIV/S1 = 7451, Bersertifikasi= 3793 Total 11244	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data dari Bidang PTK	



		sertifikat pendidik			
39		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	DIV/S1 = 3831, Bersertifikasi= 2233 Total 6064	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data dari Bidang PTK	
40		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	SDN=466, SDS=117 Total 583	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
41		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	SMPN=46, SMPS=135 Total 181	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
42		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	700	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	



43		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	SMPN (132+88+44)dan SMPS=4 35 Total 699	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
44	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	36	website datadik.kemendikbud.go.od	
45		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.519	website datadik.kemendikbud.go.od	
46		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	65	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati BerdasarkanU PT SKB	
47		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	..		
48		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	94	website datadik.kemendikbud.go.od	
49		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	94	website datadik.kemendikbud.go.od	



50		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	583		
51		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	36	website datadik.kemendikbud.go.id	

2. Urusan Kesehatan

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Kesehatan				
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	24	Data jumlah sarana kesehatan menurut kepemilikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	28	Data jumlah sarana kesehatan menurut kepemilikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Vaksin Tetanus Difteri = 39.067,	DPA	
4		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	632 bidan, 26 Pengelo	Data pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas	



			la progra m KIA	kabupaten sidoarjo tahun 2020	
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
6		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	632 bidan, 26 Pengelo la progra m KIA	Data pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data Cakupan kunjungan neonatal menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
8		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	632 bidan, 26 Pengelo la progra m KIA	Data Cakupan kunjungan neonatal menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
9	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data Cakupan pelayanan kesehatan Balita kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
10		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai	632 bidan, 26 Pengelo la	Data Cakupan pelayanan kesehatan Balita kecamatan dan puskesmas	



		standar	progra m KIA	kabupaten sidoarjo tahun 2020	
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data Cakupan pelayanan kesehatan peserta didik, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, serta usia pendidikan dasar menurut kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
12		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	318 Dokter umum, 92 Dokter Gigi, 2013 perawat, 26 Pengelola program ARU	Data Cakupan pelayanan kesehatan peserta didik, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, serta usia pendidikan dasar menurut kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
13	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data Cakupan pelayanan kesehatan Usia Produktif kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
14		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	318 Dokter umum, 92 Dokter Gigi, 2013 perawat	Data Cakupan pelayanan kesehatan Usia Produktif kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	



			, 26 Pengelo la progra m PTM		
15	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data Cakupan pelayanan kesehatan Usia lanjut usia menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
16		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	318 Dokter umum, 92 Dokter Gigi, 2013 perawat , 26 Pengelo la progra m Usila	Data Cakupan pelayanan kesehatan Usia lanjut usia menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
17	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
18		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	318 Dokter umum, 92 Dokter Gigi, 2013 perawat	Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten	



			, 26 Pengelo la progra m PTM	sidoarjo tahun 2020	
19	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Militus menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
20		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	318 Dokter umum, 92 Dokter Gigi, 2013 perawat , 26 Pengelo la progra m PTM	Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Militus menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
21	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
22		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2013 Perawat , 26 Pengelo la Progra m	Data Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun	



			ODGJ	2020	
23	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita TBC menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
24		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	318 Dokter umum, 92 Dokter Gigi, 2013 perawat, 26 Pengelola program TB	Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita TBC menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
25	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Ada	Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita HIV menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	
26		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	318 Dokter umum, 92 Dokter Gigi, 2013 perawat, 26	Data Cakupan pelayanan kesehatan Penderita HIV menurut jenis kelamin kecamatan dan puskesmas kabupaten sidoarjo tahun 2020	



			Pengelola program HIV	
--	--	--	-----------------------	--

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Urusan /IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Urusan Pekerjaan Umum				
1	Persentase/ Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	558	Laporan Kepala OPD Ke BUPATI Dilampiri Data Dukung	
2	banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	126.600		
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0		Tidak ada perumahan dikawasan pantai
4		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0		Tidak ada perumahan dikawasan pantai



5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Perbup No 93 Tahun 2017	
6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Perbup No 93 Tahun 2017	
7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	50	Laporan Kepala OPD Ke BUPATI Dilampiri Data Dukung	
8	Persentase/ Rasio luas kawasan permukiman sepanjang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	558	Laporan Kepala OPD Ke BUPATI Dilampiri Data Dukung	
9	pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	126.600		
10		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0		Tidak ada perumahan dikawasan pantai



11	n	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0		Tidak ada perumahan dikawasan pantai
12		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Perbup No 93 Tahun 2017	
13		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Perbup No 93 Tahun 2017	
14		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	50	Laporan Kepala OPD Ke BUPATI Dilampiri Data Dukung	
15	Persentase/ Rasio luas daerah irigasi kewenangan	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	100%	Laporan Kepala OPD Ke BUPATI Dilampiri Data Dukung	
16	Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	67,48%	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Rekapitulasi Kondisi Saluran	



				Kabupaten Sidoarjo 2020	
17		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	93,01 %	Desa Atau Penyuluh Pertanian	
18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 ada	Dokumen Rispam (Perbup 86 Tahun 2019 Ttg RISPAM)	
19	kan akses terhadap air minum	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	0	Laporan OPD Kepada Bupati	masih proses penyusunan
20	melalui SPAM jaringan perpipaan dan	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 (PDAM)	Laporan OPD Kepada Bupati	
21	bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		tidak ada yang mengajukan izin
22	rumah tangga di seluruh Kabupaten	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0		
23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan	39230	Laporan OPD kepada Bupati	



	n air limbah domestik	SPALD S			
24		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	835	Laporan OPD kepada Bupati	
25		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	40065	Laporan OPD kepada Bupati	
26		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	6875	Laporan OPD kepada Bupati	
27		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	6875	Laporan OPD kepada Bupati	
28		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	40065	Laporan OPD kepada Bupati	



29	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	193,87%	Laporan OPD kepada Bupati
30	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	1,35%	Laporan OPD kepada Bupati
31	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	59,01%	Laporan OPD kepada Bupati
32			Laporan OPD kepada Bupati
33	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	1,78%	Laporan OPD kepada Bupati Laporan OPD kepada Bupati
34	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan tinja	2%	Laporan OPD kepada Bupati Laporan OPD kepada Bupati
35	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan tinja	5,67%	Laporan OPD kepada Bupati Laporan OPD kepada Bupati



36		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung	9,65%	Laporan OPD kepada Bupati Laporan OPD kepada Bupati	
37		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1,26%	Laporan OPD kepada Bupati Laporan OPD kepada Bupati	
38	Rasio kepatuhan IMB kab./kota	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	1,21%	Laporan OPD kepada Bupati	
39		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	1.533	Laporan OPD kepada Bupati	
40		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	perda no 7 tahun 2013 ttg Bangunan Gedung	
41		Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/gedung	Ada	SK Bupati nomor 188/186/438.1.1.3/2020 ttg TABG	
42		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	0	Belum dibentukkan Tim Ahli Cagar Budaya



					dan belum ada kajian ttg bangunan yg sesuai kriteria cagar budaya
43		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	0	0	belum ada kajian ttg bangunan gedung strategis untuk kepentingan daerah
44		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab.	1966	Kartu Inventaris Barang (KIB) C	
45		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab. Yang dipelihara/dirawat	96	Laporan OPD kepada Bupati	
46	Tingkat Kemantapan Jalan Kab./Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	984	SK Bupati Ruas Jalan 2015	
47		Panjang jalan yang dibangun	893	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Data Dukung	



48		Panjang jembatan yang dibangun	17	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Data Dukung	
49		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	9,291	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Data Dukung	
50		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	7	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Data Dukung	
51		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	59,983	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Data Dukung	
52		Panjang jembatan yang direhabilitasi	9	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Data Dukung	
53		Panjang jalan yang dipelihara	59,983	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Data Dukung	
54		Panjang jembatan yang dipelihara	9	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Data Dukung	



55	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis	Jumlah Pelatihan Tenaga Operator/Teknisi/Analisis di wilayah Kabupaten/Kota	5		
56	yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	232		
57		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	232		
58		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Kontruksi Cakupan Kab/Kota Yang aktif dengan data termuktahir	Tidak ada		
59		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak ada		
60		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari	Tidak ada		



		APBN			
61		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada		
62		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak Ada		
63		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada		
64		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah Kab/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama	Tidak ada		



		dengan LPPK yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya			
65		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak ada		
66		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak ada		
67		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada, 60		
68		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada		



69		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
70		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
71		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak		
72		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	232		



73	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	60		
74	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	232		
75	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0		
76	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	332		
77	Jumlah Pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	332		
78	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		



79		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
80	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Tidak ada IKK output			

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0-	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Tidak ada rumah yang membutuhkan rehabilitasi karena
2		jumlah rumah yang terkena bencana alam	0-		



3		jumlah RT, KK, Jiwa Korban yang rumahnya terkena bencana alam	0-		bencana sehingga kinerja 100%	
4		jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai rencana aksi	0-			
5		jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0-			
6		jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi	0-			
7		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0-			
8		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0-			
9		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0-			
10	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian asset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0-	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati		Tidak ada rumah yang membutuhkan untuk direlokasi akibat program pemerintah sehingga kinerja 100%
11		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan rencana	0-			



		pemenuhan SPM			
12		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0-		
13		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0-		
14		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana SPM	0-		
15		Jumlah luasan (ha) pengadaan tanah		Tidak Disebutkan	
16	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	143,45	SK Bupati tentang penetapan kawasan kumuh	
17		Jumlah Unit Peningkatan kualitas RTLH	0	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
18		Jumlah Luasan (ha) penanganan Infrastruktur kawasan kumuh	0		



19	Berkurangn ya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah Rumah di Kabupaten/Kota	566.909	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati		
20		Jumlah Unit Peningkatan Kualitas	1. 1083 dari dana APBN 2. 136 dari APBD total 1.219	Data Rekapitulasi Perkim		
21		Jumlah Rumah Tidak layak huni	Baseline -APBD = 503-136 = 367	Data Rekapitulasi Perkim		
22		Jumlah Rumah yang tidak dihuni	0	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati		
23		Rasio Rumah Dan KK	114,13 %	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati		
24		Jumlah Rumah Pembangunan Baru	1533	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati		
25		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah Perumahan Terfasilitasi PSU	84	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
26		(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	159,391	Data dari KPSPAMS dan PDAM	
27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		172, 55	Data Rekapitulasi Perkim		
28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site		8,013	akses sanitasi on site dari inventarisir Dinas Kesehatan, Sanitasi Off site dari Pengelola IPAL Desa		



29		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
30		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0		
31		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	457	Tidak Disebutkan	
32		Jumlah pengembang yang teregistrasi	457		
33		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	50	Tidak Disebutkan	

5. Urusan Trantibum

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum yang ditangani	600.00	Rekapitulasi Laporan / Nota Dinas Kegiatan	
2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1000	Laporan rekapitulasi data linmas	
3		Jumlah Sarana dan Prasarana	31 unit Mobil 108 Unit sepeda Motor	Laporan Validasi Barang Milik Daerah	
4		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 UU	Jdih.sidoarjab.go.id	
4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6 Orang	Rekap Anggota PPNS (Sertifikasi terlampir)	



5		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan	1Paket	Arsip SOP OPD	
6	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 UU 1 Tkt Provinsi 4 Tkt kabupate n	Jdih.sidoarjok ab.go.id	
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	75%	Dokumen KRB 2017	
8	rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	Dokumen RPB than 2020 dan Draf PERDA KRB	
10		Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	Dokumen Renkon banjir tahun 2019 Dan SK Kepala OPD	
11		Persentase Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,057%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Pandemi covid-19
12		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,056%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	



13		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	1,058%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Tidak semua membutuhkan layanan pusdalops
14		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,139%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati, dilampiri berita acara	Dierikan sepatu bot untuk banjir. Dan tdk semua butuh
15	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Tidak ada KLB
16	penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati dan sk status darurat bencana	
17		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	12,8%	SK Keposkoan BPBD Kab. Sidoarjo	Petugas aktif disesuaikan kapasitas bencana



18		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	25%	Data Kejadian Bencana Tahun 2020	136 memerlukan pertolongan karena rumahnya rusak berat sedangkan sisanya rumahnya tdk ada kerusakan (bencana angin puting beliung)
19	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana/kebakaran	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	45 Kali layanan 1. 3 X (Water Rescue) 2. 32 X (animal rescue) 3. 5 X Penyemprotan Disinfektan 4. 6 X evakuasi kejadian lainnya	Rekapitulasi data layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Kab. Sidoarjo Tahun 2020	
20		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tidak ada		
21		Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak ada		



22		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan vakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak ada		
23		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	1. 14 unit mobil (mobil Pompa) 2. 1 unit mobil (water supply) 3. 3 unit mobil operasional angkut pasukan pemadaman 4. 1 unit mobil operasional angkut peralatan teknisi 5. 1 unit mobil operasional angkut pasukan penyelamatan 6. 1 set rescue tool 7. 5 gedung Pos pemadam kebakaran		



24		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	62 Orang		
25		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0		
26		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0		
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-			

6. Urusan Sosial

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Ssosial				
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	



	lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu	63839	DTKS Penetapan Oktobe No. 146/HUK/2020	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	SK Tim TAGANA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	5.0493	DTKS Penetapan Oktobe No. 146/HUK/2020	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar Gizi	817	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	67	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	



		Jumlah Penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng memanfaatkan alat sandang	67	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	67	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan	67	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	5	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	



		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	221	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	56	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	47.954	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan	221	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	



		layanan penelusuran keluarga			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	173	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	18	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah Korban Bencana Yang mendapatkan Makanan	60.126	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	



		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	50	SK Tim	

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	URUSAN WAJIB				
	TENAGA KERJA				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1.00	Dokumen RTK	
2		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	80.55%	Dokumen RTK dan berita resmi Statistik BPS dan Laporan OPD ke Bupati dilampiri Data Sakernas(BPS/KEMENTERIAN)	
3		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0.00	Nihil	
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100.00%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Pelatihan	
4		Persentase instruktur bersertifikat	100%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data	



		kompetensi		LPK	
5		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data LPK	
6		Persentase LPK yang terakreditasi	3,18%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data LPK	
7		Persentase LPK yang memiliki perizinan Persentase LPK yang memiliki perizinan	38,33%	Laporan Kepala OPD ke BUPATI dilampiri Rekap Data LPK	
8		Jumlah penganggur yang dilatih		Laporan OPD ke Bupati dilampiri Data Peserta Pelatihan	
9		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	56,67%	Laporan OPD ke bupati dilampiri Data Peserta Pelatihan	
10		Persentase penyerapan lulusan		Laporan OPD ke bupati dilampiri Data Peserta Pelatihan	
11		Lulusan bersertifikat kompetensi	100%	laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Peserta Pelatihan	
12		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	51,36%	Laporan OPD ke Bupati dilampiri Data Lembaga Pelatihan (BLK Luar Negeri)	
13		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		Laporan OPD ke BUPATI data Lembaga Pelatihan (BLK Luar Negeri)	
14	Tingkat Prooduktivitas Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan	80,91%	Laporan OPD ke BUPATI	



		program peningkatan produktivitas			
15		Data tingkat produktivitas total		Laporan OPD ke BUPATI	
16	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	100%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data WLKP	
17		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data WLKP	
18		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	643	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	
19		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	0%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data WLKP	
20		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	91,60%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data WLKP	Sisa perusahaan yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan saat wajib lapor ada syarat yg kurang sehingga terkategori



					i atau dianggap belum terdaftar (semua mendaftar tapi ada kendala teknis kelengkapan syarat)
21		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	
22		Jumlah mogok kerja	33,87%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	
23		Jumlah penutupan perusahaan		Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	
24		Jumlah perselisihan kepentingan		Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	
25		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	ada	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	
26		Jumlah perselisihan PHK	100.00%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	
27		Jumlah pekerja/buruh yg ter-PHK		Laporan OPD ke Bupati dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	



28		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		Laporan OPD ke Bupati dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	
29		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	13,47%	Laporan OPD ke Bupati dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	
30		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator hubungan industrial		Laporan OPD ke Bupati dilampiri Data Laporan Bidang HI Syaker	
31	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	3.54%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Rekap Lowongan	
32		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Rekap Pencari Kerja	
33		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab./kota	14	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Rekap BKK Sekabupaten Sidoarjo	
34		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	11	Nihil	
35		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	11	SK Pengantar Kerja	
36		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu	0.00	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Rekap LPTKS	



		wilayah kab/kota			
37		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	95	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Scan data Register Pengesahan Perjanjian kerja waktu tertentu	
38		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	889	Nihil	
39		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	13 ada	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Daftar Hadir Sosialisasi regulasi perlindungan TKI	
40		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	25%	Website Kementerian tenaga kerja "Sisko"	
41		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Daftar kepulangan PMI	
42		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	480 3491	Nihil	



43		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	78 -	Nihil	
44		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang ditentukan	2	Nihil	

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	24	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	
2		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	107	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	UPTD PPA	
4		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan	303	DP3AKB	



		minimal			
5		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	
6		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	data dari P3AKB 0	
7		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 penduduk perempuan)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	285	data dr P3AKB 1	
9		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	285	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	
10		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	285	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	
11		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah	1	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	



		kabupaten/kota			
12		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkadaerah yang sudah dievaluasi	2	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	
13		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	
14		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	
15					

9. Urusan Pangan

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	URUSAN WAJIB				
	Pangan				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	laporan opd ke bupati dilampiri data dukung	



2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	laporan opd ke bupati dilampiri data dukung	
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	laporan opd ke bupati dilampiri data dukung	
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	laporan opd ke bupati dilampiri data dukung	
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	laporan peta ketahanan pangan	
6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	laporan opd ke bupati dilampiri data dukung	
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	laporan opd ke bupati dilampiri data dukung	
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	84.44%	laporan hasil uji	



10. Urusan Pertanahan

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	PERTANAHAN				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan	SK Ijin Lokasi Yg diterbitkan oleh Bupati/Walikota	100%	Surat Pernyataan terlampir	
2	peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0/0=100%		MENURUT INFORMASI BPN OBYEK LANDREFORM SUDAH HABIS SEJAK 1965
3		SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	0/0=100%		MENURUT INFORMASI BPN OBYEK LANDREFORM SUDAH HABIS SEJAK 1965
4		Dokumen Ijin Membuka Tanah	0/0=100%		Di sidoarjo tidak ada tanah bebas, semua sudah ada pemiliknya sehingga tidak ada pembukaan lahan
5		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	100%	DOKUMEN PENGADAAAN TANAH	
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman	Tidak ada IKK Output	-		



	modal.				
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tidak ada IKK Output	-		
	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Tidak ada IKK Output	-		
	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Tidak ada IKK Output	-		

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Hasil perhitungan terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan	65.30 51.522 85.14 52.26	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	ada	Dokumen LKPJ DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin	Data izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	79.33	Nota Dinas Laporan Kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian	



	PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten			n Pencemaran Tahun 2020	
4		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha yg izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yg diterbitkan oleh Pemda	0.28	Nota Dinas Laporan Kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Tahun 2020	
5		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	0	Karena tidak ada Masyarakat Hukum Adat	Di Sidoarjo tidak ada Masyarakat Hukum Adat
6		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	NIHIL	Di Sidoarjo tidak ada Masyarakat Hukum Adat
7		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100%	Laporan KEGIATAN Seksi Pembinaan dan Kemitraan tahun 2020	
8		Penangan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda kab/kota yang ditangani	100%	Laporan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, sengketa lingkungan dan penegakan hukum tahun 2020	



12. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil				
1	Perekaman KTP Elektronik	Penerbitan akta perkawinan	100%	data laporan pelayanan setiap bulan	
2		Penerbitan akta cerai	100%	data laporan pelayanan setiap bulan	
3		Penerbitan akta kematian	100%	data laporan pelayanan setiap bulan	
4		Penyajian data kependudukan	50%	data laporan pelayanan setiap bulan	

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	URUSAN WAJIB				
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	PIID-PEL	
2		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	PIID-PEL	



3		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	lembaga sosbud-adat desa	
4		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0		
5	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0		
6		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0		
7		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	2065	Laporan Kepala OPD ke Bupati	
8		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan	8770	Laporan Kepala OPD ke Bupati	



		kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
--	--	---	--	--	--

14. Urusan Keluarga Berencana

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	URUSAN WAJIB				
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	tidak ada	Bappeda	
2		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	8.318	Kader KB (DP3AKB)	
3		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	33	dinkes	
4		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100%	Statistik BKKBN	
5		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KBPK	5.389	Re.Ka/F/I/Dal/13 (DP3AKB)	



6	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Re.Ka/F/I/Dal/13 (DP3AKB)	
7	Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24,96%	Re.Ka/F/I/Dal/13 (DP3AKB)	
8		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1.233	Re.Ka/F/I/Dal/13 (DP3AKB)	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	2,67%	Re.Ka/F/I/Dal/13 (DP3AKB)	
9		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		Re.Ka/F/I/Dal/13 (DP3AKB)
10		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	7,59%	Re.Ka/F/I/Dal/13 (DP3AKB)	

15. Urusan Perhubungan

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perhubungan.				
1	Rasio konektivitas Kabupaten	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C	100%	Laporan Penyelenggaraan terminal Penumpang tipe C di Kabupaten SIDOARJO	



2		Terlaksananya pelayanan uji berkala	86.74%	Laporan KBWU (KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI)	
3		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	SUMBER DATA SK TENTANG KEPUTUSAN BUPATI NO. 188/665/404.1.3.2/2013 TTG TARIF ANGKUTAN PEDESAA N DAN TAXI	
4		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	100%	LAPORAN Kinerja jalan dan Alat Perlengkapan jalan di Kabupaten Sidoarjo	
5	VC Rasio di jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	100%	LAPORAN Kinerja jalan dan Alat Perlengkapan jalan di Kabupaten Sidoarjo	



16. Urusan Komunikasi Dan Informatika

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	URUSAN WAJIB				
	Komunikasi Dan Informatika.				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	KONEKSI TO OPD BACBONE	
2		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	KONEKSI TO OPD BACBONE	
3		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinya lainnya) dg memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada	Ada	
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase kegiatan (even), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemda yg dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dg Permen Kominfo No.5 Tahun 2015	95%	Aplikasi pelayanan OPD yg terdaftar di sub domain * sidoarjo.go.id	



5		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	KONEKSI TO OPD BACBONE	
6		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan per-UU	100%	KONEKSI TO OPD BACBONE	
7		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yg telah diimplementasikan secara elektronik	104,17 %	Layanan Sidoarjo : 1. D-S3;2. e-KIR; 3. e-Monkas; 4. e-PBB; 5. E-Reklame; 6. M-Bonk; 7. Mata Delta; 8. e-Parlemen;9. SIAP TARIK; 10. SIGAP; 11. m-SIPADU; 12. SIKOLING; 13. In Kam RS; 14. Alamak; 15. Re-Mics; 16. E-Tamat; 17. Si Manies;18. Santri RS; 19. TUKU0; 20. E-Kliping; 21. SIDIRA; 22. SITC; 23. E-BPHTB; 24. SIDALI; 25. SATE KREMBUNG; 26. ANTREAN DISDUKCA PIL; 27. Berkas Mlaku Dewe (BMW); 28. SIKADA; 29. SI CANTIK;	



				30. ANTRIAN MPP; 31. SI ABON; 32. SI PRAJA; 33. LESTARI Penyelenggaraan Pemerintah : 1.,. CSR; 2. e-Monev; 3. KGB; 4. Si Pekat; 5. SKP; 6. Sibangsda; 7. SIMPEG; 8. TKPKD; 9. SimLitbang; 10. Siksda; 11. LAPOR BOS; 12. DAPODIK; 13. Cuti Online; 14. DAPODI KDASMEN; 15. SEMAR SIDOARJO; 16. BPS; 17. e-Consulting TOTAL 50	
8		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	68.75%	11 Layanan Publik : 1. CUTI ONLINE; 2. e-SPTPD; 3. e-PBB Elektronik; 4. SIGAP; 5. SIAP TARIK; 6. e-Musrenbang; 7. e-Perpus; 8. INKAMRS; 9. REMICS;	11 layanan itu sudah mencapai nilai 100% untuk mendapatkan sertifikat elektronik dari portal layanan kementerian kominfo



				10. BMW; 11. Sippadu	
9		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan pertauran per-UU	32.00	16 Layanan Publik : 1. CUTI ONLINE; 2. e-SPTPD; 3. e-PBB Elektronik; 4. SIGAP; 5. SIAP TARIK; 6. e-Musrenbang; 7. e-Perpus; 8. INKAMRS; 9. REMICS; 10. BMW; 11. Sippadu; 12. SIKOLING; 13. SISTEM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR; 14. SANTRI; 15 E-Kinerja; 16.P3 M Kabupaten Sidoarjo	Tahun 2020 sdh diagendakan untuk pendampingan agar 34 layanan elektronik sesuai dengan ketentuan per UU an tetapi alokasi anggaran terkena refokusing untuk penanganan pandemic covid-19. Namun tahun 2021 akan dilaksanakan pendampingannya
10		Persentase layanan publik & layanan administrasi yg terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	60%	21 Aplikasi yang penempatan server di KOMINFO	



				<p>dan terintegrasi ; 1. Bos, 2. Aplikasi database perusahaan Ekspor import (INDAGO) , 3. Aplikasi Lestari, 4. antrian sukodono,5. econsulting, 6. aplikasi elabkd,7. aplikasi pengawasan , 8. Aplikasi E-Kenda; 9. Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Pengangkutan Sampah (SIPPAS); 10. Aplikasi SIKD; 11. Aplikasi Pendataan Penduduk Non Permanen Berbasis Web (LADEN);12. Sistem Informasi Manajemen Perangkat Desa; 13. smart city; 14. Aplikasi DITAKOPUM; 15. Pengembangan Aplikasi Tuku; 16. Bahan Pokok / Siskaperbap; 17. Aplikasi</p>	
--	--	--	--	---	--



				Toko Swalayan ; 18. aplikasi ekinerja; 19. aplikasi ebuddy; 20. aplikasi datawarehose; 21. aplikasi bispro	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	KONEKSI TO OPD BACBONE	
11		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	KONEKSI TO OPD BACBONE	
12		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra Kominfo)	100%	KONEKSI TO OPD BACBONE	
13		Persentase data yang dapat berbagi pakai	20.00	7 data Aplikasi yang dapat dibagi pakai : 1. Portal Data kinerja; 2. DWH; 3. BISPRO; 4. SINOP; 5. SIMPEG; 6. E-BUDDY; 7. E-KINERJA	Dengan 7 aplikasi layanan online tersebut sudah bisa mengakomodasi semua kebutuhan pelayanan online baik ke internal OPD Pemda maupun masyarakat



14		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%	KONEKSI TO OPD BACBONE	
15		Persentase ASN pengelola TIK yg tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	52.38%	BIDANG Infrastruktur dan Keamanan : 12 Orang ASN yang punya sertifikat kompetensi 6 Orang; Bidang tata Kelola Informatika = 9 orang ASN yang punya sertifikat kompetensi 5, Jadi Total 21 ASN Pengelola TIK yang punya sertifikat kompetensi 11 ASN.	
16		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada	Perbup no 46 tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK Menuju Smart City	
17	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan	Persentase komunitas masy/mitra strategis pemerintah daerah provinsi/kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	83.33%	KIM,PWI,S ATGAS,ME DSOS	



18	dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dg strategi komunikasi (STRAKOM)	Nihil	Didaerah tidak ada	
19		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yg dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yg telah ditetapkan	Nihil	Didaerah tidak ada	

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Koperasi Dan Ukm				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah Kabupaten/Kota	1,82%	LAPORAN OPD	Karena pandemic covid-19 sehingga banyak usaha siman pinjam tidak aktif
2		Persentase fasilitasi penertiban Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dala daerah	100%	LAPORAN OPD	



		kabupaten/kota			
3		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,16%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Laporan Monev Bidang Dalwas Dinkop	
4		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	3,40%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Koperasi Sehat (Bina Usaha Koperasi Dinkop)	
5		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	38,91%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Pelatihan Koperasi (bidang klembagaan)	
6		Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota	0,43%	Data Pelatihan Koperasi (bidang klembagaan)	
7		Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	37,14%	Data Pelatihan Koperasi (bidang klembagaan)	



		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
8		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Nihil	
9		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	29,66%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Dinas Koperasi Bidang Kelembagaan	
10		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Nihil	
11		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Nihil	
12		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21,22%	Laporan OPD ke BUPATI an	



13		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,07%	Laporan OPD ke BUPATI	
14	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0	Nihil	
15		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	100%	Aplikasi DITAKOPU M Bidang Dalwas	
16		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,05%	laporan OPD ke BUPATI	
17		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,85%	laporan OPD ke BUPATI	
18		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,10%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Um Dinas Koperasi yang mengikuti pameran secara offline dan online (Bidang Binus Kop dan Um Dinkop)	
19		Rasio usaha mikro yang	0,85%	Laporan OPD ke	



		diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		BUPATI dilampiri Data Dukung	
20		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0,52%	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data Dukung	

18. Urusan Penanaman Modal

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	PERDA mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif penanaman modal yang menadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1.00	Perbup Nomor 9 Tahun 2016	
2		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	tidak ada	Surat Pernyataan Tidak Ada terlampir	
3		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	tidak ada	Surat Pernyataan Tidak Ada terlampir	
4		Kegiatan Semoinar, Bisnis, Forum One on One Meeting	tidak ada	Bukti Laporan terlampir	
5		Kegiatan Pameran Penanaman Modal	tidak ada	Surat Pernyataan Tidak Ada	Karena pandemic covid-19



				terlampir	
6		Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	tidak ada	Surat Pernyataan Tidak Ada terlampir	Karena pandemi covid-19 tidak ada yang menanam modal bahkan beberapa perusahaan pindah domisil usaha ke daerah lain
7		Konsultasi Perijinan Dan Non Perijinan Penanaman Modal	3 layanan konsultasi 1. Layanan Siantar : 3.614 2. Layanan Livechat : 8.381 3. Layanan Tatap muka : 618	Surat Laporan Kepada Bupati	
8		Penerbitan Perijinan dan non perijinan penanaman modal	2.575	Surat Laporan Kepada Bupati	
9		Laporan realisasi penanaman modal	7.037.752.693 .895	Surat Laporan Kepada Bupati	
10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	19	Data kepegawaian DPMPSTP	
11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	88 Perusahaan	Laporan Kepala OPD kepada	



				Bupati	
12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	1. Layanan Siantar : 3.614 2. Layanan Livechat : 8.381 3. Layanan Tatap muka : 618	Laporan Kepala OPD kepada Bupati	

19. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan wirausaha	200	E-MONEV	
2		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan wirausaha	0		
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	18	E-MONEV	
4		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		
5	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	565	LAPORAN OPD KE BUPATI DILAMPI	



				RI DATA DUKUNG	
6		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3 even 1. Kejurkab 2. PORSD 3. PORSMP	E-MONEV	

20. Urusan Statistik

No	Urusan /IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah	Tersedianya buku profil daerah	ada	ada	
2	Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2.00	surey data sektoral kecamatan dan COR	
3		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	4.00	PROFIL KESEHATAN , PROFIL PENDIDIKAN ,PROFIL PERIKANAN, PROFIL DESA	
4		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1.00	INDEKS HARGA KONSUMEN , BPS	
5		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomenfasi BPS	4.00	Analisa gender, indikator tenaga kerja, indikator sosial, indikator ekonomi	



6		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektora	0	Nihil	
7		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0	Nihil	
8	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-			

21. Urusan Persandian

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	URUSAN WAJIB				
	PERSANDIAN				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yg harus diamankan	0%	NIHIL	Belum dilaksanakan karena masih menunggu perangkat keras (hardware) dari pemerintah pusat
2		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip	75%	LAPORAN OPD DILAMPIRI DATA DUKUNG	



		manajemen keamanan informasi (SMKI) dan tau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemda			
3		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	19%	LAPORAN OPD DILAMPIRI DATA DUKUNG	
4		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100%	INDEKS KAMI	

22. Urusan Kebudayaan

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	URUSAN WAJIB				
	KEBUDAYAAN				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	1,36	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya Trowulan (BPCB)	
2		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	-		



3		Jumlah obyek kemajuan kebudayaan yg dikembangkan	1	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya Trowulan (BPCB)	
4		Jumlah SDM ,lembaga dan pranata yg dibina	1.00	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan data dinas pendidikan dan kebudayaan	
5		Register caga budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	113	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya Trowulan (BPCB)	
6		Perlindungan cagar buda kabupaten	-		
7		Layanan [erizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-		
8		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian ..)	-		
9		Pemanfaatan cagar budaya provinsi	-		
10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-		



		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	-		
11		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	-		
12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-		
13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	6.00	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya Trowulan (BPCB)	
14		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-		
15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-		
16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-		
17		Peningkatan kompetensi SDM cagar Budaya dan permuseuman	-		



18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-		
19		Penyelenggaraan kegiatan museum yg melibatkan masyarakat	1.00	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya Trowulan (BPCB)	

23. Urusan Perpustakaan

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	URUSAN WAJIB				
	PERPUSTAKAAN				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Ratio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,1536	laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah dilampiri data dukung rekap data perpustakaan dan data dari dispendukcapil	
2		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	282.85 %	rekap data perpustakaan dan data dari dispendukcapil	
3		Ratio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.04%	rekap data perpustakaan dan data dari dispendukcapil	
4		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	11.76%	laporan OPD ke BUPATI dilampiri rekap data perpustakaan	



		perpustakaan		dan data dari dispendukcapil	
5		Jumlah pemakatan gemar membaca dimasyarakat	5	laporan OPD ke BUPATI dilampiri rekap data perpustakaan dan data dari dispendukcapil	
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	5	Cover Buku Terlampir	
7		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan alih bahasa	0	NIHIL	
8		Koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	545	laporan OPD ke BUPATI dilampiri rekap data perpustakaan dan data dari dispendukcapil	
9			136.589	laporan OPD ke BUPATI dilampiri rekap data perpustakaan dan data dari dispendukcapil	

24. Urusan Kearsipan

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Kearsipan		-		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	26.74%	Laporan OPD kpd Bupati	
2		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	93.67%	Laporan OPD kpd Bupati	
3				Laporan OPD kpd Bupati	



4	pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	106.5429%	Laporan OPD kpd Bupati	
5		Persentasi jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0		Arsip tidak bisa dimasukkan ke SIKN melalui JIKN karena apikasi JIKN tidak data diakses
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	274	laporan OPD ke BUPATI dilampiri rekap data perpustakaan dan data dari dispendukcapil	
7	setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	NIHIL	Anggaran dilakukan refokusing untuk pengatasan pandemic covid-19
8	pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kab/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di Provinsi	0	NIHIL	Anggaran dilakukan refokusing untuk pengatasan pandemic covid-19
9		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	0	NIHIL	Anggaran dilakukan refokusing untuk pengatasan pandemic covid-19



10		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	NIHIL	Anggaran dilakukan refocusing untuk penanganan pandemic covid-19
11		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai NSPK	0	NIHIL	Anggaran dilakukan refocusing untuk penanganan pandemic covid-19

25. Urusan Kelautan & Perikanan

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	SUMBER DATA	Keterangan
	Urusan Pilihan				
	Kelautan & perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	11	Data Rekap	
2		Prosentasi TPI yang Operasional	100%	Berupa berita acara mutasi barang inventaris milik pemda	
3		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	201	Berupa rekap STDUP	



4		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	55	Berupa Rekapitan Daftar peserta budidaya perikanan air tawar	
5		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	0		

26. Urusan Pariwisata

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	PARIWISATA				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	35	LAPORAN RUTIN DATA KUNJUNGAN WISATAWAN	
2		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	89	LAPORAN RUTIN DATA KUNJUNGAN WISATAWAN	
3		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	79	LAPORAN RUTIN DATA KUNJUNGAN WISATAWAN	
4		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	5130	LAPORAN RUTIN DATA KUNJUNGAN WISATAWAN	
5		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2 even	E-MONEV	
6		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0		



5		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0%	Surat pernyataan	Karena tidak ada yang mengajukan permohonan
6	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	95,79%	laporan opd ke bupati dilampiri data dukung REKAPITULASI LUAS SERANGAN DAN PENGENDALIAN OPT TEBU dinas pertanian tahun 2020	
7					

28. Urusan Kehutanan

Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
		Elemen data	Capaian			
Urusan Pilihan						
Kehutanan			NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMILIKI HUTAN



29. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
		Elemen data	Capaian			
Urusan Pilihan ESDM			NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMEILIKI GAS BUMI

30. Urusan Perdagangan

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perdagangan				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan)	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			
2		a. Pusat perbelanjaan	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI	
3		b. Toko swalayan	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI	
4		Persentase penerbitan TDG	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI	
5		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI	
6		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0		



7		Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0/0x10 0% =100%	-	Karena tidak ada pengajuan
8		Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0/0x10 0% =100%	-	Karena tidak ada pengajuan
9		Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0/0x10 0% =100%	-	Karena tidak ada pengajuan
10		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI DILAMPIRI BERITA ACARA	
11		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		LAPORAN OPD KE BUPATI	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0/0x10 0% =100%	NIHIL	Karena tidak ada pengajuan
12		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,14%		
13	Persentase kinerja realisasi pupuk	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	104,54 %	LAPORAN OPD KE BUPATI DILAMPIRI REALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSID I	
14	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UT TP) yang ditera/ tera ulang dalam tahun	31,68%	LAPORAN OPD KEPADA BUPATI	



	annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	berjalan			
15		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI DILAMPIRI BERITA ACARA CERAPAN	

31. Urusan Perindustrian

No	Urusan/IKK Outcome	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perindustrian				
	Pertambahan jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100%	RAPERDA RPIK	



	Kabupaten				
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri(IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0/0x10 0% =100%	-	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	



	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	5.87%	SIINAS	
--	---	---	-------	--------	--

32. Urusan Transmigrasi

Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
		Elemen data	Capaian			
Urusan Pilihan						
TRANSMIGRASI			NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMILIKI KAWASAN TRANSMIGRASI

II.2.2. Indikator Kinerja Kunci Outcome (Hasil)

1. Urusan Pendidikan

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,23%	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	



2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,80%	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,16%	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Data Dapodik	
4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,83%	website datadik.kemendikbud.go.od	

2. Urusan Kesehatan

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Urusan Wajib				
1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS Rujukan	0,13	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
2		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	85,71%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	



3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,06%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95,94%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,28%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	94,20%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,98%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	57,18%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Karena adanya pandemi covid-19 shg aktifitas posbingdu yg menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19 ditiadakan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,09%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Dikarenakan warga usia 60thn keatas sangat beresiko dan rentan thdp penularan covid-19 dan kebanyakan juga komorbid shg semua kegiatan



					lansia ditiadakan
10		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42,16%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Karena adanya pandemi covid-19 shg aktifitas posbingdu yg menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19 ditiadakan
11		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78,46%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Karena adanya pandemi covid-19 shg aktifitas posbingdu yg menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19 ditiadakan
12		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
13		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	33,98%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Karena adanya pandemi covid-19 shg aktifitas posbingdu yg menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19 ditiadakan



14		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	61,92%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Karena adanya pandemi covid-19 shg aktifitas posbingdu yg menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19 ditiadakan
----	--	---	--------	----------------------------------	---

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Bukti dukung	Keterangan
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	92,11%	Laporan kepala OPD ke BUPATI dilampiri data dukung	
2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	0/0=1	Laporan kepala OPD ke BUPATI dilampiri data dukung	Tidak ada perumahan yang berada pada kawasan pantai shg tdk ada perumahan yg rawan abrasi,erosi dan akresi
3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	76,06%	perbup no 93 tahun 2017	
4		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	100%	Laporan OPD kepada Bupati	



		dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten			
5		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	8,43%	Laporan OPD kepada Bupati	
6		Rasio kepatuhan IMB kab./kota	100%	Surat pernyataan kepala DPMPTSP dan laporan camat ttg IMB	
7		Tingkat Kemantapan Jalan Kab./Kota	94,86%	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Rekapitulasi Kondisi Jalan Kab. Sda Tahun 2020	
8		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	Laporan Opd Ke Bupati	
9		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Screenshoot Sirup Bridge Pemkab Sidoarjo 2020	

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	Tidak ada rumah yang membutuhkan rehabilitasi karena bencana



				sehingga kinerja 100%
2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	100%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati Tidak ada rumah yang membutuhkan relokasi akibat terdampak program pemerintah sehingga kinerja 100%
3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	87,12 %	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati, dilampiri data dukung
4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,07%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati, dilampiri data dukung Anggaran terkena Refocusing untuk pengatasan pandemic covid-19
5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,28%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati, dilampiri data dukung jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU



5. Urusan Trantibumlinmas

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Urusan Wajib				
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Rekapitulasi Laporan / Nota Dinas Kegiatan	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Jdih.sidoarjoab.go.id	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Laporan Kepala OPD Kepada Bupati	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	41,54 %	Laporan Kejadian Kebakaran	41,54% adalah yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi sedangkan yang 58,46% tidak membutuhkan



					penyelamatan dan evakuasi diantaranya kebakaran dilahan kosong. Sehingga kinerja sudah tercapai 100%
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	Laporan Kejadian Kebakaran	

6. Urusan Sosial

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	79,09%	DTKS Penetapan Oktobe No. 146/HUK/2020	
2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100%	Laporan Surat Kepala OPD kepada Bupati berisi data Rekap Dinas Sosial	



7. Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Laporan Opd Ke Bupati Dilampiri Data Dukung	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	80,91 %	LAPORAN OPD KE BUPATI DILAMPIRI Data Pelatihan Tenaga Kerja	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	12.683 .383.7 43,04 %	BPS, Sidoarjo Dalam Angka tahun 2021	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	62,94 %	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data WLKP	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	51,61 %	Laporan OPD ke BUPATI dilampiri Data penempatan tenaga kerja	Karena pandemi covid-19 shg banyak lowongan /lapangan kerja turun drastic bahkan banyak yg diPHK



8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	64,11%	Perbup 83 tahun 2020 ttg perubahan kedua atas perbup no 1 tahun 2020 ttg Besaran Alokasi Dana Desa bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, silpa dana desa tahun 2019, dan bantuan keuangan kepada desa di Kabupaten Sidoarjo TA 2020 dan Data Siskeudes bidang pemberdayaan masyarakat	
2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0,0147 %	Laporan pengaduan kasus UPTD PPA, dinkes dan dispendukcapil	
3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 penduduk perempuan)	0,00653	Laporan pengaduan kasus UPTD PPA, dinkes	

9. Urusan Pangan

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	245,65%	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah dilampiri bukti dr monitoring bidang	



10. Urusan Pertanahan

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pertanahan				
		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Surat pernyataan DPMPTSP	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	Sertifikat dan dokumen pengadaan tanah	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%	Surat pernyataan DPMPTSP	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	-	Pelaksanaan Landreform sudah dilakukan dan selesai seluruhnya pada tahun 1965
		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	100%	-	Di sidoarjo tidak ada tanah bebas, semua sudah ada pemiliknya sehingga tidak ada pembukaan lahan baru
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Tidak Ada Laporan / Pengaduan Masyarakat	Tidak Ada Laporan / Pengaduan Masyarakat



11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	65,30	Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
2		Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	67,08%	Dokumen LKPJ DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020	Yang 32,92% timbunan sampah telah dikelola oleh masyarakat secara swadaya shg kinerja tercapai 100%
3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	57,14%	Nota Dinas Laporan Kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Tahun 2020	

12. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Administrasi Kependudukan Catatan	Perekaman KTP Elektronik	97,80%	laporan kepala OPD kepada Bupati, dilampiri data dukung data SIAK	



2	Sipil	Persentase Penduduk usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari Yang Memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	5,66%	laporan kepala OPD kepada Bupati, dilampiri data dukung data SIAK	Karena pandemic covid-19 shg tidak ada pelayanan atau jemput bola terbatas
3		Kepemilikan akta kelahiran	93,80%	laporan kepala OPD kepada Bupati, dilampiri data dukung data SIAK	
4		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	47,92%	5 perjanjian kerjasama dan 18 persetujuan dirjen adminduk kemendagri + perbup 4 tahun 2019 ttg pelimpahan kew bupati kpd camat	25 OPD lainnya tdk memerlukan akses khusus u.memanfaatkan data kependudukan. Mereka hanya membutuhkan data tertentu dg berkirim surat ke dispendukca pil sudah terpenuhi. Shg kinerja tercapai 100%



13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0.00%	Indeks Desa Memba ngun	<p>Desa sangat tertinggal desa renokenngo kec porong, desa Jairejo kec Tanggulangin terkena dampak Luapan Lumpur Lapindo 100% wilayah terendam (harus diusulkan penghapusan)</p> <p>Desa Besuki Kecamatan Jabon wilayahnya mayoritas terendam Lumpur Lapindo (harus dilakukan penggabungan)</p> <p>Sdh dalam bentuk draft raperda dan sdh diusulkan ke pemprop dan kemendagri</p> <p>Sehingga tidak mungkin sama sekali ditingkatkan menjadi Desa berkembang. Sehingga kinerja sudah tercapai 100%</p>
2		Persentase peningkatan status desa mandiri	64,62%	Indeks Desa Memba ngun	



14. Urusan Keluarga Berencana

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,978	dinkes dan bappeda	
2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	78,74%	PA/PUS	
3		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	21,26%	Unmeetneed / PUS	

15. Urusan Perhubungan

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten	0,231	Laporan Kepala Opd Kepada Bupati	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,251	LAPORAN Kinerja jalan dan Alat Perlengkapan jalan di Kabupaten Sidoarjo	



16. Urusan Komunikasi Dan Informatika

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	KONEKSI TO OPD BACBONE	
2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20%	PORTAL SIDOARJO	Dengan 7 aplikasi layanan online tersebut sudah bisa mengakomodasi semua kebutuhan pelayanan online baik ke internal OPD Pemda maupun masyarakat
3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	100%	data kependudukan	



17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Urusan Wajib				
	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	20,75%	laporan OPD ke BUPATI	1. Akibat pandemi covid-19 banyak koperasi yg tidak aktif 2. Dengan capaian 20,75% sudah melampaui target tahun 2020 yaitu 20,5%
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1,83%	laporan OPD ke BUPATI	Terbatasnya pemasaran dan akses permodalan karena pandemi covid-19 sehingga banyak usaha yang kolaps

18. Urusan Penanaman Modal

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-63,71%	Surat kepada Bupati perihal Data Realisasi Investasi BKPM RI	Akibat adanya pandemic covid-19 tdk ada pengusaha melakukan penanaman modal bahkan ada yg berpindah domisili usahanya



19. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Urusan Wajib				
1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	41,953%	BPS dan Laporan kepala OPD kepada Bupati dilampiri rekap daftar anggota aktif organisasi kepemudaan	Karena pandemic covid-19 menyebabkan akses permodalan dan pemasaran sulit atau rendah. Dan pemuda lainnya menjadi pekerja diperusahaan
2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,18%	BPS dan Laporan kepala OPD kepada Bupati dilampiri rekap daftar anggota aktif organisasi kepemudaan	Keterbatasan pergerakan manusia khususnya pemuda dikarenakan pandemic covid-19
3		Peningkatan prestasi olahraga	73	e monev disporapar	



20. Urusan Statistik

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Urusan Wajib				
1	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	LAPORAN OPD TENTANG JUMLAH OPD YG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	LAPORAN OPD TENTANG JUMLAH OPD YG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	

21. Urusan Persandian

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Urusan Wajib				
	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	494 Cukup	Indeks KAMI	



22. Urusan Kebudayaan

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Laporan Surat dari OPD kpd Bupati Berdasarkan Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya Trowulan (BPCB)	

23. Urusan Perpustakaan

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	59,79	laporan index minat baca th.2020	
2		Indeks Pembangunan Literisasi Masyarakat	13,44	index pembangunan literasi 2020 (Kajian dr perpusnas)	Index pembangunan literasi tersebut adalah index pembangunan literasi Propinsi Jawa Timur tahun 2020, karena yang kabupaten sidoarjo tahun 2020 dan 2019 tidak ada



24. Urusan Kearsipan

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	56,73%	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah dilampiri data dukung	
2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	45,67%	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah dilampiri data dukung	

25. Urusan Kelautan & Perikanan

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Kelautan & perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	117.618,08	Data statistik perikanan	



26. Urusan Pariwisata

NO	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	- 56,25%	LAPORAN RUTIN DATA KUNJUNGAN WISATAWAN	Akibat adanya pandemic covid-19
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	- 57,767 %	LAPORAN RUTIN DATA KUNJUNGAN WISATAWAN	Akibat adanya pandemic covid-19
		Tingkat hunian akomodasi	20%	SURAT KETERANGAN HASIL MONITORING	Akibat adanya pandemic covid-19
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,88%	Sidoarjo dalam angka 2021,BPS	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	8,51%	Laporan kepala OPD kepada Bupati Pajak dan retribusi daerah dari Dinas Pajak Daerah dan Dinas Pariwisata dengan lampiran ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun 2020	



27. Urusan Pertanian

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	689,01%	Laporan mantri pertanian dan data rekapitulasi produksi, produktivitas dan luas panen	
2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-13,92%	bukti dukung berupa laporan kepala OPD kepada bupati tahun 2020 dengan ttd dan stempel basah dilampiri bukti dr monitoring bidang	

28. Urusan Kehutanan

Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
		Elemen data	Capaian			
Urusan Pilihan						
Kehutanan			NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMILIKI HUTAN



29. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
		Elemen data	Capaian			
Urusan Pilihan						
ESDM			NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMEILIKI GAS BUMI

30. Urusan Perdagangan

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100,00 %	Laporan Kepala Opd Kepada Bupati Dilampiri Ijin Usaha Toko Swalayan Tahun 2020	
2		Persentase kinerja realisasi pupuk	94,09%	Laporan Kepala Opd Kepada Bupati Dilampiri Rdkk Dan Realisasi Penyaluran	
3		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	31,68%	Laporan Kepala Opd Kepada Bupati	



31. Urusan Perindustrian

NO	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0,50%	LAPORAN OPD KE BUPATI	
2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	50%	RAPERDA RPIK dan pp 14 th 2015 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 - 2035	
3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI	
4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI	Tidak ada yang mengajukan izin perluasan
5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	100%	LAPORAN OPD KE BUPATI	



6		Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	ADA, 95%	SIINAS	
---	--	---	----------	--------	--

32. Urusan Transmigrasi

Urusan	IKK	Kinerja		Sumber Data	Data dukung	KET
		Elemen data	Capaian			
Urusan Pilihan						
TRANSMIG RASI			NIHIL			KABUPATEN SIDOARJO TIDAK MEMEILIKI KAWASN TRANSMIGRASI

II.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan(Perencanaan & Keuangan)

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Perencanaan & Keuangan	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	7,97%	LRA SEBELUM REVIU	
2		Persentase PAD	0,9201918 23%	LRA SEBELUM REVIU	
3		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	58,84%	LRA SEBELUM REVIU	



4		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	103%	Laporan pelaksanaan Quality Assurance (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemkab Sidoarjo	
5		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	91%	Laporan hasil penjamin kualitas (Quality Assurance) atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada inspektorat tahun 2018	
6		Opini Laporan Keuangan	WTP	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan	

2. Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Data Base LPSE (ISB LKPP)	
2		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	20,42%	Data Base LPSE (ISB LKPP)	



3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	19,372%	Data Base LPSE (ISB LKPP) dan workshet bidang anggaran	
---	--	--	---------	--	--

3. Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	105,14%	Data Aplikasi Database Kepegawaian Simpeg (Laporan Kepala OPD kepada Sekda)	
2		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,51%	Rekapitulasi Data Kepegawaian BKD Kab. Sidoarjo Tahun 2020 (Laporan Kepala OPD kepada Sekda)	
3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	Rekapitulasi Data Kepegawaian BKD Kab. Sidoarjo Tahun 2020 (Laporan Kepala OPD kepada Sekda)	

4. Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

No	Urusan	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	Sumber Data	Keterangan
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-14,51%	Lra Sebelum Reviu	



2		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	17,45%	Lra Sebelum Reviu	
3		Assets management			
3.a.		Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ada	Daftar Aset	
3.b.		Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ada	Manual Book	
3.c.		Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ada	Inventarisasi Aset Tribulan	
3.d.		Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya	Neraca Sebelum Reviu	
4		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	20,40%	Lra Sebelum Reviu	Keterbatasan waktu pengadaan dikarenakan keterlambatan pengesahan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

5. Urusan Pemerintahan (Transparansi & Partisipasi Publik)

No	Urusan	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Transparansi & Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information	112,90%	LRA SEBELUM REVIU	



		on resources available to frontline service delivery units)			
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100%	1. RINGKASAN RKA SKPD 2. RINGKASAN RKA PPKD 3. RAPERDA APBD 4. RAPERDA PERUBAHAN APBD 5. PERDA APBD 6. PERDA PERUBAHAN APBD 7. RINGKASAN DPA SKPD 8. RINGKASAN DPA PPKD 9. LRA SELURUH SKPD 10. LRA PPKD 11. LKPD 12. OPINI ATAS LKPD	



II.3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan wujud kewajiban Bupati selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah kepada publik atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 menetapkan Visi : **“Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri Dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu hasil penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penyelenggaraan pembangunan yang dijabarkan dalam 23 urusan wajib (6 urusan wajib pelayanan dasar dan 17 urusan wajib pelayanan non dasar), 6 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang telah dipetakan dalam Tujuan dan indikator Tujuan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2020. Dalam Laporan kinerja ini akan disajikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis seperti yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

Pengukuran pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaian kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} / \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$



Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal.

Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 34

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	90% s.d 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berikut ini kami sajikan data Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2020 dalam tabel dibawah ini.

Tabel 35

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

NO.	MISI / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan"		
	Tujuan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	Indeks Good Governance	69.55
		Indeks Reformasi Birokrasi	B
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Atas Audit BPK	WTP
		Nilai SAKIP Kabupaten	A
		Status Kinerja EKPPD	ST
		Tingkat Maturitas SPIP	terdefinisi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Baik
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.65
	Misi 2 : "Meningkatnya Perekonomian Daerah melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat"		
	Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	1,4% - 2,5%
		Indeks GINI	0.343 - 0.35
3.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	86.801



NO.	MISI / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,82% - 6,47%
		Tingkat Kemiskinan	7,16% - 8,58%
		Persentase Desa Maju	31,68%
Misi 3 : "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"			
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.84 - 79.50
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.45 Tahun
		Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	10.8 Tahun
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73.69 Tahun
Misi 4 : "Meningkatnya Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban"			
Tujuan 4 : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan		Indeks Kebahagiaan	80.47
7.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Indeks Rasa Aman	76.87
		Indeks Resiko Bencana	113.7
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.65
Misi 5 : "Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan"			
Tujuan 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Kelestarian Lingkungan Hidup		Indeks Infrastruktur	1.422
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53.01
8.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Jalan Kondisi Mantap	90%
		Persentase penurunan Luas wilayah Rawan Genangan	65%
9.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	49.05
		Indeks Kualitas Udara	86.26
		Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	31.04

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Berikut ini kami sajikan data Capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Tabel 36
Perbandingan target dan capaian perjanjian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian	Tingkat Keberhasilan	Keterangan
MISI 1	:	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.				
TUJUAN 1	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan				
Indikator	1	Indeks Good	69.55	77.78	111.83	



Tujuan		Governance			%		
	2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	..	-		Belum dirilis oleh Kementan RB
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Opini Atas Audit BPK	WTP	..	-		Belum dilakukan audit oleh BPK
	2	Nilai SAKIP Kabupaten	BB (Sangat Baik)	..	-		Belum dirilis oleh Kementan RB
	3	Status Kinerja EKPPD	ST (Sangat Tinggi)	..	-		Belum dirilis oleh Kementagri
	4	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100.00%		
	Tingkat Pencapaian Sasaran 1						Belum dapat diukur
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Baik (3,51 - 4,00)	Sangat Baik (4,27)	106.75%		
	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.65	3.13	118.11%		Belum ada Penilaian Kembali (Realisasi 2019)
	Tingkat Pencapaian Sasaran 2				112.43 %	Sangat Berhasil	
MISI 2	: Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat						
TUJUAN 2	: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing						
Indikator Tujuan	1	Pertumbuhan Ekonomi	1,4 - 2,5%	- 3.69%	- 263.57 %		Bappeda
	2	Indeks GINI	0,343 - 0,35	-	-		Belum dirilis oleh BPS
Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	1	PDRB perkapita	86.801	86.425	99.57%		BPS
	Tingkat Pencapaian Sasaran 3				99.57%	Berhasil	
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.82-6,47%	10.97 %	30.45%		BPS
	2	Tingkat Kemiskinan	7,16-8,58%	5.59%	121.93%		BPS
	3	Persentase Desa Maju	31.68%	42.55 %	134.31%		DPMD
	Tingkat Pencapaian Sasaran 4				95.56%	Berhasil	
MISI 3	: Meningkatkan Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan						
TUJUAN 3	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia						
Indikator Tujuan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,84 - 79,50	80.29	100.99 %		BPS Prov.J atim 2020
Meningkatnya	1	Angka Harapan	14.45	14.93	103.32%		BPS



<i>a kualitas pendidikan masyarakat</i>		Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Tahun			Prov.J atim 2020
	2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLs)	10.8 Tahun	10.5 Tahun	97.22%		BPS Prov.J atim 2020
		Tingkat Pencapaian Sasaran 5			100.27 %	Sangat Berhasil	
<i>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</i>	1	Angka Harapan Hidup	73.69 Tahun	74.04 Tahun	100.47%		BPS Prov.J atim 2020
		Tingkat Pencapaian Sasaran 6			100.47 %	Sangat Berhasil	
MISI 4	:	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban					
TUJUAN 4	:	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun,					
Indikator Tujuan	1	Indeks Kebahagiaan	80.47	66.64	82.81%		Bappeda
<i>Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan</i>	1	Indeks Rasa Aman	76.87	76.03	98.91%		
	2	Indeks Resiko Bencana	113.7	112.82	99.23%		
	3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.65	94.13	99.45%		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 7			99.19%	Berhasil	
MISI 5	:	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan					
TUJUAN 5	:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup					
Indikator Tujuan	1	Indeks Infrastruktur	1.422	1.349	94.87%		-
	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	53.01	65.3	123.18 %		-
<i>Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah</i>	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	90 %	82.00 %	91.11%		-
	2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	65 %	61.61 %	94.78%		-
		Tingkat Pencapaian Sasaran 8			92.95%	Berhasil	
<i>Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup</i>	1	Indeks Kualitas Air	49,05	51.52	105,04%		
	2	Indeks Kualitas Udara	86,26	85.14	98,70%		
	3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	31,04	52.26	168,36%		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 9			124,03 %	Sangat Berhasil	

Sebagaimana pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ada 5 (lima) indikator belum ada realisasinya karena belum adanya publikasi atau rilis oleh kementerian dan lembaga terkait. Dari kelima indikator yang belum ada realisasinya tersebut berada pada 2 (dua) indikator tujuan dan 3 (tiga) pada indikator sasaran. Pada indikator tujuan ada 8 (delapan) indikator dan sebanyak 21 (dua puluh satu) berada pada indikator sasaran. Jadi 6 (enam) indikator dari 8 (delapan) indikator tujuan, 5 (lima) indikator nilai rata-rata capaiannya 102,74 artinya **Sangat Berhasil**, sedangkan satu indikator tujuan yaitu Pertumbuhan Ekonomi realisasinya minus 3,16% dari target (1,4 – 2,5)% sehingga target capaiannya tidak tercapai karena disebabkan pandemi Covid 19.



Kemudian untuk realisasi capaian 18 (delapan belas) indikator dari 21 (dua puluh satu) indikator sasaran pada 9 (sembilan) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 rata-rata **Sangat Berhasil** dengan nilai rata-rata capaian 103,005%

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Berikut ini kami sajikan data perbandingan capaian Kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2019.

Tabel 37
perbandingan capaian Kinerja tahun 2020 dengan
capaian kinerja tahun 2019

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				
					2016	2017	2018	2019	2020
	MISI 1	:	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.						
	TUJUAN 1	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan						
	Indikator Tujuan	1	Indeks Good Governance	69.55	65,35	63,96	69,19	74,24	77.78
		2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	C	B	B	B	..
1	<i>Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan</i>	1	Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	..
		2	Nilai SAKIP Kabupaten	BB (Sangat Baik)	B	BB	A	BB	..
		3	Status Kinerja EKPPD	ST (Sangat Tinggi)	..				
		4	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	NA	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
2	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi</i>	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Baik (3,51 - 4,00)	NA	NA	Baik	Baik	Sangat Baik (4,27)
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.65	NA	NA	2,55	3.13	3.13
	MISI 2	:	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat						
	TUJUAN 2	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing						
	Indikator Tujuan	1	Pertumbuhan Ekonomi	1,4 - 2,5%	5.51%	5.80%	6.02%	5.99%	- 3.68%
		2	Indeks GINI	0,343 - 0,35	0.37	0.34	0.35	0.31	0
3	<i>Meningkatnya pendapatan</i>	1	PDRB perkapita	86.801					86.425



	<i>perkapita masyarakat</i>								
4	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.82-6,47 %	6.12 %	4.97%	4.73 %	4.72 %	10.97%
		2	Tingkat Kemiskinan	7,16 - 8,58 %	6.39 %	6.23 %	5.69 %	5.32 %	5.59 %
		3	Persentase Desa Maju	31.68 %	17,70%	20,49%	12,73%	32,92%	42.55%
	MISI 3	:	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan						
	TUJUAN 3	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia						
	Indikator Tujuan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,84 - 79,50	78.17	78.70	79.50	80.05	80.29
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.45 Tahun	14,13 Tahun	14,34 Tahun	14,25 Tahun	14,91 Tahun	14.93 Tahun
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	10.8 Tahun	10,22 Tahun	10,23 Tahun	10,75 Tahun	10,25 Tahun	10.5 Tahun
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	73.69 Tahun	73,67 Tahun	73,71 Tahun	73,83 Tahun	73,98 Tahun	74.04 Tahun
	MISI 4	:	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban						
	TUJUAN 4	:	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun,						
	Indikator Tujuan	1	Indeks Kebahagiaan	80.47	77.11	78.58	79.37	80.28	66.64
7	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	1	Indeks Rasa Aman	76.87	N/A	72,44	73,77	76,01	76.03
		2	Indeks Resiko Bencana	113.7	N/A	126,75	128,6	117,95	112.82
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.65	N/A	93,33	93,33	93,33	94.13
		:	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan						
	TUJUAN 5	:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup						
	Indikator Tujuan	1	Indeks Infrastruktur	1.422	1.406	1.41	1.419	1.417	1.349
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	53.01	49.26	48.79	55.1	61.03	65.33
8	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	90 %	95.3 %	95.9 %	93.06%	91.48%	82.00%
		2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	65 %	40 %	42 %	50 %	53.3 %	61.61%
9	Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	49,05	49.54	49.77	49.59	49.05	51.52
		2	Indeks Kualitas Udara	86,26	84.04	82.05	85.04	86.26	85.14
		3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	31,04	22,97	23,11	36,77	51,09	52.26



Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa mulai awal tahun RPJMD tahun 2016 sampai tahun 2020 rata-rata terjadi trend meningkat realisasi capaian kinerja setiap tahunnya. Namun demikian ada 3 indikator pada tahun 2020 telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya pada indikator Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan hingga minus 3,69% dan realisasi Tahun 2019 sebesar 5,99%. Kemudian pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada tahun 2020 mengalami lonjakan sebesar 6,25 % dari realisasi Tahun 2020 sebesar 10,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar 4,72%. Selanjutnya pada indikator Persentase Kondisi Jalan Mantap juga mengalami penurunan, realisasi tahun 2020 sebesar 82,00% dan realiasasi pada tahun 2019 sebesar 91,48%. Hal tersebut disebabkan karena cuaca ekstrem dan banyak anggaran infrastruktur yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid 19.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

Berikut ini kami sajikan data perbandingan Capaian Kinerja dengan target Rencana Pembangunan jangka Menengah dalam tabel dibawah ini.

Tabel 38

Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akir RPJMD 2021	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan	KETERANGAN	
	MISI 1	:	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan.				
	TUJUAN 1	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan				
	Indikator Tujuan	1	Indeks Good Governance	70,76	77,78	+7,02	Telah melampaui
		2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	..	-	Blm direlease oleh Kementerian PANRB
1	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Opini Atas Audit BPK	WTP	..	-	Blm direlease oleh BPK
		2	Nilai SAKIP Kabupaten	A	..	-	Blm direlease oleh Kementerian PANRB
		3	Status Kinerja EKPPD	Sangat Tinggi (ST)	..	-	Blm direlease oleh Kementerian



						Dalam Negeri	
		4	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Baik (3,51 - 4,00)	Sangat Baik (4,27)	Sangat Baik (+0,27)	melampaui
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,7	3,13	+0,43	melampaui
	MISI 2	:	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat				
	TUJUAN 2	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing				
	Indikator Tujuan	1	Pertumbuhan Ekonomi	2,3%	-3,68%	-5,98	Belum tercapai
		2	Indeks GINI	0,37	-	-	Belum direlease BPS
3	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	1	PDRB perkapita	91.061	86.425	-4.636	Belum tercapai
4	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,89%	10,97%	-1,08	Belum tercapai
		2	Tingkat Kemiskinan	6,27%	5,59%	+0,68	melampaui
		3	Persentase Desa Maju	36,65%	42,55%	+5,90	melampaui
	MISI 3	:	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan				
	TUJUAN 3	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
	Indikator Tujuan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,57	80,29	-0,28	Belum tercapai
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	14,55	14,93	+0,38	melampaui
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	10,8	10,5	-0,30	Belum tercapai
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	73,69	74,04	+0,35	melampaui
	MISI 4	:	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban				
	TUJUAN 4	:	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun,				
	Indikator Tujuan	1	Indeks Kebahagiaan	81,14	66,64	-14,50	Belum tercapai
7	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	1	Indeks Rasa Aman	76,87	76,03	-0,84	Belum tercapai
		2	Indeks Resiko Bencana	75	112,82	+37,82	Melampaui
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,75	94,13	-0,62	Belum tercapai
	MISI 5	:	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan				
	TUJUAN 5	:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup				
	Indikator Tujuan	1	Indeks Infrastruktur	1,426	1,349	-0,08	Belum tercapai
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,26	65,3	+11,04	Melampaui
8	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	95 %	82,00%	-13,00	Belum tercapai
		2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	70%	61,61%	-8,39	Belum tercapai



9	Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	54,54	51,52	-3,02	Belum tercapai
		2	Indeks Kualitas Udara	89,04	85,14	-3,90	Belum tercapai
		3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	27,97	52,26	+24,29	melampaui

Tingkat kemajuan capaian realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJM yaitu pada tahun 2021 sebagaimana tersebut pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa beberapa indikator telah melampaui (+), sehingga untuk target di tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian.

e. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Nasional

Berikut ini kami sajikan data Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Nasional dalam tabel dibawah ini.

Tabel 39
Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020		Keterangan	
			Kab. Sidoarjo	Nasional		
	MISI 1	:	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.			
	TUJUAN 1	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan			
	Indikator Tujuan	1	Indeks Good Governance	77.78	-	
		2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	
1	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Opini Atas Audit BPK	-	-	
		2	Nilai SAKIP Kabupaten	-	-	
		3	Status Kinerja EKPPD	-	-	
		4	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	-	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sangat Baik (4,27)	-	
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.13	-	
	MISI 2	:	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat			
	TUJUAN 2	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing			
	Indikator Tujuan	1	Pertumbuhan Ekonomi	-3.68	-2.19	-1.49
		2	Indeks GINI	-	0.381	Kab. Sidoarjo



						Belu m di rilis BPS
3	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	1	PDRB perkapita	86.425	-	
4	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10.97	7.07	-3.9
		2	Tingkat Kemiskinan	5.59	9.78	4.19
		3	Persentase Desa Maju	42.55	-	
	MISI 3	:	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan			
	TUJUAN 3	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
	Indikator Tujuan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80.29	71.94	8.35
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	14.93	12.98	1.95
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	10.5	8.48	2.02
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	74.04	71.47	2.57
	MISI 4	:	Meningkatnya Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban			
	TUJUAN 4	:	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun,			
	Indikator Tujuan	1	Indeks Kebahagiaan	66.64	-	
7	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	1	Indeks Rasa Aman	76.03	-	
		2	Indeks Resiko Bencana	112.82	-	
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.13	-	
	MISI 5	:	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan			
	TUJUAN 5	:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup			
	Indikator Tujuan	1	Indeks Infrastruktur	1.349	-	
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65.3	-	
8	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	82.00	-	
		2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	61.61	-	
9	Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	51.52	-	
		2	Indeks Kualitas Udara	85.14	-	
		3	Indeks Tutupan Lahan /	52.26	-	

Sebagaimana tersebut pada table diatas, untuk Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Nasional, beberapa capaian tidak bisa dibandingkan karena memang tidak ada capaian nasionalnya. sedangkan pada indikator yang bisa dibandingkan dengan capaian nasional, rata-rata melampaui.



f. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah dicapai.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai Tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 40
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	-	75,71	-
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	112,43	83,70	28,74
3.	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	99,57	90,49	9,07
4.	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	95,56	86,12	9,44
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	100,27	94,89	5,38
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100,47	90,34	10,13
7.	Meningkatnya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	99,71	86,82	13,89
8.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	92,95	56,64	36,31
9.	Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	124,03	78,25	45,78
	Rata-rata Efisiensi			19,84

Dari tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 terjadi efisiensi anggaran. Terhadap 9 (sembilan) sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang sudah dapat diukur tingkat efisiensi anggarannya sebanyak 8 (delapan) sasaran pembangunan, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sasaran belum dapat dihitung tingkat efisiensi anggarannya, disebabkan indikator kinerja sasaran dimaksud belum ada rilis resmi dari BPS dan Kementerian terkait.

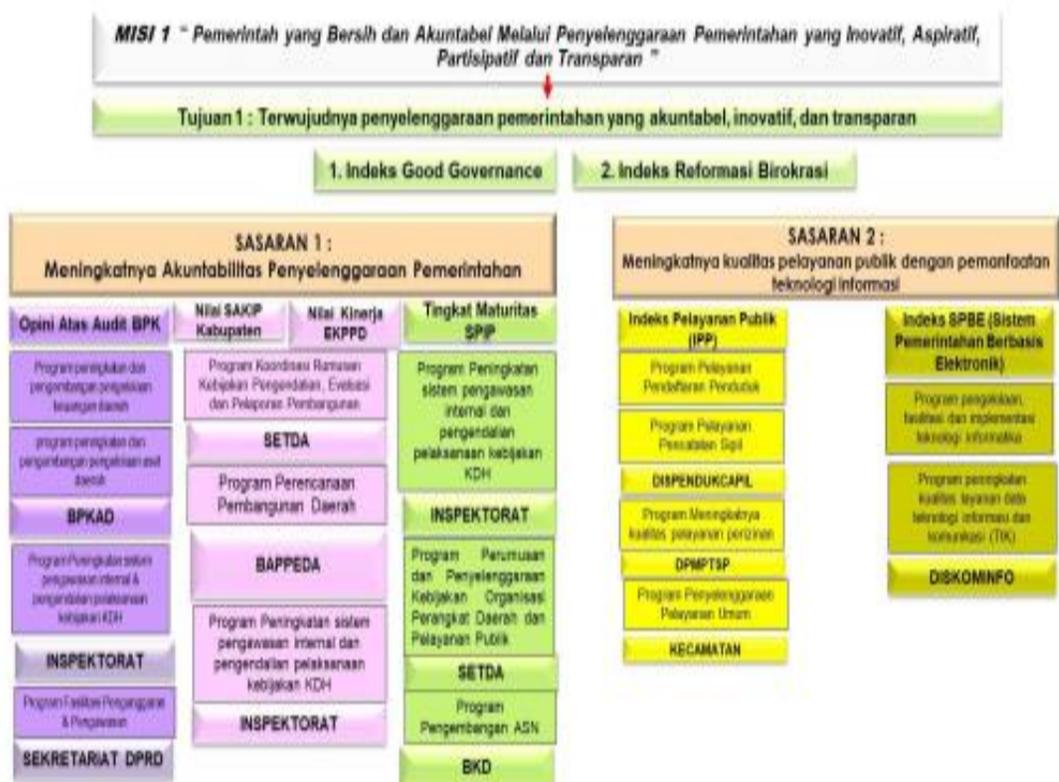
Tingkat efisiensi anggaran 8 (delapan) sasaran pembangunan berkisar antara sebesar 10 % s.d. 20 % atau dengan rata-rata sebesar 19,84%.

g. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, Tema pembangunan pada tahun 2020 adalah **“Percepatan Pembangunan Ekonomi melalui akselerasi sektor-sektor potensial daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah”**, dengan didukung program-program prioritas dalam pencapaian pada setiap misi, sebagai berikut :

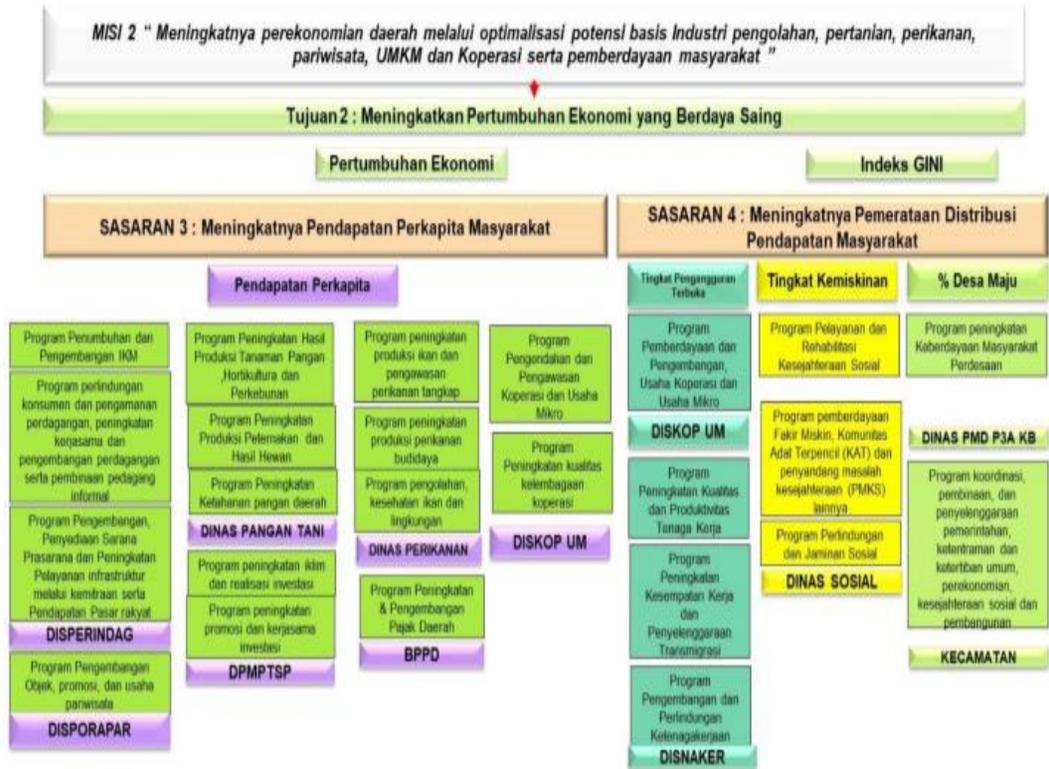
1. Program Prioritas Pendukung Pencapaian Misi – 1

Gambar 5



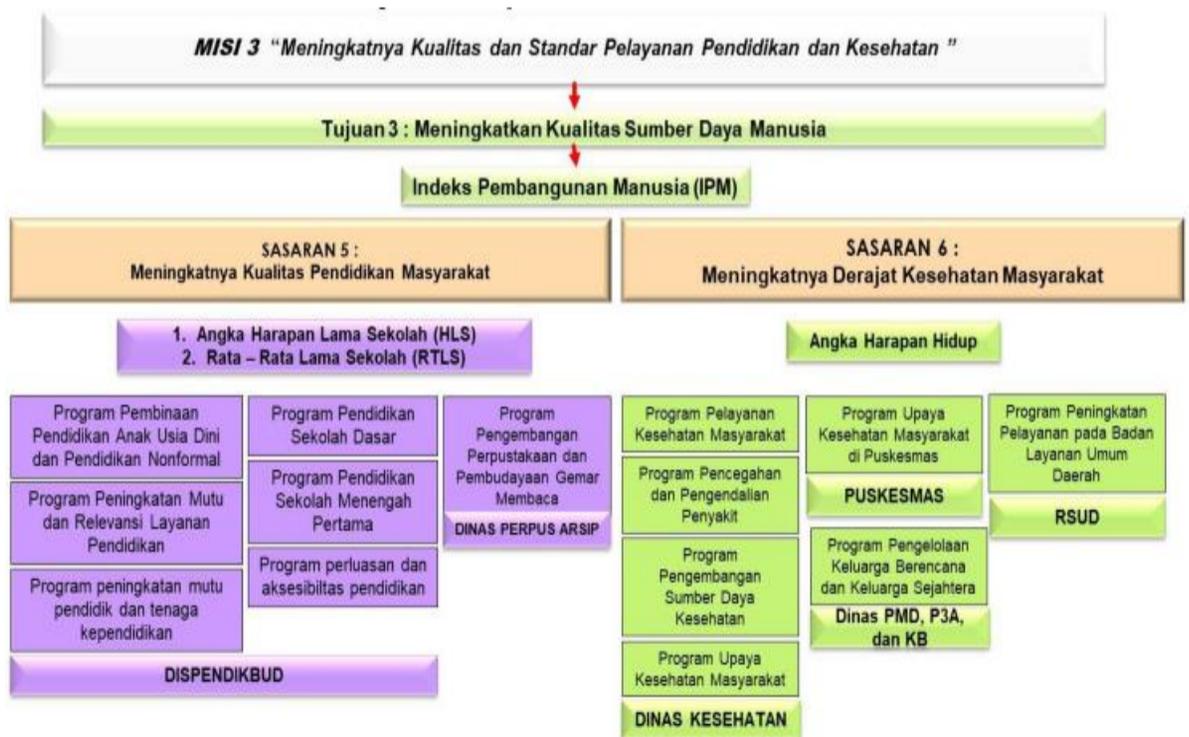
2. Program Prioritas Pendukung Pencapaian Misi – 2

Gambar 6



3. Program Prioritas Pendukung Pencapaian Misi – 3

Gambar 7



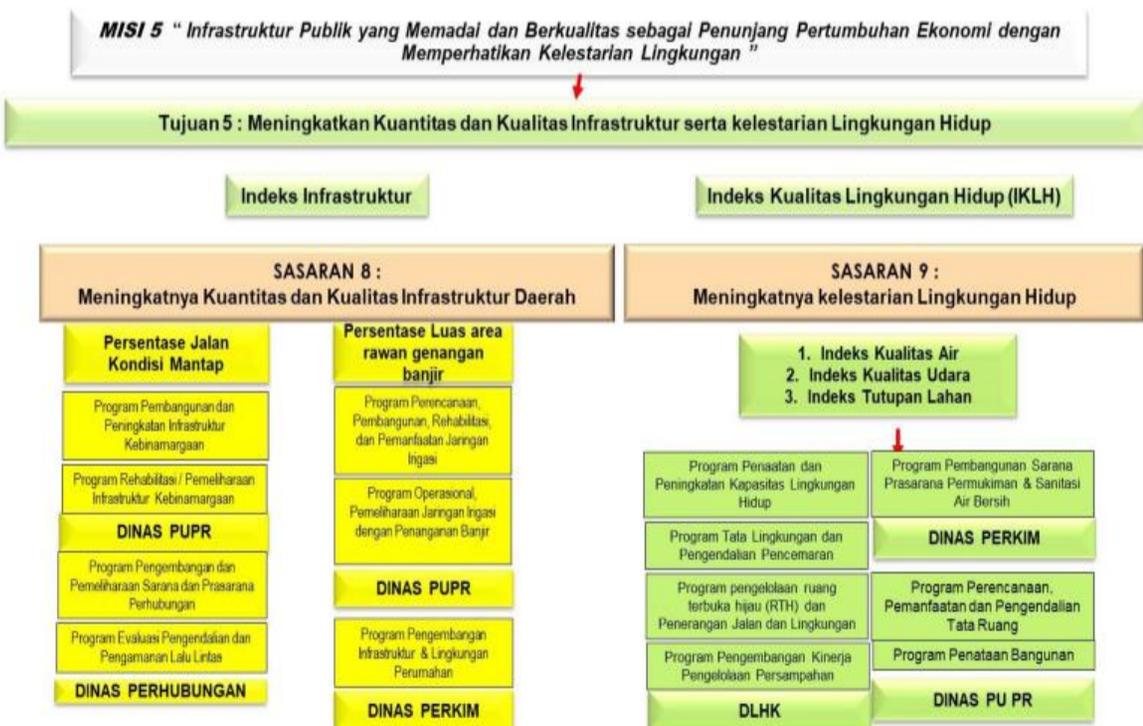
4. Program Prioritas Pendukung Pencapaian Misi – 4

Gambar 8



5. Program Prioritas Pendukung Pencapaian Misi – 5

Gambar 9





Tabel 41
Daftar Program, Anggaran dan Realisasi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	SEKRETARIAT DAERAH	41,541,608,299.00	33,442,290,012.00	80.50%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	12,645,660,184.00	9,928,751,611.00	78.52%
	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pertanian dan BUMD	866,647,090.00	701,798,857.00	80.98%
	Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	776,852,080.00	689,612,501.00	88.77%
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	1,126,938,660.00	883,322,550.00	78.38%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	1,972,143,386.00	1,825,756,271.00	92.58%
	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1,268,766,145.00	1,248,906,996.00	98.43%
	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	9,776,601,570.00	7,934,210,359.00	81.16%
	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	2,575,185,304.00	2,129,806,091.00	82.70%
	Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.	10,532,813,880.00	8,100,124,776.00	76.90%
2	SEKRETARIAT DPRD	92,285,134,614.00	48,957,192,658.00	53.05%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	17,462,784,075.00	13,499,032,994.00	77.30%
	Program Penganggaran dan Pengawasan	40,995,292,898.00	21,414,989,994.00	52.24%
	Program Fasilitasi Persidangan dan Perundang – Undangan	27,134,879,651.00	12,425,272,010.00	45.79%
	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6,692,177,990.00	1,617,897,660.00	24.18%
3	INSPEKTORAT	6,269,890,250.00	4,754,032,832.00	75.82%
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,070,921,300.00	929,450,000.00	86.79%



	Program Pelayanan Kesekretariatan	5,198,968,950.00	3,824,582,832.00	73.56%
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	418,976,328,110.00	399,550,252,274.00	95.36%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,642,446,610.00	3,621,702,659.00	78.01%
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	136,111,121,230.00	131,885,194,065.00	96.90%
	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	620,087,680.00	583,000,000.00	94.02%
	Program perluasan dan aksesibilitas pendidikan	84,141,293,020.00	80,640,395,747.00	95.84%
	Program Pendidikan Sekolah Dasar	6,468,939,125.00	4,670,206,486.00	72.19%
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9,370,693,080.00	8,887,732,468.00	94.85%
	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	13,577,600.00	13,225,600.00	97.41%
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1,828,822,150.00	1,484,949,475.00	81.20%
	Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)	175,779,347,615.00	167,763,845,774.00	95.44%
5	DINAS KESEHATAN	336,245,035,610.24	273,115,591,194.16	81.23%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,940,782,507.60	6,930,117,995.00	87.27%
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	31,601,241,702.00	21,943,295,882.00	69.44%
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7,054,972,060.00	5,680,730,153.00	80.52%
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	81,204,163,595.00	63,529,224,538.00	78.23%
	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	100,210,968,634.00	80,760,512,758.00	80.59%
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	108,232,907,111.64	94,271,709,868.16	87.10%
6	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	252,022,707,095.00	121,370,618,592.00	48.16%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	6,381,146,432.00	4,632,476,357.00	72.60%
	Program Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengelolaan Data ke-PU-an	5,162,081,951.00	3,307,568,314.00	64.07%
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	186,136,974,854.00	69,819,056,412.00	37.51%
	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pematuan dan Pengendalian Banjir	54,342,503,858.00	43,611,517,509.00	80.25%
7	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	207,699,965,194.00	135,743,983,660.00	65.36%



	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,303,050,663.00	2,483,235,591.00	75.18%
	Program Penataan Bangunan	136,714,780,383.00	88,760,954,525.00	64.92%
	Program Pengawasan Bangunan	1,199,913,360.00	1,058,368,882.00	88.20%
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	56,765,805,488.00	34,934,410,341.00	61.54%
	Program Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, dan Fasilitas Permasalahan Pertanahan	9,716,415,300.00	8,507,014,321.00	87.55%
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21,107,040,645.00	19,118,346,139.00	90.58%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	6,054,350,915.00	5,287,569,251.00	87.34%
	Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	13,574,965,700.00	12,556,541,311.00	92.50%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	948,500,300.00	756,388,847.00	79.75%
	Program Perlindungan Masyarakat	529,223,730.00	517,846,730.00	97.85%
9	DINAS SOSIAL	33,101,625,209.00	30,865,343,923.00	93.24%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,762,567,019.00	2,208,948,931.00	79.96%
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	23,038,015,650.00	21,770,747,375.00	94.50%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,418,731,200.00	2,049,092,697.00	84.72%
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,882,311,340.00	4,836,554,920.00	99.06%
10	DINAS TENAGA KERJA	8,404,101,810.00	7,333,421,791.00	87.26%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,575,430,055.00	3,178,622,338.00	88.90%
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,959,810,980.00	2,825,787,510.00	95.47%
	Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1,393,438,220.00	935,436,627.00	67.13%
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Penyelenggaraan Transmigrasi	475,422,555.00	393,575,316.00	82.78%
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	18,458,272,824.00	16,410,383,556.00	88.91%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,514,173,486.00	1,959,961,435.00	77.96%



	Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,885,716,739.00	1,655,732,546.00	87.80%
	Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	12,864,487,599.00	11,669,006,925.00	90.71%
	Program Pengendalian Kependudukan	1,193,895,000.00	1,125,682,650.00	94.29%
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	16,824,201,785.00	14,897,721,062.00	88.55%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	5,790,265,450.00	4,799,756,628.00	82.89%
	Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	894,570,400.00	793,144,984.00	88.66%
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	761,243,620.00	726,781,455.00	95.47%
	Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan	1,456,665,800.00	1,352,003,543.00	92.81%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan	2,676,703,940.00	2,266,062,651.00	84.66%
	Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan	5,244,752,575.00	4,959,971,801.00	94.57%
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	174,411,520,989.00	136,549,732,237.00	78.29%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,368,440,323.00	3,482,998,550.00	79.73%
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	40,083,242,187.00	26,723,521,226.00	66.67%
	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	2,306,776,390.00	1,888,864,442.00	81.88%
	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	1,847,503,700.00	1,514,786,123.00	81.99%
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan	125,805,558,389.00	102,939,561,896.00	81.82%
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10,782,787,100.00	9,801,219,545.00	90.90%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,165,380,530.00	6,612,605,999.00	92.29%
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	828,821,050.00	694,909,537.00	83.84%
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,618,232,960.00	1,397,823,033.00	86.38%
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	924,994,760.00	872,619,366.00	94.34%
	Program pelayanan pencatatan sipil	245,357,800.00	223,261,610.00	90.99%



15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15,832,953,530.00	10,671,190,679.00	67.40%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	8,662,204,560.00	7,020,400,257.00	81.05%
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,201,048,650.00	998,049,138.00	83.10%
	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	344,574,280.00	331,915,280.00	96.33%
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa	2,020,125,780.00	1,668,959,980.00	82.62%
	Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa	3,605,000,260.00	651,866,024.00	18.08%
16	DINAS PERHUBUNGAN	39,377,326,185.00	28,349,656,250.00	71.99%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,831,949,350.00	3,899,318,122.00	80.70%
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	7,454,517,600.00	6,154,555,252.00	82.56%
	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	8,382,560,885.00	2,477,774,712.00	29.56%
	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	17,451,287,170.00	14,747,009,920.00	84.50%
	Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem Informasi di bidang Perhubungan	1,257,011,180.00	1,070,998,244.00	85.20%
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26,042,179,532.00	24,260,644,674.00	93.16%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,853,030,012.00	1,482,136,780.00	79.98%
	Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	16,244,877,630.00	15,726,019,742.00	96.81%
	Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika	1,333,979,100.00	1,216,800,092.00	91.22%
	Program pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	5,988,899,620.00	5,229,144,860.00	87.31%
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	621,393,170.00	606,543,200.00	97.61%
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	5,469,983,620.00	4,864,772,869.00	88.94%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,420,202,270.00	2,123,442,809.00	87.74%
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	694,262,850.00	621,473,860.00	89.52%
	Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	1,681,876,400.00	1,566,442,900.00	93.14%
	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	673,642,100.00	553,413,300.00	82.15%



19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8,330,769,490.00	7,126,258,320.00	85.54%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,047,530,440.00	5,914,570,818.00	83.92%
	Program Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	196,868,220.00	185,064,620.00	94.00%
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	117,414,900.00	96,285,600.00	82.00%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	968,955,930.00	930,337,282.00	96.01%
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	17,435,771,829.00	12,915,106,246.00	74.07%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,890,633,339.00	2,501,987,160.00	86.55%
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2,197,512,350.00	1,323,811,937.00	60.24%
	Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan	526,255,000.00	458,135,760.00	87.06%
	Program Pengembangan Objek, Promosi dan Usaha Pariwisata	3,392,989,760.00	2,660,144,482.00	78.40%
	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan	8,428,381,380.00	5,971,026,907.00	70.84%
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,681,065,351.00	5,143,022,089.00	90.53%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,213,421,666.00	1,821,072,932.00	82.27%
	Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan	2,384,755,194.00	2,265,868,633.00	95.01%
	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	434,999,360.00	423,870,667.00	97.44%
	Program Pengelolaan, Pelayanan dan Dokumentasi Kearsipan	647,889,131.00	632,209,857.00	97.58%
22	DINAS PERIKANAN	39,682,100,390.00	38,444,731,844.00	96.88%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,903,246,279.00	1,615,660,106.00	84.89%
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam	324,106,180.00	307,030,422.00	94.73%
	Program Peningkatan produksi perikanan Budidaya	36,890,147,856.00	35,975,060,427.00	97.52%
	Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	564,600,075.00	546,980,889.00	96.88%
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32,173,513,699.77	27,041,997,449.00	84.05%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,138,527,328.77	6,632,486,616.00	92.91%



	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal	5,796,034,030.00	5,732,775,259.00	98.91%
	Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta pendapatan pasar rakyat	14,573,243,281.00	13,374,583,314.00	91.77%
	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	4,665,709,060.00	1,302,152,260.00	27.91%
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12,942,017,161.00	11,261,403,519.00	87.01%
	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	1,179,677,940.00	1,125,815,475.00	95.43%
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	841,417,400.00	825,546,905.00	98.11%
	Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah	2,184,878,100.00	2,148,011,220.00	98.31%
	Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah	1,153,574,800.00	1,094,924,440.00	94.92%
	Program perencanaan pembangunan daerah	2,820,790,830.00	2,517,671,140.00	89.25%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,761,678,091.00	3,549,434,339.00	74.54%
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10,009,563,206.00	9,064,276,656.00	90.56%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,245,310,096.00	3,641,459,411.00	85.78%
	Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3,056,589,410.00	2,917,128,198.00	95.44%
	Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,074,644,700.00	984,312,850.00	91.59%
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	1,633,019,000.00	1,521,376,197.00	93.16%
26	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	9,893,695,167.00	8,913,168,034.00	90.09%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,762,010,517.00	4,393,266,733.00	92.26%
	Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.	2,048,054,900.00	1,821,406,900.00	88.93%
	Program Penetapan Pajak Daerah.	2,064,674,900.00	1,874,912,033.00	90.81%
	Program Pengendalian Pajak Daerah	1,018,954,850.00	823,582,368.00	80.83%



27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8,852,578,865.00	7,635,090,699.00	86.25%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,826,227,894.00	3,421,833,901.00	89.43%
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	559,078,520.00	468,413,988.00	83.78%
	Program Pengembangan ASN	1,216,931,000.00	1,039,724,000.00	85.44%
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	1,150,922,081.00	976,118,510.00	84.81%
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	2,099,419,370.00	1,729,000,300.00	82.36%
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9,561,386,200.00	7,612,753,712.00	79.62%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,904,637,300.00	2,448,053,043.00	84.28%
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4,212,682,200.00	3,361,210,000.00	79.79%
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1,545,417,400.00	1,124,198,069.00	72.74%
	Pogram Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga	898,649,300.00	679,292,600.00	75.59%
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15,819,806,874.00	12,929,217,854.00	81.73%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,072,158,994.00	2,895,713,172.00	71.11%
	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	8,422,677,980.00	7,409,744,311.00	87.97%
	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan	2,319,740,100.00	1,826,300,671.00	78.73%
	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1,005,229,800.00	797,459,700.00	79.33%
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	574,895,657,671.75	549,718,408,774.55	95.62%
	Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah	574,895,657,671.75	549,718,408,774.55	95.62%
31	KECAMATAN SIDOARJO	20,338,084,482.00	18,297,566,836.00	89.97%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,757,766,820.00	1,479,763,862.00	84.18%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	203,699,900.00	161,010,401.00	79.04%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,598,632,730.00	1,211,731,480.00	75.80%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	16,777,985,032.00	15,445,061,093.00	92.06%



	Kelurahan			
32	KECAMATAN CANDI	1,986,435,023.00	1,770,735,417.00	89.14%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,317,801,023.00	1,172,633,303.00	88.98%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	632,034,000.00	564,721,126.00	89.35%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan umum	36,600,000.00	33,380,988.00	91.20%
33	KECAMATAN BUDURAN	2,673,193,550.00	2,409,288,077.00	90.13%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,912,857,820.00	1,709,343,160.00	89.36%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	723,464,930.00	663,692,831.00	91.74%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan umum	36,870,800.00	36,252,086.00	98.32%
34	KECAMATAN GEDANGAN	2,253,632,065.00	2,051,624,596.00	91.04%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,586,035,341.00	1,423,516,117.00	89.75%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	626,521,424.00	589,304,479.00	94.06%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan umum	41,075,300.00	38,804,000.00	94.47%
35	KECAMATAN SEDATI	2,524,324,440.00	2,142,096,904.00	84.86%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,513,673,040.00	1,241,973,855.00	82.05%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	923,915,200.00	816,063,183.00	88.33%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	86,736,200.00	84,059,866.00	96.91%
36	KECAMATAN WARU	4,761,729,670.00	2,972,225,723.00	62.42%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,443,549,570.00	1,929,523,867.00	56.03%



	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,318,180,100.00	1,042,701,856.00	79.10%
37	KECAMATAN TAMAN	14,972,721,566.00	13,540,819,776.00	90.44%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,380,229,790.00	2,088,923,444.00	87.76%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	248,000,000.00	243,621,000.00	98.23%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	948,098,920.00	890,131,055.00	93.89%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	11,396,392,856.00	10,318,144,277.00	90.54%
38	KECAMATAN SUKODONO	4,737,367,480.00	3,334,676,174.00	70.39%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,524,131,332.00	2,287,672,905.00	64.91%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	768,438,348.00	626,273,054.00	81.50%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	444,797,800.00	420,730,215.00	94.59%
39	KECAMATAN WONOAYU	1,766,360,500.00	1,607,681,274.00	91.02%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,317,490,900.00	1,175,664,894.00	89.24%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	438,249,800.00	421,396,580.00	96.15%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	10,619,800.00	10,619,800.00	100.00%
40	KECAMATAN KRIAN	8,678,750,710.00	7,010,263,620.00	80.78%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,558,200,110.00	2,332,871,890.00	65.56%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,	1,365,803,790.00	1,230,937,928.00	90.13%



	perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	3,754,746,810.00	3,446,453,802.00	91.79%
41	KECAMATAN BALONGBENDO	1,982,416,850.00	1,712,316,705.00	86.38%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,300,581,950.00	1,118,137,883.00	85.97%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	525,562,600.00	500,783,237.00	95.29%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	156,272,300.00	93,395,585.00	59.76%
42	KECAMATAN TARIK	1,947,205,200.00	1,525,481,850.00	78.34%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,498,875,100.00	1,152,941,042.00	76.92%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	448,330,100.00	372,540,808.00	83.10%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	-	-	#DIV/0!
43	KECAMATAN TULANGAN	1,975,046,300.00	1,715,292,337.00	86.85%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,143,707,500.00	953,289,479.00	83.35%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	827,388,800.00	758,052,858.00	91.62%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	3,950,000.00	3,950,000.00	100.00%
44	KECAMATAN PRAMBON	2,342,220,635.00	1,951,926,003.00	83.34%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,746,727,175.00	1,431,896,597.00	81.98%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	595,493,460.00	520,029,406.00	87.33%
45	KECAMATAN			80.95%



	KREMBUNG	1,910,370,774.00	1,546,397,682.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,296,690,124.00	1,026,002,040.00	79.12%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	595,978,650.00	502,792,642.00	84.36%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	17,702,000.00	17,603,000.00	99.44%
46	KECAMATAN TANGGULANGIN	2,169,382,750.00	1,851,619,342.00	85.35%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,812,806,470.00	1,529,396,225.00	84.37%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	356,576,280.00	322,223,117.00	90.37%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	-	-	#DIV/0!
47	KECAMATAN JABON	2,607,201,574.00	2,104,292,770.00	80.71%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,966,599,550.00	1,593,937,502.00	81.05%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	628,555,924.00	502,066,268.00	79.88%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	12,046,100.00	8,289,000.00	68.81%
48	KECAMATAN PORONG	12,592,630,733.00	7,034,656,169.00	55.86%
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,940,548,141.00	1,913,290,951.00	65.07%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	8,785,582,142.00	4,467,107,657.00	50.85%
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	135,898,800.00	130,221,588.00	95.82%
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	730,601,650.00	524,035,973.00	71.73%
	J U M L A H	2,562,349,662,607.76	2,092,440,790,398.71	81.66%



Dari 98 Program dan besaran anggaran program sebagaimana tabel 41 diatas, telah diklasifikasikan dalam 5 Misi dan 5 Tujuan, yang diarahkan mencapai 9 sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 42
Hubungan Misi, Tujuan Program dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN	
			Alokasi 2020	% Anggaran
	MISI 1	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif Aspiratif Partisipasif dan Transparan		
	TUJUAN 1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Opini Atas Audit BPK	Rp 359,097,601,601.37	14.01%
		2 Nilai SAKIP Kabupaten		
		3 Status Kinerja EKPPD		
		4 Tingkat Maturitas SPIP		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	1 Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Rp 38,871,164,583.00	1.52%
		2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
	MISI 2	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan pertanian perikanan pariwisata UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat		
	TUJUAN 2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing		
3	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	1 Pendapatan perkapita	Rp 86,508,603,407.00	3.38%
4	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp 42,338,478,915.00	1.65%
		2 Tingkat Kemiskinan		
		3 Persentase Desa Maju		
	MISI 3	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan		
	TUJUAN 3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		
5	Meningkatnya kualitas	1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rp 427,765,952,184.00	16.69%



	<i>pendidikan masyarakat</i>	2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)		
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Rp 917,784,548,373.39	35.82%
	MISI 4	:	Meningkatnya Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME serta dapat Memelihara Kerukunan Ketentraman dan Ketertiban		
	TUJUAN 4	:	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Rukun Aman		
7	Meningkatnya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	1	Indeks Rasa Aman	Rp 35,356,380,849.00	1.38%
		2	Indeks Resiko Bencana		
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	MISI 5	:	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan		
	TUJUAN 5	:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup		
8	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	Rp 484,583,852,029.00	18.91%
		2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir		
9	Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	Rp 170,043,080,666.00	6.64%
		2	Indeks Kualitas Udara		
		3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi		

Sebagaimana tabel tersebut, dapat diketahui dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mencapai Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp 917,784,548,373.39 atau 35,82% dari seluruh program (total anggaran Rp. 2,562,349,662,607.76) sebagai salah satu upaya penanganan covid – 19 di Kabupaten sidoarjo.

Dari total seluruh program dan dukungan anggaran menunjukkan hasil capaian kinerja rata-rata 98,96% dan realisasi anggaran 82,55%, sehingga dapat diketahui intervensi program dapat menjawab dari 9 sasaran dengan mencapai hasil kinerja 4 sasaran memperoleh predikat Sangat Berhasil, 4 Sasaran predikat Berhasil dan 1 ssaran belum dapat dinilai karena beberapa indikator kinerja belum ada rilis nilai dari BPS dan



kementerian terkait, hasil analisa capaian kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 43
Analisa Tingkat Keberhasilan Program Penunjang Sasaran

No.	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)	Tingkat Keberhasilan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	-	75,71	-	Belum Dapat Diukur
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	112,43	83,70	28,74	Sangat Berhasi
3.	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	99,57	90,49	9,07	Berhasi
4.	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	95,56	86,12	9,44	Berhasi
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	100,27	94,89	5,38	Sangat Berhasi
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100,47	90,34	10,13	Sangat Berhasi
7.	Meningkatnya Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	99,71	86,82	-20,37	Berhasi
8.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	92,95	56,64	36,31	Berhasi
9.	Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	124,03	78,25	45,78	Sangat Berhasi
Rata-rata Efisiensi				15,56	

Dalam rangka penguatan pencapaian kinerja secara sistematis dalam menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan sistem kinerja melalui beberapa inovasi antara lain :

- a. E-Buddy , merupakan sebuah aplikasi tatanaskah dinas elektronik “tak terbatas tempat dan waktu”, meliputi surat menyurat elektronik, presensi harian, penjadwalan rapat dinas sebagaimana tertuang dalam Perbup Sidoarjo No. 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah dinas elektronik. Link e-Buddy <https://e-buddy.sidoarjokab.go.id>
- b. E-Consulting, merupakan sebuah aplikasi konsultasi oleh para auditor inspektorat secara online pada seluruh perangkat daerah yang tercatat dalam sistem dan dapat diakses melalui link : <http://e-consulting.sidoarjokab.go.id>
- c. E-Kinerja, merupakan aplikasi kinerja bagi ASN di lingkungan



Kabupaten Sidoarjo meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, sasaran kinerja, tugas dan aktifitas, realisasi kinerja, nilai perilaku kinerja, penilaian dan pelaporan kinerja, link <http://skp2020.sidoarjokab.go.id>.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo maka telah dilaksanakan beberapa upaya antara lain :

- a. Memperkuat layanan perijinan dalam satu pintu berada di DPMPTSP dengan mengoptimalkan Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU versi 2.1) dengan alamat **<https://sippadu.dpmptsp.sidoarjokab.go.id/>**
- b. Mengoptimalkan Mall Pelayanan Sidoarjo Jl. Veteran Sidoarjo /lingkar timur Sidoarjo, dengan alamat **<https://mpp.sidoarjokab.go.id/>**.
- c. Menambah Mall Mini Pelayanan di Kecamatan Sukodono dalam rangka mendekatkan pelayanan perijinan kepada masyarakat, alamat **<http://sukodono.sidoarjokab.go.id/read/122/mini-mall-pelayanan-publik-kecamatan-sukodono>**

Penguatan SPBE dengan mengintegrasikan teknologi informatika dalam satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1.a. Nama Program

- 1). Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan dan
- 2). Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

b. Nama kegiatan

- 1). Sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan BOS, BKSM dan BPP
- 2). Pembinaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat

c. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020

d. Yang memberikan tugas

Pemerintah Propinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

e. Besaran pagu anggaran

- 1). Rp. 100.000.000,00
- 2). Rp. 10.000.000,00



f. Realisasi anggaran

- 1). Rp.32.920.000,00
- 2). Rp. 2.300.000,00

g. Hambatan pelaksanaan

Karena Pandemi covid-19, banyak kegiatan yang sifatnya pertemuan-pertemuan hanya dilaksanakan secara daring, sehingga anggaran seperti honor narasumber dan makanan minuman tidak terserap.

h. Solusi

Dilakukan sosialisasi dalam bentuk lain yaitu melalui system Dalam Jaringan (Daring) dan media sosial

2. a. Nama Program

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

b. Nama kegiatan

Sosialisasi Peningkatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

c. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020



d. Yang memberikan tugas

Pemerintah Propinsi, Dinas Kesehatan

e. Besaran pagu anggaran

Rp. 1.253.787.500,00

f. Realisasi anggaran

Rp. 645.865.200,00

g. Hambatan pelaksanaan

Karena pandemi, banyak kegiatan yang sifatnya pertemuan-pertemuan hanya dilaksanakan secara daring, sehingga anggaran seperti honor narasumber dan makanan minuman tidak terserap.

h. Solusi

Melakukan kegiatan secara daring (dalam jaringan). Karena dilakukan secara daring maka beberapa anggaran seperti makanan dan minuman tidak bisa diserap.

3. a. Nama Program

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

b. Nama kegiatan

Peningkatan Keberdayaan Kelembagaan Masyarakat



c. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020

d. Yang memberikan tugas

Pemerintah Propinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

e. Besaran pagu anggaran

Rp. 150.000.000,00

f. Realisasi anggaran

Rp. 148.500.000,00

g. Hambatan pelaksanaan

Tidak ada

h. Solusi

Tidak Ada



5. a. Nama Program

Program Peringatan Hari Jadi Jawa Timur

b. Nama kegiatan

Program Peringatan Hari Jadi Jawa Timur

c. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020

d. Yang memberikan tugas

Pemerintah Propinsi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah setda Prop Jatim

e. Besaran pagu anggaran

Rp. 50.000.000,00

f. Realisasi anggaran

Rp.50.000.000,00

g. Hambatan pelaksanaan :

Tidak ada

h. Solusi :

Tidak Ada



Pada tahun 2020 pelaksanaan tugas pembantuan yang sudah teralokasikan anggarannya banyak yang tidak dilaksanakan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga harus dilakukan refokusing alokasi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk pengatasan Pandemi Covid-19.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND).

Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

IV.1. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :



Tabel 44

SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu.

Tabel 45

Target Capaian SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	2020
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2020
3	Pendidikan AnakUsiaDini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2020



3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 46

Realisasi Target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	158.538	158.538	100%	Jumlah Warga Kabupaten/Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga		Dinas Pendidikan	117	177	100%	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
		Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		dan Kebudayaan				belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam <u>pendidikan kesetaraan</u> Jumlah Warga Kabupaten Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.766	58.766	100 %	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam <u>pendidikan PAUD</u> Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun



4. Sarana Dan Prasarana Bidang Pendidikan Serta Personil

Berikut ini kami sajikan data Sarana dan Prasarana SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 47

Sarana dan Prasarana SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH KELAS	JUMLAH MURID	TENAGA PENGAJAR	KETERANGAN
1	Sekolah Dasar Negeri	466	4.549	118.361	5.892	
2	Sekolah Dasar Swasta Dan Sederajat	117	1.348	34.026	1.891	
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri	46	2.643	40.228	1.256	
4	Sekolah Menengah Pertama Swasta	132	1.284	36.760	1.975	
5	Sekolah Paud Negeri	2	11	272	16	
6	Sekolah Paud Swasta	746	2.500	43.443	2.181	

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.



Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain :

Tabel 48
Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan
Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Pagu Anggaran
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PAGU
1	Pengadaan perlengkapan PAUD	62.692.500
2	Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	39.767.400.000
3	Penyediaan biaya personil peserta didik PAUD	39.767.400.000
4	Pengadaan alat peraga praktik dan peraga siswa PAUD	39.767.400.000
5	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	39.767.400.000
6	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	27.557.592.462
7	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	27.557.592.462
8	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	221.616.644
9	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	3.550
10	Pembangunan Gedung/tuangkelas/ ruang guru PAUD	385.000.000
Pengelolaan Pendidikan Dasar		PAGU
1	Pengadaan perlengkapan sekolah	130.000.000
2	Pengadaan perlengkapan siswa	130.000.000
3	Pengadaan alat peraga praktik dan peraga siswa	130.000.000
4	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	1.300.000.000
5	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	90.958.983
6	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	125.350.274.290
7	Penghitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan dasar	5.715.967.860
8	Pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan dasar	1.050.778.561



9	Pembangunan unit sekolah baru (USB)	28.092.350.608
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru	28.092.350.608
11	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	44.842.125.680
12	Pengelolaan manajemen data pendidikan	5.715.967.860
13	Penyediaan beasiswa untuk anak miskin	700.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PAGU
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	130.000.000
2	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	130.000.000
3	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	130.000.000
4	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.300.000.000
5	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	90.958.983
6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	125.350.274.290
7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.715.967.860
8	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.050.778.561
9	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	28.092.350.608
10	Penghitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan menengah	28.092.350.608
11	Pembangunan unit sekolah baru (USB)	44.842.125.680
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.715.967.860
13	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	44.842.125.680
14	Pengelolaan manajemen data pendidikan	1.045.379.527
15	Penyediaan beasiswa untuk anak miskin	700.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah pertama		PAGU
1	Penyediaan Biaya Personil peserta didik non formal/ kesetaraan	130.000.000
2	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga siswa peserta didik non formal/ kesetaraan	130.000.000



3	Penyelenggaraan Proses Belajar siswa peserta didik non formal/ kesetaraan	130.000.000
4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagibagi Satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	1.300.000.000
5	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	90.958.983
6	Pembinaan kelembagaan dan manajemen pada satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	125.350.274.290
7	Penghitungan dan pemetaanpendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan non formal/ kesetaraan	5.715.967.860
8	Pembangunan Gedung/ruangkelas/ruang guru non formal/kesetaraan	1.050.778.561
9	Rehabilitasisedang/berat Gedung/ruangkelas/ruang guru non formal/kesetaraan	28.092.350.608
10	Pemeliharaan rutin Gedung/ruang kelas/ruang guru non formal/kesetaraan	28.092.350.608
11	Pengadaan perlengkapan Pendidikan non formal/kesetaraan	44.842.125.680
12	Pengelolaan menejemen data pendidikan	5.715.967.860
13	Penyediaan beasiswa untuk anak miskin	700.000.000

3. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain :



Tabel 49

Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan
Pendidikan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan	Dukungan Personil
1	Pendidikan Dasar	27 PNS dan 5 NON PNS
2	Pendidikan Kesetaraan	2 PNS dan 7 NON PNS
3	Pendidikan Anak Usia Dini	13 PNS dan 0. NON PNS

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Pendidikan antaralain :

1. Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan pendidikan antar wilayah, jenjang dan jenis Pendidikan dalam pelaksanaann Kegiatan belajar mengajar secara daring di era pandemic Covid-19

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan antara lain :

1. Melakukan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaann Kegiatan belajar mengajar secara daring di era pandemic Covid-19



IV.2. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Kesehatan Antara Lain :

Tabel 50
SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV



2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu.

Tabel 51

Target Capaian SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	39.067	2020
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	37.291	2020
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	35.515	2020
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	142.365	2020
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	308	2020
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	1.564.584	2020
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	186.826	2020



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	562.203	2020
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	73.559	2020
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	4.336	2020
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	26.749	2020
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	44.020	2020



3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 52

Realisasi target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	37.529	39.067	96,06 %	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
								satu tahun yang sama
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	35.777	37.291	95,94 %	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	34.903	35.515	98,28 %	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
								dalam kurun waktu satu tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	134.114	142.365	94,20%	Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	262	308	85,06%	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	894.610	1.564.584	57,18 %	Jumlah pengunjung usia 15 tahun keatas mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	138.413	186.826	74,09 %	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	237.010	562.203	42,16%	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	57.713	73.559	78,46%	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penyandang DM berdasarkan angka revalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	4.336	4.336	100%	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
								Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	≥ 80%	Dinas Kesehatan	9.088	26.749	33,98 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
								Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
12.	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	100%	Dinas Kesehatan	27.259	44.020	61,92 %	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
	dengan Resiko terinfeksi HIV	yang menerima layanan kesehatan						HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun
								Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama



4. Sarana Dan Prasarana Kesehatan

Berikut ini kami sajikan data sarana dan prasarana standar pelayanan (SPM) Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 53

data sarana dan prasarana SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan

NO	JENIS FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH	JUMLAH KAMAR RAWAT INAP	JUMLAH DOKTER UMUM/ BIDAN	JUMLAH DOKTER SPESIALIS	JUMLAH PERAWAT	JUMLAH APOTEKER	JUMLAH TENAGA UMUM/ ADMIN
1	Rsud Kab Sidoarjo	1	725	33/56	33	674	89	560
2	Puskesmas	26	14	135/440	0	497	57	415
3	Klinik Kesehatan Swasta Rawat	60						



	Inap							
4	Klinik Kesehatan Swasta Tanpa Rawat Inap	158						
5	Klinik Bidan Bersalin	34						



5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain :

Tabel 54

Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM Pelayanan dasar Bidang
Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Alokasi Dana	Realisasi	Present ase
1	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.943.568.748	3.466.353.512	70%
2	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.943.568.748	3.466.353.512	70%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.943.568.748	3.466.353.512	70%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	4.943.568.748	3.466.353.512	70%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.943.568.748	3.466.353.512	70%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	89.148.788	89.148.788	100%
7	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.943.568.748	3.466.353.512	70%



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Alokasi Dana	Realisasi	Presentase
8	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	89.148.788	89.148.788	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	89.148.788	89.148.788	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	15.200.000	15.200.000	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	2.689.961.063	2.195.624.380	82%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	2.689.961.063	2.195.624.380	82%

6. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain :

Tabel 55

Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Dukungan Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.407 PNS dan 592 NON PNS
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Dukungan Personil
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	

7. Permasalahan dan Solusi

1. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 57,18%. Ini disebabkan karena adanya pandemi, sehingga aktifitas posbindu, yang menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19, ditiadakan.
2. Persentase warga usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 79,80%. Ini dikarenakan warga dengan usia 60 tahun keatas sangat beresiko dan rentan terhadap covid, dan kebanyakan juga komorbid, maka semua kegiatan lansia ditiadakan. Pelayanan juga dilakukan melalui telepon.



3. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 42,16%. Sama seperti capaian indikator usia produktif mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, karena adanya pandemi, sehingga aktifitas posbindu, yang menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19, ditiadakan.
4. Persentase penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 78,46%. Sama seperti capaian indikator usia produktif dan penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, karena adanya pandemi, sehingga aktifitas posbindu, yang menyebabkan kerumunan dan berpotensi terhadap penularan covid-19, ditiadakan.
5. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 33,98%. Ini dikarenakan :
 - Pandemi covid menyebabkan petugas kesulitan kontak tracing (penemuan/ pelacakan kontak dengan pasien terduga TB).
 - Pemeriksa cenderung *mensuspectkan* covid bukan TB, karena gejala yang mirip.
 - Orang terduga TB takut berobat ke fasyankes karena takut dicurigai covid.
6. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 tercapai sebesar 61,92%. Ini dikarenakan adanya pandemi covid yang menyebabkan petugas kesulitan tracing (penemuan/ pelacakan kasus).



IV.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pekerjaan Umum Antara Lain :

Tabel 56

SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu.



Tabel 57
Target Capaian SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan
Umum

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	2.033.764	2020
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	2.033.764	2020



3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 58

Realisasi target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Penyebut	Pembilang	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	100%	PDAM Sidoarjo dan P2CKTR	2.033.764	2.033.764	100 %	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Seluruh warga kabupaten



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Penyebut	Pembilang	Nilai	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Bina marga, dan Sumber Daya Air	2.033.764	1.932.589	95,03 %	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic _____ Seluruh warga kabupaten



4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain:

Tabel 59

Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Alokasi Dana
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Rp. 2.381.220.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Rp.990.783.700

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain :



Tabel 60

Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan
Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil	KET
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	4 PNS dan 2 NON PNS	P2CKTR
		613 NON PNS	PDAM
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	2 PNS dan 12 NON PNS	P2CKT R

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah - langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum antara lain :

1. Tingkat cakupan dan pertumbuhan pelanggan baru PDAM yang rendah dan tingkat konsumsi air PDAM yang rendah, kualitas air baku PDAM pada wilayah tertentu kualitasnya kurang baik.
2. Jumlah rumah/bangunan (KK) yang mendapatkan pelayanan pengolahan lumpur tinja di IPLT masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah/bangunan (KK) di Sidoarjo. Hal ini karena kapasitas IPLT, jumlah SDM dan jumlah sarana pengangkutan yang dimiliki UPTD PALD masih belum mencukupi. Selain hambatan tersebut juga dikarenakan kesadaran masyarakat sendiri masih rendah tentang manfaat layanan penyedotan limbah domestic untuk diolah di IPLT. Oleh karena itu target peningkatan pelayanan disesuaikan dengan kapasitas maksimum IPLT. Dan pada tahun 2020,



jumlah rumah/bangunan yang mendapatkan pelayanan sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
 - a. Data layanan SPAM Pedesaan belum terdata dalam RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum).
 - b. Data Lokasi Prioritas Layanan SPALD-S/ SPALD-T belum terdata dalam SSK (Strategi Sanitasi Kota).
2. Penghitugan Kebutuhan
 - a. Area layanan dalam RISPAM dan SSK belum terinci.
3. Perencanaan dan Anggaran
 - a. Pagu anggaran belum sesuai dengan kebutuhan layanan.
4. Pelaksanaan
 - a. Layanan air bersih dan sanitasi yang terbangun belum memenuhi target SPM.

IV.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat Antara Lain :



Tabel 61

SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu.

Tabel 62

Target Capaian SPM Pelayanan dasar
Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2020
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2020



3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 63

Realisasi target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	DP2CKTR	0	0	100%	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang rumahnya tidak layak huni karena bencana
2	Fasilitasi penyediaan	Persentase (%) Warga	100%	DP2CKTR	0	0	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
	rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni						akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten

1. Capaian Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal dari Pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten bernilai 100% walaupun capaian pembilang yaitu Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni nol (nol). Hal tersebut dikarenakan penyebut yaitu Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang rumahnya tidak layak huni karena bencana adalah nol (nol) dengan kata lain bencana dikabupaten sidoarjo tidak menyebabkan kerusakan bagi rumah warga kabupaten sidoarjo yang berada didaerah yang terkena bencana. Dan perlu diketahui bahwa bencana dikabupaten Sidoarjo hanya meliputi Banjir dan Puting Beliung.



2. Capaian target Penerapan Standar Pelayanan Minimal dari Pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten adalah 100% walaupun capaian pembilang yaitu Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni adalah nol (0). Hal tersebut dikarenakan penyebut yaitu Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten sebesar nol (0). Dengan kata lain tidak ada rumah yang perlu direlokasi akibat dari program pemerintah kabupaten Sidoarjo.



4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat Antara lain :

Tabel 64

Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar
Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Alokasi Dana
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Rp.0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Rp.0

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

Tabel 65

Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan
Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal. **(Kajian Resiko Bencana harus detil menyebutkan jumlah, siapa dan alamat dari orang yang diprediksi terkena bencana, serta jumlah, alamat dan tingkat kerusakan bangunan gedung keseluruhan yang diprediksi terkena bencana).**
2. Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal.



(tidak ada atau tidak diinformasikan ke DP2CKTR Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) di setiap proyek Relokasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pengalokasian anggarannya).

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

1. Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD;
2. Memasukan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

IV.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota .



1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

Tabel 66

SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu.



Tabel 67

Target Capaian SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	600	2020
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	720.486	2020
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	720.486	2020
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	544	2020
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	272	2020



3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Target 68

Realiasi target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD/ Lemba ga Penang gung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembila ng	Penyebu t	Nilai	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	Satpol PP Kab. Sidoarjo	600	600	100 %	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan dari penegakan <u>hukum Perda dan perkada</u> Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD/ Lemba ga Penang gung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembila ng	Penyebu t	Nilai	
								yang terkena penegakan Perda dan perkada hukum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penang gulan Bencan a Daerah	720.486	720.486	100 %	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Kabupaten diwilayah rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penang gulan Bencan a Daerah	720.486	720.486	100 %	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Kabupaten diwilayah



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD/ Lemba ga Penang gung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembila ng	Penyebu t	Nilai	
								rawan bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penang gulang an Bencan a Daerah	136	136	100 %	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang) Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang)
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan	100%	Badan Penang gulang	272	272	100 %	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD/ Lemba ga Penang gung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembila ng	Penyebu t	Nilai	
	kebakaran	pemadaman, penyelamatan, dan Evakuasi korban Kebakaran		an Bencan a Daerah				evakuasi korban dampak kebakaran Jumlah kejadian kebakaran dengan menggunakan skala kabupaten/kota yang seharusnya diselamatkan dan dievakuasi menggunakan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamat lengkap (Orang)



4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara lain :

Tabel 69

Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Alokasi Dana
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	15.055.689.730
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	2.319.740.100,00
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :



Tabel 70

Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Personil
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	61 PNS Dan 123 NON PNS
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	62 PNS, 185 NON PNS
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. KRB Belum Berbentuk PERDA.
2. Kejadian bencana perlu di reviu/diperbaiki tiap tahun.
3. KRB Belum detail mendeskripsikan kejadian rawan bencana tiap desa atau kelurahan, sehingga belum bisa dihitung secara detail kebutuhan barang dan biaya untuk pengantasan bencana baik di pra bencana maupun pasca bencana.



4. Pola Layanan dan kesiap siagaan bencana selama ini belum maksimal karena selalu mengandalkan tatap muka yang diundang oleh BPBD Kabupaten.

Adapun solusi yang kami upayakan antara lain :

1. KRB Segera disusun menjadi PERDA Pada 2021
2. Dokumen Teknis dari KRB agar disahkan dalam PERBUP atau SK Bupati, agar mudah di Reviu tiap tahun (KRB Per Desa/Kelurahan)
3. Reviu Bencana tiap tahun hendaknya melibatkan dari pihak Desa dan Kecamatan dengan Hasil Reviu berbasis peta citra.
4. Dokumen Teknis KRB (KRB perdesa kelurahan) harus detail menyajikan area yang rawan bencana per Desa/Kelurahan sehingga bisa dihitung perencanaan kebutuhan barang dan biaya penanganan Bencana (Pra dan Pasca) lebih detail.
5. Posting/alokasi anggaran dan barang diserahkan kepada OPD masing2 yang menangani dibawah koordinasi BPBD seperti Dinsos, Dinkes, DP2CKTR.
6. Membuat Group WA berjenjang mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan, WA group Desa dan WA Group RT.
7. BPBD Menyiapkan materi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana seperti mitigasi bencana dan bagaimana penanganann bencana (Pra dan Pasca) Berupa video animasi dan paparan.
8. Mengadakan pelatihan perwakilan dari satgas bencana tiap desa/kelurahan yang dibagi perkecamatan.



IV.6. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Sosial Antara Lain :

Tabel 71

SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu.



Tabel 72

Target Capaian SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	7.359	2020
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	3.390	2020
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	30.358	2020
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	221	2020
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	60.115	2020



3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 73

Realisasi Target Capaian SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Penyebut	Pembilang	Nilai	
1.	Rehabilitasi social dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	100%	Dinas Sosia	7.359	5.932	80.61 %	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti _____ Jumlah keseluruhan warga



								kabupaten penyandang disabilitas diluar panti
2	Rehabilitasi social dasar anak telantar diluar Panti	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosia	3.390	3.390	100%	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah keseluruhan anak telantar diluar panti
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial	30.358	20.314	66.91 %	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh <u>Rehabilitasi sosial diluar panti</u> Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar diluar panti
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial	221	221	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis diluar panti



5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	Dinas Sosial	60.115	60.115	100%	Jumlah korban bencana yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca
----	---	---	------	--------------	--------	--------	------	---

1. Capaian target Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penyandang Disabilitas telantar diluar Panti maka hasilnya sesuai tabel diatas yaitu 80,61 %. Namun jika dibandingkan dengan Target yang telah ditetapkan untuk dilayani pada tahun 2020 maka capaian target Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti adalah 100%.
2. Capaian target Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar Panti jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah warga Kabupaten lanjut usia terlantar diluar panti maka capaian targetnya sesuai dengan tabel diatas yaitu sebesar 66,91%. Namun jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 maka capaian target Pelayanan Dasar Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar Panti adalah sebesar 100%.



4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Sosial Antara lain :

Tabel 74

Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Alokasi Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	68.026.800
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	74.528.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	1.923.293.200
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	153.226.240
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	4.713.482.500

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.



Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

Tabel 75

Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi social dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	35 PNS Dan 33 NON PNS
2	Rehabilitasi social dasar anak telantar diluar Panti	
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	
6.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	
	b. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	
	c. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	



6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial antara lain :

1. Adanya NIK tidak valid pada Angka penyebut 41.328 penerima bantuan (Sedang dilakukan proses validasi data)
2. Adanya panti asuhan mengundurkan diri karena pergantian kepengurusan.
3. Panti Mundur dari daftar penerima bantuan karena pengurus mengundurkan diri, sehingga panti mengembalikan dana.

Adapun Solusi yang Kami lakukan antara lain :

1. Melakukan penyempurnaan Pendataan penerima bantuan;
2. Dibuat Revisi pengecualian diaturan jika pengurus meninggal dunia (adanya kemudahan syarat).



IV.2. Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Adapun program kegiatan per bidang yang dilakukan antara lain:

A. Program Kegiatan SPM Bidang Pendidikan

Adapun program kegiatan tahun 2020 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No.	Pelayanan Dasar	Program Kegiatan
1	Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Evaluasi Sekolah SD/MI/SMP/MTs2. Pengembangan sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan (DAK).SD/SMP3. Pembinaan dan Penyelenggaraan teknis SD/SMP4. Pendampingan dan Penyelenggaraan sarana prasarana sekolah.SD/SMP/MI/MTs5. Pengembangan sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (Non DAK)6. Penyelenggaraan akreditasi pendidikan sekolah dasar.



		<p>7. Fasilitas Implementasi kurikulum SD/SMP</p> <p>8. Penyelenggaraan Pelayanan perijinan bidang pendidikan SD/SMP</p> <p>9. Pemberian Dana BPP (Biaya Personal Pendidikan) SD/MI/SMP/MTs</p>
2	Pendidikan Kesetaraan	<p>1. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan Masyarakat.</p> <p>2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.</p> <p>3. Penyelenggaraan dan Operasional UPT SKB.</p> <p>4. Penyelenggaraan perijinan lembaga pendidikan masyarakat.</p> <p>5. Pemberian Biaya Operasional Pendamping (BOP) Kesetaraan</p>
3	Pendidikan Anak Usia Dini	1. Pembinaan Penyelenggaraan PAUD/TK



		2. Penyelenggaraan perizinan lembaga PAUD/TK. 3. Pengembangan sarana dan Prasarana 4. Pemberian Biaya Operasional Pendamping (BOP) PAUD
--	--	---

B. Program Kegiatan SPM Bidang Kesehatan

Adapun program kegiatan tahun 2020 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Program
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Upaya Kesehatan Masyarakat



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Program
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Pencegahan & Pengendalian Penyakit
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Pencegahan & Pengendalian Penyakit



C. Program Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Adapun program kegiatan tahun 2020 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Program Kegiatan	Ket
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Program Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Sanitasi Air Bersih	P2CKTR
		Pemasangan Tambahan Sambungan Baru sebanyak 4.289 SR	Program PDAM
		Pembangunan distributor center air Umbulan II di DC Jabon, DC Candi dan DC Sidoarjo	
		Pemasangan Jaringan distribusi Umbulan II	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Program Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Perumahan	



D. Program Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Adapun program kegiatan tahun 2020 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Program
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
		Penyiapan sumberdaya untuk rehabilitasi pasca bencana
		Pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana
		Penyusunan laporan pasca bencana
		Koordinasi pemulihan pasca bencana
		Pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Monev penyediaan prasarana permukiman
		Pembangunan sarana dan prasarana permukiman (termasuk DAK, RSH, pencegahan dan penanganan kawasan kumuh dan kampung nelayan)
		Pemeliharaan prasarana permukiman
		Rehab rumah tidak layak huni
		Monev penyediaan prasarana perumahan
		Operasional pelayanan pemukiman
		Operasional pengelolaan rusunawa
		Pembangunan/peningkatan sarana, prasarana dan utilitas perumahan
		Pembinaan tata lingkungan perumahan
		Perencanaan teknis prasarana perumahan
		Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan



E. Program Kegiatan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun program kegiatan tahun 2020 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No	Pelayanan Dasar	Program
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Program pembinaan operasional, pengembangan dan pengendalian perlindungan masyarakat
		Program pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan
		Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
		Program Peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran



F. Program Kegiatan SPM Bidang Sosial

Adapun program kegiatan tahun 2020 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Program
1	Rehabilitasi social dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2	Rehabilitasi social dasar anak telantar diluar Panti	
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	2. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	
	3. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencakup 2 (tiga) substansi pokok capaian kinerja yang disajikan, antara lain :

1. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari :
 - a. capaian kinerja makro;
 - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome (hasil) dan Output (Keluaran);
 - c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan.

Dari penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome (hasil) dan output (keluaran) serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penerapan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2020 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas. Sedangkan ketidaktercapaian harus lebih diupayakan di tahun mendatang agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi optimal.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita petunjuk, bimbingan, kekuatan serta keberkahan dalam menjalankan tugas kita membangun kabupaten Sidoarjo yang kita cintai bersama ini. Aamiin Yarobbalalaamiin.



DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL TABEL	HAL
1	Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2019	3
2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2019	4
3	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2019	5
4	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2019	6
5	Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019	6
6	Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kecamatan Tahun 2020	8
7	Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	9
8	Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	11
9	Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2020	12
10	Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019	13
11	Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan	14
12	Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	16
13	Target dan Realisasi Pendapatan tahun 2020	21
14	Program Pembangunan berdasarkan RPJMD	26
15	Kegiatan Pembangunan berdasarkan RPJMD	35
16	Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan	59
17	Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Urusan	59



	Pendidikan	
18	Program Kegiatan Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan	61
19	Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan	63
20	Alokasi Anggaran Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan	64
21	Program Dan Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	65
22	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	66
23	Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	67
24	Program dan Kegiatan dalam Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	67
25	Pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	68
26	Alokasi Anggaran Pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	69
27	Program dan Kegiatan dalam Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	69
28	Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	71
29	Alokasi Anggaran Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	72
30	Program dan Kegiatan dalam Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	72
31	Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial	73
32	Alokasi Anggaran Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial	74
33	Program dan Kegiatan dalam Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	74



34	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	200
35	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	200
36	Perbandingan target dan capaian perjanjian kinerja	201
37	Perbandingan capaian Kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2019	204
38	Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah	206
39	Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Nasional	208
40	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020	210
41	Daftar Program, Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020	214
42	Hubungan Misi, Tujuan Program dan Anggaran	226
43	Analisa Tingkat Keberhasilan Program Penunjang Sasaran	228
44	SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan	237
45	Target Capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan	237
46	Realisasi Target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan	238
47	Sarana dan Prasarana SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan	240
48	Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan	241
49	Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan	244



50	SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan	245
51	Target Capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	246
52	Realisasi Target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan	248
53	Sarana dan Prasarana SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan	255
54	Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan	257
55	Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan	258
56	SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	261
57	Target Capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	262
58	Realisasi Target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	263
59	Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	265
60	Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	266
61	SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	268
62	Target Capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	268
63	Realisasi Target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	269
64	Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	272
65	Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang	273



	Perumahan Rakyat	
66	SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	275
67	Target Capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	276
68	Realisasi Target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	277
69	Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	281
70	Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	282
71	SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial	284
72	Target Capaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	285
73	Realisasi Target SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial	286
74	Alokasi Anggaran SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial	287
75	Dukungan Personil SPM Pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial	288

DAFTAR GAMBAR

Gambar	JUDUL GAMBAR	HAL
1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo	8
2	Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2019	10
3	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	11
4	Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	15
5	Program Prioritas Pendukung Pencapaian Misi – 1	209
6	Program Prioritas Pendukung Pencapaian Misi – 2	210
7	Program Prioritas Pendukung Pencapaian Misi – 3	210
8	Program Prioritas Pendukung Pencapaian Misi – 4	211
9	Program Prioritas Pendukung Pencapaian Misi – 5	211